

# Perdamaian Aceh

Analisis Kegagalan CoHA dan  
Keberhasilan MoU Helsinki





Perunding GAM pada perundingan di Helsinki. Wawancara di Sidney pada tanggal 10 Oktober 2006

Wawancara dengan salah seorang Staf AMM yang tidak mau disebutkan jatid dirinya, tanggal 4 dan 7 April 2006.

Wawancara dengan Sidney Jones

Wawancara dengan beberapa staf AMM (minta dirahasiakan jatid dirinya).



# Perdamaian Aceh

Analisis Kegagalan CoHA dan  
Keberhasilan MoU Helsinki

Universitas Malikussaleh Press  
xvi, 132 hlm; 21 cm

ISBN 978-979-1372-07-7

1. Perdamaian 2. Aceh 3. CoHA 4, MoU Helsinki I. Judul  
Iskandar Zulkarnaen



**Alamat Penerbit:**  
Universitas Malikussaleh  
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26,  
Lhokseumawe  
P.O. Box 141,  
Nanggroe Aceh Darus-  
salam  
INDONESIA  
☎ +62-0645-41373-40915

**Jakarta Office;**  
Jl. Garuda Blok CC No. 2  
Perum Bojong Depok Baru  
II  
Sukahati – Cibinong  
Bogor - INDONESIA  
☎ +62-021-87914649

Hak Cipta © 2008,  
Iskandar Zulkarnaen  
® *All rights reserved*

**Perdamaian Aceh**  
*Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasi-  
lan MoU Helsinki*

**Editor:**  
M. Muntasir Alwy, SIP

**Hak Penerbitan:**  
Universitas Malikussaleh Press

**Design Cover, Layout & Cetak:**  
Madani Press, PT

**Cetakan Pertama:**  
Februari 2008.

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or  
mechanical, including photocopy, recording, or information storage and

*Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,*

01.html  
www.kompas.com “Gam tolak sjumlah pasal UUPA” u  
Agustus 2006 - 20:07 wib  
www.Kompas.com “Gam tolak sjumlah pasal UUPA” u  
Agustus 2006 - 20:07 wib  
www.kompas.com, “TNI Dukung Perundingan di Hels  
Rabu, 13 April 2005, 02:43 WIB  
www.kompas.com, Selasa, “30 Tahanan GAM di Sumu  
update 01 Agustus 2006 - 18:44 wib  
www.kompas.com./kirim\_berita/print.cfm?nnum=7636  
www.kompas.com./kirim\_berita/print.cfm?nnum=7780  
www.liputan6.com/view/1,129157,1,0,1158600308.ht  
www.sinarharapan.co.id/berita/0609/04/nas06.html  
www.waspada.co.id/berita/aceh/artikel.php?article\_

## Wawancara

Wawancara denga Abror Muda. Wawancara dilakukan  
Donya, Banda Aceh, Tanggal 13 Maret 2006  
Wawancara dengan Ahmad Humam Hamid, Ketua bada  
Recovery Forum tanggal 6 April 2006  
Wawancara dengan Bapak Mayor Jenderal Bambang D  
ior Representatif Pemerintah RI di AMM, pa  
Agustus 2006 di Canberra.  
Wawancara dengan Faye Belnis, National speaker AB  
April 2006, Pukul: 09.00 – 09.45, Tempat: Kant  
Aceh  
Wawancara dengan Faye Belnis, spokesman AMM d  
tanggal 7 April 2006.  
Wawancara dengan Husaini, Panglima Wilayah/Ket  
Iliek, Tempat: Batee Iliek, Samalanga tanggal: ...  
wawancara dengan juha Christensen  
Wawancara dengan Ketua KPA Tapak Tuan, Hotel Cakr  
Aceh Tanggal 13 Maret 2006  
Wawancara dengan M. Nur Djuli  
Wawancara dengan M. Nur Djuli, Anggota Perunding G  
Maret 2006, Pukul: 16.00 – 17.15, Tempat: PE  
Aceh  
Wawancara dengan Mayjed Bambang Dharmono  
Wawancara dengan Mayjend Bambang Dharmono, Sen  
tive RI di AMM, pada tanggal 22 Agustus 2006

*Kompas*, 21 Juli 2005  
*Kompas*, 22 Agustus 2005  
*Kompas*, 23 Juli 2005  
*Kompas*, 24 Nopember 2002  
*Kompas*, 25 Juli 2005  
*Kompas*, 26 September 2005  
*Kompas*, 5 Juni 2005  
*Kompas*, 7 Juni 2005  
*Kompas*, 7 Mei 2003  
*Kompas*, 8 Agustus 2005  
*Kompas*, 9 Agustus 2005  
*Koran Tempo*, 27 Januari 2003  
*Tempo*, 14 Agustus 2005  
*Tempo*, 24 Juli 2005  
*Tempo*, 31 Juli 2005

### Situs Internet (*website*)

[www.serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=19742](http://www.serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=19742)  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), "GAM Belum Tentukan Calon Gubernur", Update  
Senin, 22 Mei 2006, 15:50 WIB  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), "Menjelang Pilkada NAD Keretakan di Tubuh GAM  
Semakin Menjadi-jadi".  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), "Menjelang Pilkada NAD Keretakan di Tubuh GAM  
Semakin Menjadi-jadi".  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), "Petinggi GAM Bahas Strategi Politik", Minggu, 21  
Mei 2006, 14:31 WIB. Lihat juga ICG "Aceh So far So Good",  
No.44, !3 Desember 2005, hlm.5  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), Kamis, 1 Juni 2006, 15:40 WIB, "Pasca-MOU,  
Kriminalitas Meningkat"  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), Minggu, 12 Maret 2006, 23:36 WIB, "AMM Desak  
Pemerintah Selidiki Insiden Peudawa" dan laporan ICG "Aceh  
So far So Good", No.44, !3 Desember 2005, hlm. 7  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), Minggu, 4 Juni 2006, 14:45 WIB, "PPP Deklarasi-  
kan Paket Perdamaian Humam-Hasbi"  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), Selasa, 10 Oktober 2006, 01:00 WIB  
[www.acehkita.com](http://www.acehkita.com), Kamis, 11 Mei 2006, 23:05 WIB, "GAM Siapkan  
Kader Ikut Pilkada"  
[www.acehkita.net/koran/beritadetail.asp?Id=1627&Id2=&berita=Fokus](http://www.acehkita.net/koran/beritadetail.asp?Id=1627&Id2=&berita=Fokus)  
[www.aceh-mm.org/indo/amm\\_menu/about.htm](http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm)  
[# Kata Pengantar](http://www.aceh-</a></p></div><div data-bbox=)

Tulisan ini akan mencoba menganalisis beberapa berkaitan dengan proses penyelesaian konflik di jalan damai yang pernah dilakukan atau diprakarsai ketiga sebagai mediator, yaitu *Henry Dunant Centre* berakhir dengan kegagalan sampai pada proses keberkatanya nota kesepahaman damai yang diprakarsai *Crisis Initiative (CMI)* di Helsinki. Persoalan utama yang hendak diteliti adalah: faktor-faktor apa yang mengakibatkan proses damai prakarsai HDC gagal, sementara CMI berhasil. Selain itu, dalam tulisan tersebut, tulisan ini juga mencoba mengkaji peran Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kajian terhadap UU Pemerintahan Aceh (UU-PA) sebagai konsekuensi dari proses damai yang telah dibuat, serta mengkaji beberapa persoalan Aceh pasca kepergian AMM. Baik HDC maupun CMI merupakan *non government (NGO)* yang *concern* pada penyelesaian konflik. Kehadiran mereka sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian Aceh merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. AMM nakan beberapa hal. Pertama, Pemerintah Indonesia menolakan terhadap kehadirannya mulai pudar. Adalah durrahman Wahid sebagai orang yang pertama kali hadir sebagai pihak ketiga dianggap intervensi atas kedaulatan Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah puluhan tahun terjebak dalam konflik berkepanjangan, tahun 1999 konflik di Aceh kemudian mulai memasuki fase penyelesaian melalui proses damai. Wacana ketiada sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan penolakan terhadap kehadirannya mulai pudar. Adalah durrahman Wahid sebagai orang yang pertama kali hadir

proses penyelesaian damai tersebut dengan melibatkan (HDC) sebagai pihak ketiga yang bertugas memediasi antara pihak yang terlibat konflik yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang menghasilkan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostility Agreement (CoHA)* tanggal 9 Desember 2002.<sup>2</sup> Sayangnya, jalan damai yang dibangun HDC tersebut praktis gagal dengan dideklarasikannya status darurat militer di Aceh oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Mei 2003”.<sup>3</sup>

Dengan kegagalan tersebut, harapan terjadinya penyelesaian konflik melalui jalan damai di Aceh menjadi pesimis. Kegagalan itu telah semakin mengembangkan asumsi negatif atau saling ketidakpercayaan masing-masing pihak yang terlibat konflik terhadap lawannya. Namun konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut mulai memasuki titik jenuh atau *hurting stalemate*, ketika Aceh dilanda bencana alam yang sangat besar yaitu gempa dan gelombang tsunami yang merenggut ratusan ribu korban jiwa. Kondisi buntu dapat menjadi sebuah *entry point* bagi terciptanya kondisi *ripe for resolution* dimana masing-masing kelompok yang terlibat konflik siap untuk melakukan pembicaraan damai dan melihat bahwa melanjutkan konflik adalah tin-dakan yang tidak efektif.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian konflik Aceh melalui jalur damai kemudian dibuka kembali pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla, dengan melibatkan CMI dan menghasilkan nota kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM atau disebut *Hel-sinki's Memorandum of Understanding* pada tanggal 15 Agustus 2005<sup>5</sup> yang berhasil dilaksanakan hingga saat ini.

Sistematika Tulisan ini berisikan beberapa hal yaitu, pertama, kajian teoritik pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik internal. Kedua, kajian terhadap keterlibatan HDC dalam proses penyelesaian konflik secara damai di Aceh. Bagian ini akan membahas peran dan keterlibatan HDC mulai dari awal, proses dialog sampai dengan analisis terhadap kegagalannya. Ketiga, kajian terhadap keterlibatan CMI dalam konflik di Aceh. Bagian ini juga akan membahas awal keterlibatan CMI, proses serta analisis mengapa ia relatif lebih berhasil melahirkan kesepakatan damai dibanding HDC. Bagian empat, menelaah sejauh mana efektifitas peran AMM dalam menjalankan tugas sebagai lembaga monitor

Concerned View from the Region”, *International Journal of Peacekeeping*, Vol.32, No.1-2, (2001);  
 \_\_\_\_\_, *Acheh's Case: A Historical Study of the Struggle for the Independence of Acheh-Sumatra*, University of Malaya Press, 2002.  
 Zartman, I. William. “Mediating Conflicts of Need, *Global Conflict*, Orbis, Vol.44, No.2, (Spring 2000).

### **Naskah MoU**

Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM.  
 Nota Kesepakatan CoHA.

### **Media Massa**

*Jakarta Post*, 18 Januari 2000  
*Jakarta Post*, 18 Januari 2000  
*Jakarta Post*, 19 Mei 2003  
*Jakarta Post*, 6 Mei 2004  
*Kompas* 11 Maret 2003  
*Kompas* 13 Mei 2003  
*Kompas* 16 Mei 2003  
*Kompas* 18 Maret 2003  
*Kompas* 20 Mei 2003  
*Kompas* 31 Januari 2005  
*Kompas* 4 Maret 2003  
*Kompas* 7 April 2003  
*Kompas* 9 April 2003  
*Kompas*, 10 Desember 2002  
*Kompas*, 11 April 2005  
*Kompas*, 11 Pebruari 2005  
*Kompas*, 15 Agustus 2005  
*Kompas*, 15 April 2005  
*Kompas*, 15 Mei 2006  
*Kompas*, 15 September 2005  
*Kompas*, 16 April 2005  
*Kompas*, 16 Desember 2002  
*Kompas*, 16 Juli 2005  
*Kompas*, 16 September 2005  
*Kompas*, 18 Agustus 2005  
*Kompas*. 19 Juli 2005

<sup>2</sup> *Kompas*, 16 Desember 2002

- West Center, 2004.
- , "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Media-tion and Implementation", *Policy Studies 9*, Washington: East-West Center, 2004.
- ICG "Aceh So far So Good", No.44, 13 Desember 2005.
- ICG Asia Report, *Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak akan Membawa pada Perdamaian Kekal*, No. 17, 12 Juni 2001
- Institute for the Security Studies, "The EU Mission in Aceh; Implementing Peace", *Occasional Paper*, No.61, December 2005.
- Introduction* dalam "The EU Mission in Aceh: Implementing Peace", *Occasional Paper*, No.61, December 2005.
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Dari Maaf ke Panik Aceh; Sebuah Sketsa sosiologi Politik*, Buku 1, Jakarta, LSPP, 2000.
- Kriesberg, Louis " The development of the Conflict field", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, (Washington, D.C., USIP, 1997).
- Kriesberg, Louis. *Constructive Conflict; From Escalation to Resolution*, (Lanham: Rowman and Littlefield Publ., 1998).
- Oudraat, Chantal de Jonge. "The United Nations and Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996).
- Pruitt, Dean G.. "The Tactics of Third-Party Intervention", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000).
- , "The Tactics of Third-Party Intervention", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000).
- Rasmussen, J. Lewis. "Peacemaking in the Twenty-First Century: New Rules, New Roles, New Actors", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, (Washington, D.C., USIP, 1997).
- Rudolph, Joseph R., Jr. "Intervention in Communal Conflict", *Orbis*, Vol.39, No. 2, (Spring, 1995).
- Samantha F. Ravich. "Eyeing Indonesia Through the Lens of Aceh", *The Washington Quarterly*, Vol.23, No.3, Summer 2000.
- Stedman, Stephen J., "Negotiation and Mediation in Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996).
- , " Negotiation and Mediation in Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (Ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996).

perdamaian di Aceh. Terakhir, mengkaji tentang pot  
Aceh pasca kepergian AMM.

Metode penulisan ini bersifat kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data pri melalui direct observasi di Aceh seperti pengamatan wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat la proses konflik dan perjanjian damai di Aceh.

Lhokseumawe, 2008

**Iskandar Zulkarnaen**



# Daftar Pustaka

## Buku, Jurnal, Artikel

- “*The EU Mission in Aceh: Implementing Peace*”, *Occasional Paper*, No.61, December 2005.
- Amitai Etzioni, “*Mediation as A World Role for the United States*”, *Washington Quarterly*, Vol.18, No.3, (Summer,1995).
- Aspinal, Edward and Harold Crouch, “*The Aceh Peace Process Failed*,” *Policy Studies 1*, East-West Center, Washington, D.C.
- , “*Pada Akhirnya Perdamaian Terwujud*”, [www.acheh-eye.org/data\\_files/bahasa\\_format/analysis\\_bhs/insideind/analysis\\_insideind\\_2005/analysis\\_insideind\\_01.html](http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/insideind/analysis_insideind_2005/analysis_insideind_01.html)
- , “*The Helsinki Agreement: A More Promising Path to Peace in Aceh?*”, *Policy Studies 20*, East-West Center, Washington, D.C.
- Brown, Michael E. (ed.). *The International Dimensions of Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996).
- Burdock, Daniel, “*Prospek Perdamaian*” lihat [www.acheh-eye.org/data\\_files/bahasa\\_format/analysis\\_bhs/insideind/analysis\\_insideind\\_2006/analysis\\_insideind\\_01.html](http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_01.html)
- Danspeckgruber, Wolfgang. “*Self-Determination, Self-Defense and Security*”, *International Relations*, Vol.XV, No.1, (1968).
- Grevi, Giovanni, “*The Aceh Monitoring Mission; Toward a New Crisis Management*”, *Occasional Paper*, No.61, December 2005.
- , “*The Aceh Monitoring Mission; Toward a New Crisis Management*”, *Occasional Paper*, No.61, Desember 2005.
- Heraclides, Alexis “*The Ending of Unending Conflict: S. P. Huntington*”, *Millenium; Journal of International Studies*, (1997). hlm.681



Apalagi banyak terdapat kekaburan interpretasi terhadap istilah dalam MoU yang bisa merusak perjanjian. Ini harus diantisipasi melalui berbagai pertemuan tingkat tinggi atau para pimpinan RI dan GAM dan dialog pasca MoU tersebut sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dan interpretasi atas berbagai kekaburan kalimat atau istilah dalam MoU.



# Daftar Isi

Kata Pengantar.....

Daftar Isi.....

Daftar Singkatan.....

## Bagian Pertama:

### Peran HDC dan Analisis Kegagalannya dalam

**Menciptakan Perdamaian di Aceh**.....

A. Awal Keterlibatan .....

B. Sikap GAM.....

C. Proses Negosiasi .....

D. *Cessation of Hostility Agreement (CoHA)* .....

E. Konflik setelah CoHA ditandatangani .....

F. Upaya Penggagalan CoHA .....

G. Analisis Kegagalan.....

1. Belum terciptanya kondisi *ripe for resolution*  
*hurting stalemate* .....

2. Tidak menyentuh akar persoalan utama  
status Aceh.....

3. Tidak ada kohesivitas organisasi .....

4. Tidak ada lembaga *monitoring* yang kredibel .....

5. Adanya kepentingan ekonomi di balik konflik .....

## Bagian Kedua:

**Peran AMM dalam Meniaga Perdamaian di Aceh** .....

C. Struktur .....	36
D. Tugas dan Peran .....	38
1. Demobilisasi GAM dan <i>Decommissioning</i> Sen jatanya .....	39
2. Redeployment TNI dan POLRI .....	43
3. Amnesti.....	44
4. Reintegrasi GAM .....	47
5. Undang- Undang Pemerintahan Aceh .....	55
6. Transformasi GAM .....	59
7. Kekerasan dan Hak Asasi Manusia .....	66
E. Evaluasi Kinerja AMM .....	70
F. Kesimpulan .....	75

### Bagian Ketiga:

<b>Peran CMI dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh .....</b>	<b>77</b>
A. Pendahuluan .....	77
B. Mengapa kembali dialog?.....	78
1. GAM dan kelelahan berperang .....	78
2. TNI dan kegagalan “memenangkan hati dan pikiran” .....	79
3. Tsunami? .....	80
C. Proses Menuju Dialog .....	83
D. Perjalanan Dialog .....	85
E. Kontroversi dan tantangan .....	99
1. Metode dan Prosedur yang tidak Transparan .....	103
2. <i>Bargaining</i> GAM.....	105
3. Internasionalisasi Aceh .....	107
4. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah .....	108
5. Partai lokal.....	110
6. Amnesti dan Pengadilan Hak Asasi Manusia .....	118
7. Persoalan Semantik dan Benturan Undang-undang .....	119
F. MoU Helsinki: Lebih Menjanjikan daripada Sebelumnya.....	120

dukung serta adanya perdamaian di Aceh dan menentu-  
pun yang berupaya menggagalkan kesepakatan tersebut  
dipilih semata-mata mempertimbangkan penderitaan  
yang telah lelah hidup dalam konflik dan banyak m  
Wacana penolakan terhadap beberapa butir MoU sang  
dan dapat membangkitkan kembali perlawanan ra  
hadap RI.

Agar implementasi kesepakatan damai Helsinki  
ra praktisi resolusi konflik jangan hanya memfoku  
eskalasi dan negosiasi, tapi juga pada *fairness* dan o  
kebijakan yang dihasilkannya. Akan lebih efektif apal  
*makers*, kaum elit yang mampu mempengaruhi berb  
dan masyarakat harus mendukung, termasuk para pe  
dan elit politik sipil di parlemen. Keberhasilan implem  
Aceh sangat tergantung pada kemampuan institusi-ins  
(seperti AMM atau BRA dan juga insitusi tingkat pusa  
dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik.<sup>76</sup>

Demikian juga masyarakat internasional harus  
terhadap komitmen mereka. Dalam banyak kasus, keg  
mentasi damai terjadi karena kurangnya perhatian in  
da saat kesepakatan akan diimplementasikan, seperti j  
tur yang akan memberikan bantuan saat negosiasi di  
tidak pernah dilakukan saat tahap implementasi adala  
alasan mengapa implementasi kesepakatan damai su  
Apabila masyarakat internasional ingkar dalam hal b  
truksi Aceh, bisa jadi Pemerintah RI akan melak  
sepihak yang dapat mengancam langgengnya perda  
GAM.

Bagaimanapun, MoU masih merupakan awal yar  
oleh langkah-langkah berikutnya demi pembangunan r  
caya diantara semua pihak. Bagaimanapun, bangun  
membutuhkan pondasi yang kokoh, yaitu rasa saling p  
semua pihak, terlebih dengan kondisi hancurnya be  
prasarana maupun infra struktur Aceh akibat bencana  
bumi dan gelombang tsunami. Berbagai macam renc  
*post conflict building* harus dirancang sedemikian rup  
kankan aspek keadilan. Dialog antara pimpinan pemer  
nasional maupun lokal dengan pimpinan GAM harus t  
Lahirnya kesepakatan damai bukan berarti dialoog te  
tas ini penting untuk semakin meningkatkan rasa



perdamaian di Aceh rawan sabotase. Kelompok yang diuntungkan dengan konflik Aceh, seperti spekulan dan pedagang senjata, berpotensi melakukan sabotase karena pada dasarnya mereka tak ingin ada perdamaian.<sup>74</sup> Karena itu, harus diwaspadai manuver-manuver dari kelompok tertentu yang tidak menyukai terciptanya perdamaian di bumi Aceh baik demi keuntungan probadi dan jangka pendek, maupun karena alasan ideologis yang tidak menginginkan penyelesaian konflik secara damai kecuali dengan perang total.

Mereka ini, menurut Todung, adalah para pialang konflik baik yang di pusat maupun lokal yang merasa sangat dirugikan atau akan kehilangan keuntungan manakala perdamaian yang permanen terwujud di Aceh. Dalam berbagai kasus konflik internal, beberapa kelompok akan berupaya merusak perjanjian damai dan kembali menciptakan konflik berkepanjangan segera setelah ia tahu bahwa kehilangan power.<sup>75</sup> Merupakan sesuatu hal yang lazim terjadi dalam konflik dimana akan selalu ada kelompok atau orang-orang yang akan berupaya melakukan upaya untuk menggagalkan perdamaian, setiap kali pendekatan tersebut dilakukan.

Masyarakat juga masih merasa khawatir dengan kondisi keamanan. Satu bulan setelah penandatanganan MoU, AMM masih menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai pencuilikan, intimidasi, pemerasan, pemungutan liar maupun lainnya. Sebagian diantara penduduk juga ada yang terpaksa mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka guna mencari perlindungan dari teror dan intimidasi. Masing-masing pihak, baik TNI maupun GAM, saling menuding dan mengelak bertanggungjawab.

Dari setiap insiden yang terjadi, kedua belah selalu membantah sebagai pelaku dengan argumennya masing-masing dan menyalahkan pihak lain. Ini membuktikan terlalu banyak pihak yang bermain di Aceh. Menurut GAM, terlalu banyak orang di Aceh yang berupaya memancing kekisruhan dengan cara mengintimidasi masyarakat sipil dengan mengaku-aku sebagai anggota GAM. Kondisi tersebut juga diakui oleh Komandan Satuan Tugas informasi Komandi Operasi Pemulihan Keamanan Propinsi NAD, Letkol Erie Soetiko yang mengatakan bahwa pasca penandatanganan kesepakatan damai memang ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dengan mengatasnamakan GAM atau pihak lain dengan mengintimidasi warga.

Agar berbagai hambatan nantinya tidak berdampak lebih jauh, yaitu gagal implementasi MoU, maka harus ada *political will* dari seluruh elemen bangsa dan masyarakat internasional dalam men-

# Daftar Singkatan

AMM	=	<i>Aceh Monitoring Mission</i>
CMI	=	<i>Crisis Management Initiative</i>
CoHA	=	<i>Cessation of Hostility Agreement</i>
ETA	=	<i>Euskadi Ta Azkatasuna</i>
GAM	=	Gerakan Aceh Merdeka
HAM	=	Hak Asasi Manusia
HDC	=	<i>Henry Dunant Centre</i>
KBAK	=	Komite Bersama untuk Aksi Kemanusiaan
KKR	=	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
MoU	=	<i>Memorandum of Understanding</i>
NAD	=	Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	=	<i>Non-Government Organization</i>
RI	=	Republik Indonesia
TNI	=	Tentara Nasional Indonesia
UU	=	Undang-undang



dukusi yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan, jadi karena ada beberapa istilah yang memiliki makna interpretasi berbeda antar GAM dan RI. Kedua, di antara ada beberapa kelompok yang tetap menentang proses GAM serta kritisi tajam terhadapnya baik dari TNI maupun orang sipil, terutama kalangan DPR. Kendati secara dukungan, sikap kecurigaan TNI terhadap GAM masih tinggi.

Ketiga, ada keraguan tentang kohesivitas GAM. Beberapa pihak melakukan pemisahan diri dari kepemimpinan Tiro. Pada saat proses dialog tengah berlangsung, Himpunan Pimpinan Majelis Pemerintahan GAM, kelompok minoritas memisahkan diri dari kepemimpinan Malik Mahmud. GAM pimpinan Malik Mahmud telah tejobak dalam perjuangan Indonesia dan keluar dari garis perjuangan GAM; Akibat Perpecahan makin nampak setelah adanya kekecewaan dari para mantan anggota GAM terhadap para pemimpin penyaluran dana reintegrasi dan proses pilkada (tentu dijelaskan secara detil dalam bagian selanjutnya yang peran AMM). Dari berbagai pengalaman perjanjian damai jadi, Aspinall menyimpulkan bahwa di antara angka dan sekutunya, selalu saja ada sebagian yang ingin menorehkan perangan yang kotor itu".<sup>72</sup>

GAM sendiri, kendati telah melepaskan kemerdekaannya, bukan berarti tertutup untuk melakukan tawar-menawar lagi. Bahkan menurut Nurdini, GAM tidak pernah menyangkal bahwa tidak lagi menuntut kemerdekaan. Tiadanya tuntutan kemerdekaan hanyalah bahasa diplomatik.

"Secara diplomatik, GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan. Dalam MoU tidak disebutkan bahwa GAM akan menorehkan perjuangan kemerdekaan. Tetapi secara diplomatik dianggap GAM sudah meletakkan perjuangan kemerdekaan apa, itu namanya negosiasi."<sup>73</sup>

Keempat, seperti yang dikatakan Todung Mulya, Pembina Yayasan Aceh Kita, dan praktisi Hukum

---

<sup>71</sup> *Tempo*, 24 Juli 2005

<sup>72</sup> Edward Aspinall, "Pada Akhirnya Perdamaian", <http://www.acheh->

Kelima, dari segi materi, MoU Helsinki sangat komprehensif dibanding CoHA. Helsinki tidak hanya mengatur persoalan kemanan saja, tetapi juga mengatur perosalan hubungan politik antara pusat dan Aceh yang kelak dirumuskan dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Mou juga meliputi masalah hak asasi manusia, partisipasi politik, *rule of law*, dan persoalan pembangunan ekonomi serta perluasan senjata GAM dan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Perbedaan lainnya, dalam Helsinki ini juga dilibatkan pihak asing sebagai lembaga monitoring yang terdiri dari negara Eropa dan Asean.

Namun demikian, MoU Helsinki juga bukannya tidak memiliki tantangan. Sejumlah pihak yang tetap menolak dan menentang hasil kesepakatan damai melalui berbagai manuvernya adalah salah satu contoh bagaimana kesepakatan itu bisa mengalami kegagalan di tingkat lapangan. Sebenarnya, adalah sesuatu yang wajar konflik internal sangat sukar diselesaikan melalui jalan dialog, apalagi kalau konflik itu sudah mengakar selama puluhan tahun seperti yang terjadi di Aceh. Sebagian teori konflik percaya bahwa konflik internal sukar bahkan mustahil diselesaikan melalui jalur mediasi dan negosiasi. Bagi mereka, mediasi bukanlah *panacea*. Ia hanyalah sebuah alat kebijakan yang kadang-kadang efektif, tetapi lebih sering tidak.<sup>68</sup> Dibandingkan dengan tindakan *preventive* atau intervensi militer, mediasi terlihat lemah dan sekedar dalih belaka dan upaya terlambat untuk mengakhiri perang.

Pendapat itu bukan tidak didasari oleh adanya fakta. Stedman<sup>69</sup> memberikan bukti. Berbagai upaya negosiasi yang dilakukan dalam banyak konflik internal yang terjadi antara tahun 1980-1900, hanya 15% saja yang berhasil. Sisanya terhenti di tengah jalan karena salah satu pihak kalah secara militer. Negosiasi sulit dilakukan dalam konflik internal karena adanya sumber atau pertarungan konflik yang tidak dapat dibagi. Kompromi hanya mungkin apabila pertentangan tidak begitu fundamen. Heraclides memberikan data lain dimana dari 57 perang yang berakhir pada paruh kedua abad 20, 43 selesai karena kemenangan militer dan hanya 14 yang melalui negosiasi.<sup>70</sup>

Merujuk dari beberapa pemaparan sebelumnya di atas, ada beberapa ancaman yang dapat mengganggu kesepakatan damai. Pertama, dalam pelaksanaannya, apa yang telah disepakati dalam MoU bisa jadi tidak seluas seperti apa yang dimaksudkan atau ada beberapa re-

---

yang berseteru kemudian menyadari bahwa membangun li jauh lebih penting daripada melanjutkan konflik.

Pada masa HDC tidak terdapat kondisi *ripe for hurting stalemate* di Aceh sebagai langkah awal atau terjadinya negosiasi sehingga masing-masing pihak berlihan fundamen yaitu Merdeka (bagi GAM) dan di Kesatuan Republik Indonesia (bagi Pemerintah RI).

Faktor ketiga adalah keterlibatan organisasi internasional negara tingkat regional yaitu ASEAN dan Uni Eropa pemantauan atau AMM. Pada perundingan jilid pertama tidak melibatkan pihak asing dalam pemantauan implementasi pengawas aktif. CoHA gagal karena kurang optimal dan seolah-olah hanya menjadi alat penunda konflik. AMM di Aceh memiliki peran dan kewenangan yang "AMM berhasil mendorong para pihak untuk memeliian."<sup>66</sup> (peran AMM diulas dalam bagian selanjutnya).

Keempat, dari segi pendekatan atau strategi di mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada la utama. Tidak ada kesepakatan sampai setiap poin permasalahan sudah disepakati terlebih dahulu. Dalam kan Aceh, Ahtisaari selalu berpegang pada prinsip penra menyeluruh, tidak parsial. "*Nothing is agreed until agreed*", katanya.<sup>67</sup> Sebelum semua poin menemukan k ditandatangani, maka dianggap belum ada kesepakatan mentasi tidak bisa dilaksanakan. Dan titik persoalan kritis atau fundamen adalah status Aceh: merdeka at NKRI. Artinya, jika status Aceh tidak bisa dipecahkan akan terjadi kesepakatan.

Berbeda dengan HDC yang mendahulukan ge kemudian dialog, CMI mendahulukan adanya kesepakatan mengenai status Aceh antara kedua belah pihak sekukannya gencatan senjata dan pembahasan keamanan ini menekan kedua belah pihak untuk mereposisi tuntutan. Pada masa HDC, status ini nampaknya sengaja lebih mendahulukan *cease fire* dibanding membicarakan Ada kemungkinan pembicaraan status Aceh dilakukan damai dan kondisi Aceh membaik. Namun bukannya pe tercipta, kedua belah pihak berupaya memanfaatkan aan untuk melakukan mobilisasi dan koordinasi.

duk pada keputusan politik kendati beberapa purnawirawan jenderal menentang dan menyerukan pembangkangan. Tentu saja, selalu ada kompensasi ekonomi politik bagi siapapun, termasuk TNI, yang dirugikan dengan terciptanya perdamaian ini karena, misalnya, praktek bisnis kotor mereka yang selama ini memberikan keuntungan, menjadi terhenti.

Kedua, terdapat situasi *ripe for resolution* bagi kedua belah pihak untuk kembali melakukan dialog. Di pihak GAM, terdapat ke-bantuan atau *hurting stalemate* akibat banyak menderita kekalahan perang melawan TNI yang meruntuhkan semangat dan moralnya. Di sisi TNI, meski secara militer selalu meraih kemenangan, ia tidak mampu meraih simpati dan hati rakyat Aceh atau memenangkan "hati dan pikiran". GAM memang dapat dikalahkan, tetapi tidak bisa dihilangkan.

Situasi *ripe for resolution* ini seakan "mendapat restu alam" berupa bencana tsunami yang menjadikan Aceh fokus internasional. Rekonstruksi Aceh pasca tsunami membutuhkan banyak bantuan internasional. Namun masyarakat internasional paham bahwa situasi keamanan dan perdamaian di Aceh sangat buruk. Mereka kemudian menyiratkan sebuah syarat dilaksanakannya kembali perundingan damai dengan GAM apabila bantuan internasional bencana alam Aceh ingin cair. Bambang Dharmono, Senior Representatif RI di Aceh Monitoring Mission (AMM) mengatakan kepada penulis:

"Tanpa suatu kondisi damai, tidak akan bisa kita melakukan rekonstruksi dan membangun kembali Aceh. Kalau tidak ada damai, semua biaya akan dihisap oleh lingkungan yang tidak kondusif untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika ini terjadi, bangsa Indonesia akan dipandang oleh komunitas Internasional tidak mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami. Karena itu, Pemerintah yang harus membuka peluang untuk terjadinya penyelesaian masalah yang dapat diterima semua pihak"<sup>64</sup>

Di pihak lain, GAM melihat dirinya tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi penderitaan rakyat akibat bencana tersebut. Juru Bicara perundingan damai Helsinki untuk GAM, Bachtiar Abdullah mengatakan, setelah gempa bumi dan tsunami, pimpinan GAM dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa nestapa yang sudah dirasakan rakyat Aceh selama 30 tahun bertambah.<sup>65</sup> Kedua belah pihak

## Bagian Pertama

# Peran HDC dan Anal Kegagalannya dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh

### A. Awal Keterlibatan

Keterlibatan HDC pertama kali di Indonesia dimulai pada Agustus 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid menginisiasi dialog kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Aceh.<sup>1</sup> Ketika berpidato di Gedung Sate pada tanggal 30 Januari 2000, Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya dialog kemanusiaan dalam mengubah situasi konflik Aceh. Dialog ini umumnya didasarkan pada ideologi. Sebelumnya, pada tanggal 15 Januari 2000, Duta Besar Indonesia untuk PBB di Geneva, Hassan Wirajuda, menemui Hasan Tiro untuk melakukan pertemuan ini menjadi sejarah kontak pertama face-to-face antara GAM dan pemerintah. Pertemuan ini mengungkap kemungkinan dialog antara Jakarta dan Aceh. Sementara itu, pemerintah kedua Hasan melakukan dialog, Presiden Abdurrahman Wahid

<sup>1</sup>Konrad Huber "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO-led Dialogue Implementation", *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center, 2000

hidup memerintahkan Pejabat Sekretaris Negara, Bondan Gunawan, un-kelemahan dan ancaman. Tetapi kemungkinan perjanjian akan ber-  
tuk menemui pemimpin GAM yang berada di Aceh, Abdullah Syafei.<sup>4</sup> walau kecil. Tetapi kemungkinan perjanjian akan ber-

Inisiatif Gusdur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, ga sangat kecil.<sup>62</sup> Berikut beberapa alasan mengapa produk yang sebenarnya tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen da- Berikut beberapa alasan mengapa produk yang  
lam negeri seperti para pejabat senior di Departemen Luar Negeri, jauh lebih prospektif dibanding apa yang telah dilaku-  
terutama pihak militer (TNI)<sup>5</sup> yang secara tegas dan terus menerus, dari faktor kepemimpinan dan kohesivitas inte-  
mengeluarkan statemen menolak strategi penyelesaian Aceh melalui Dahulu, Inisiatif Gus Dur untuk melibatkan HDC tidak  
dialog dengan pihak GAM yang dianggap pemberontak. Sejak dahulu, dukungan penuh dari dalam negeri, terutama pihak  
TNI selalu menentang proses negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang secara tegas dan terus menerus mengeluarkan  
di Aceh. Bahkan ketika terjadi perubahan sistem politik pada tahun 1998 yang menjungkalkan sistem pemerintahan diktatorial, TNI tetap yang dianggap pemberontak. Bagi masyarakat interna-  
keras menyuarakan bahwa tidak ada perundingan dengan pemberon- katan tersebut dinilai sebuah langkah maju menuju pe-  
tak, GAM, dan mereka harus ditumpas habis dari bumi pertiwi.<sup>6</sup> Bagi yang diwujudkan oleh berbagai pernyataan dan aliran  
TNI, tidak ada kompromi dengan pemberontak kecuali menyerah ser- internasional. Tetapi di dalam negeri, Pemeritah justru  
ta tunduk di bawah pemerintahan dan kekuasaan Negara Kesatuan karena kesepakatan tersebut dianggap sebagai pengal-  
Republik Indonesia. hadap eksistensi GAM.<sup>63</sup>

Tetapi Gusdur memanfaatkan gejolak politik pemerintahan da- Bagi TNI, tidak ada kompromi dengan pembe-  
lam negeri dimana TNI mendapat banyak tekanan sehingga untuk menyerah serta tunduk di bawah pemerintahan dan ke-  
saat itu TNI lebih banyak bersifat defensif dalam menghadapi ra Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Gus Dur  
berbagai hujatan dan kritik dari masyarakat sebagai dampak dari dialog karena memanfaatkan gejolak politik pemer-  
dominasi mereka selama kurun waktu lebih dari tiga dekade di negeri dimana TNI mendapat banyak tekanan sehingga  
bawah kepemimpinan Suharto yang mengakibatkan demokrasi poli- TNI lebih banyak bersifat defensive dan meneri-  
tik, sosial, ekonomi dan hak asasi ditindas yang mengakibatkan pemerintah sipil. Selebihnya, hubungan antara Gus  
mereka harus menerima dan tunduk kepada keputusan pemerintah dikenal tidak harmonis. Gus Dur adalah sosok pres-  
sipil. Gus Dur meminta HDC untuk mengabaikan bargaining internal benar-benar menginginkan tentara mutlak patuh pada  
mengenai penyelesaian Aceh dan secepatnya untuk menyelesaikan di ra kondisi transisi demokrasi di negara ini belum mer-  
bawah kepemimpinan.<sup>7</sup> itu terjadi. Ketidak sukaan terhadap Gus Dur semak-

Sikap GAM saat itu, tidak mau berbicara dengan Pemerintah campur tangan Gus Dur yang terlalu dalam di internal  
Indonesia secara direct, tanpa mediator, karena khawatir akan ditipu Jika dahulu Gus Dur yang sipil murni gagal men-  
lagi. GAM tidak mau berunding tanpa penengah. HDC ditugaskan un- untuk mendukung damai, maka sekarang, SBY yang be-  
tuk mendekati GAM agar mau maju ke meja perundingan.<sup>8</sup> HDC militer mungkin lebih mampu untuk meyakinkan TNI  
sendiri sebenarnya adalah sebuah NGO yang baru tumbuh berkem- dukungan kebijakannya. Bagaimanapun juga, TNI memil-  
bang, kecil dan tidak terkenal di publik internasional.<sup>9</sup> Namun mengenai damai tidaknya Aceh. Sangat kecil kemungki-

---

<sup>4</sup> *Kompas*, 16 Desember 2002

<sup>5</sup> Konrad Huber "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Im-  
plementation", *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center, 2004, hlm.21

<sup>6</sup> "The EU Mission in Aceh: Implementing Peace", *Occasional Paper*, No.61, Decem-  
ber 2005, hlm.5

<sup>7</sup> Konrad Huber "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Im-



yang dikendalikan oleh serta berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang dipermasalahkan adalah:

1. Tidak ada penyebutan UUD 1945
2. Penyebutan Kepala Pemerintah Aceh bukan Gubernur
3. Aceh memiliki Bendera, Himne dan lambang
4. Persetujuan internasional soal Aceh harus disetujui legislatif Aceh
5. Kebijakan administratif pemerintah pusat soal Aceh harus disetujui legislatif Aceh
6. Aceh berhak memperoleh utang luar negeri dan menetapkan suku bunga berbeda dengan BI

Menurut Hamid dan Sofyan, seluruh materi MoU diambil dari dan tunduk kepada undang-undang, terutama UU No.18/2001 Tentang Otonomi Khusus NAD dan UU No 32/2004 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah. Seperti ketentuan Aceh memiliki Bendera, Himne dan lambang diambil dari UU No. 18/2001, yaitu sebagai simbol kultural, bukan simbol kedaulatan. Demikian juga dengan persetujuan internasional soal Aceh harus disetujui legislatif Aceh berdasarkan UU No 32/2004, Kebijakan administratif pemerintah pusat soal Aceh harus disetujui legislatif Aceh berdasarkan UU No 32/2004, dan Aceh berhak memperoleh utang luar negeri dan menetapkan suku bunga berbeda dengan BI berdasarkan peraturan mengenai hutang luar negeri yang terdapat dalam pasal 10 dan 170 UU No 32/2004 dan pasal 5 UU No. 18/2001

Memang, dalam beberapa ketentuan atau poin lainnya, MoU berdampak pada peraturan perundangan yang lain, tetapi itu tidak mengharuskan diamandemennya keseluruhan undang-undang yang ada. Yang perlu diamandemen hanyalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD untuk memasukkan unsur peraturan baru yang termaktub dalam MoU sehingga bersifat *lex specialis* dan tidak berdampak pada peraturan atau undang-undang dan wilayah lain.

Ketiadaan kata UUD 1945 dan tidak disebutkannya gubernur sebagai kepala pemerintah hanyalah soal semantik. Yang dimaksud dengan konstitusi RI adalah UUD 1945 dan yang dimaksud dengan kepala pemerintah adalah gubernur

## F. MoU Helsinki: Lebih Menjanjikan daripada Sebelumnya?

Apakah damai jilid 2 ini akan abadi atau seumur jagung seperti

tokoh yang memiliki pengalaman dalam masalah resolusi kemanusiaan.<sup>10</sup>

Pemintaan ini kemudian ditanggapi positif oleh kemudian mengadakan pertemuan dengan para pemimpin ar negeri (Swedia) seperti Hasan Tiro dan Malik Mahmud sainsi Hasan sebagai pemimpin Gerakan Aceh Merdeka bermarkas di Malaysia.<sup>12</sup> Aksi pertama yang dilakukan membawa RI-GAM secara bersama-sama ke meja perundingan bulan Januari 2000 yang kemudian disusul dengan serangkaian pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak.<sup>13</sup>

## B. Sikap GAM

Meskipun tidak memiliki kepercayaan terhadap Indonesia, GAM segera menerima tawaran dialog menginternasionalisasi kasus Aceh dan mendapatkan simpati dari Amerika atau negara-negara Eropa. Mereka mau menekan Indonesia agar melepaskan harapan dialog ini dapat mengekspos seluruh kejahatan yang pernah dilakukan TNI terhadap warga Aceh. GAM menerima usulan dialog HDC karena memanfaatkan momentum yang tengah populer di Aceh setelah Timor Timur mendekakan diri dari Indonesia dengan cara referendum.

Meskipun gerakan referendum dipelopori oleh mahasiswa yang ada di perkotaan, tetapi pedalaman, isu ini sangat sukar dipisahkan sebagai hadap GAM karena bendera atau atribut GAM kerabat berbagai aksi tuntutan referendum.<sup>15</sup> Gusdur sendiri tidak akan keberatan jika referendum diadakan di Aceh.

Tetapi pernyataan Abdurrahman Wahid untuk referendum di Aceh tidak merepresentasikan pandangan politik. Bahkan ia mendapat tantangan serta kritik yang sangat mereka, mengabulkan tuntutan referendum pada Aceh.

<sup>10</sup> lebih jauh tentang profil HDC, lihat [www.hdcentre.org](http://www.hdcentre.org)

<sup>11</sup> Kompas, 16 Desember 2002

<sup>12</sup> Konrad Huber "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of M Implementation", *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center, 2000

<sup>13</sup> *ibid.*

melahirkan dengan yang sama oleh wilayah-wilayah lain.<sup>16</sup> Berkaca dari pahitnya kegagalan referendum di Timor Timur, isu referendum merupakan hal yang sangat sensitif. Militer menindak tegas siapapun yang menulis, menyebar, meneriakkan maupun mengkampanyekan referendum untuk Aceh. Kritikan keras yang diarahkan pada pernyataan Gusdur membuatnya kemudian menarik atau meralatnya.

Pada bulan Nopember 1999, Gusdur mengatakan kepada orang-orang Aceh yang mengunjunginya bahwa ia, secara pribadi tidak keberatan dengan referendum diman di dalamnya terdapat opsi kemerdekaan. Tapi ia kemudian melanjutkan bahwa ia tidak bisa mengabaikan opini yang berkembang di MPR maupun DPR serta TNI.<sup>17</sup> Dan pada akhirnya, dalam pertemuan dengan para ketua DPR, Presiden Aburrahman Wahid menyatakan tidak akan mentolerir gerakan pemisahan diri Aceh dari Indonesia.

GAM menolak keterlibatan aktor-aktor lain yang bermain di Aceh, seperti berbagai gerakan *civil society*, dalam proses dialog itu sebagai upaya untuk menunjukkan ke publik internasional bahwa GAM adalah satu-satunya representasi rakyat Aceh.<sup>18</sup> Penerimaan GAM terhadap dialog tersebut juga guna memperkuat otoritas pemimpin GAM di Swedia atas gerakan di Aceh baik di mata orang Aceh, Indonesia maupun masyarakat internasional, bukan pada kepemimpinan GAM di Malaysia.<sup>19</sup> Berbagai dialog tersebut membawa kedua belah pihak pada sebuah kesimpulan mengenai pentingnya peredaan ketegangan yang terjadi di antara mereka sebelum pembicaraan mengenai damai secara substantif dilakukan.<sup>20</sup>

### C. Proses Negosiasi

Proses terjadinya negosiasi sangat sulit karena juru bicara GAM berulang kali menyatakan bahwa tidak akan pernah terjadi penyelesaian kecuali kemerdekaan, sedangkan Pemerintah Indonesia juga berkali-kali mengultimatum bahwa negosiasi hendaknya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup> HDC percaya kendala keberadaan mereka sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara tuntas, fokus dialog yang diarahkan pada masalah

<sup>16</sup> Edward Aspinall and Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It Failed*, Policy Studies 1, East-West Center, Washington, 2003, p.2

<sup>17</sup> Edward Aspinall and Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It Failed*, Policy Studies 1, East-West Center, Washington, 2003, p.9

<sup>18</sup> Kompas, 16 Desember 2002

12. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan kepala kejaksaan tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh

Pengangkatan NAD  
Kepolisian RI dengan bernur (Pasal 21)  
Pengangkatan K  
Tinggi Propinsi Na  
Jaksa Agung deng  
bernur (Pasal 24 U

Sumber: Kompas, 16 September 2005

### 6. Amnesti dan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perdebatan yang muncul dalam persoalan ini adalah siapa anggota GAM mana saja yang mendapat amnesti? dan siapa anggota GAM mendapatkan amnesti? Dimana batasannya?

Menurut pemerintah, amnesti hanya akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam aktifitas politik saja. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan tindak pidana atau politik sangat kabur. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan pemerasan, perampokan atau pencurian. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan pemerasan, perampokan atau pencurian. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan pemerasan, perampokan atau pencurian. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan pemerasan, perampokan atau pencurian.

Ini terjadi ketika GAM melaporkan ada 91 anggota yang ditahan dan 1000 lainnya dilepaskan dari penjara dan diberi amnesti. Menurut pemerintah, amnesti mereka tidak dilepaskan karena vonis hukuman yang mereka terima. Amnesti kepada mereka adalah vonis pidana.

Jika GAM dapat Amnesti, bagaimana dengan anggota GAM yang baik TNI maupun Polri? Pengadilan HAM dan Komisi Rekonsiliasi (KKR) akan dibentuk di Aceh. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No.27/2004 Tentang KKR berarti aparat keamanan akan banyak yang terancam hukuman pelanggaran HAM berat di Aceh dan diberi hukuman. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan pemerasan, perampokan atau pencurian. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau di kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang GAM melakukan pemerasan, perampokan atau pencurian.

Menurut pemerintah, pengadilan HAM yang dibentuk tidak berlaku surut. lagi-lagi ini merupakan bentuk pelanggaran dan pemerintah harus kembali membuat undang-undang mengenai hal tersebut yang harus disusun dalam kanu

7. Pemerintah Indonesia dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan MoU akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh
8. Pemilihan lokal untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada April 2006
9. Sampai 2009, legislatif Aceh tidak berkewenangan mengesahkan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh
10. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan Bank Indonesia
11. Aceh berhak menguasai 70 persen dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh

hidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Propinsi NAD. Wali Naggroe dan Tuha Naggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Propinsi NAD (Pasal 10 UU No. 18/2001)

Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Partai politik harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat antara lain mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah propinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap propinsi bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 2 UU No. 31/2002)

Pemilihan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya sampai April 2005 diselenggarakan paling lambat Mei 2005 (Pasal 226 UU No.32/2004)

DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 42 UU No.32/2004)

Propinsi NAD dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan / atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya (Pasal 5 Ayat 2 UU No.18/2001) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Propinsi NAD harus mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi NAD dan pemerintah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku (Pasal 5 Ayat 4 UU No.18/2001)

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus berupa tambahan penerimaan dari hasil sumber daya alam di wilayah Propinsi NAD setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55 persen untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40 persen untuk pertambangan gas sela-

mampu membangun rasa saling percaya kedua belah pihak dan membawa mereka pada berbagai kemungkinan terbukanya perdamaian.22 Ini kemudian sangat didukung oleh PBB dan Uni Eropa.4

disinilah letak kesalahan fatal perundingan tersebut dilakukan tanpa menyelesaikan atau menyentuh masalah yang sebenarnya menjadi persoalan kedua belah pihak, Aceh, merdeka atau tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan pertama ketika negosiasi dilakukan adalah ketiadaan para pemimpin GAM. Hasan Tiro dan pemimpin GAM lainnya bermukim di Swedia selama hampir dua tahun. Para pejuang GAM tinggal di Aceh. Perbedaan kepentingan dan pertimbangan mengenai apakah GAM memiliki tingginya struktur organisasi yang tinggi atau tidak. Sebab meskipun pemimpin militer GAM memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpinnya di Stockholom, ada keraguan para pemimpin GAM mampu mengontrol sayap-sayap militernya di lapangan. Hal ini menjadi konflik di Aceh, banyak terjadi tindakan kriminalitas yang dinamakan GAM demi keuntungan pribadi, atau tidak peduli dengan keselamatan masyarakat.23

Setelah Hassan Wirajuda bertemu Hasan Tiro pada 10 Januari dan Presiden Abdurrahman Wahid menemui Hassan Tiro pada tanggal 30 Januari 2000, HDC memfasilitasi berbagai dialog antara pemerintah dan GAM. Dialog berlangsung pada tanggal 24 Maret dan 14-17 April 2000.25 Konkritnya adalah 2000 ditandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh.26 Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Swiss, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, wakil GAM, Zaini Abdullah.26 Langkah ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau gerbang menuju penyelesaian konflik Aceh yang sebenarnya. Di tingkat lapangan, kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan pembentukan organisasi untuk mendukung proses perdamaian seperti pembentukan Komite Bersama untuk Aceh (KBAK).27 Bagi masyarakat internasional, kesepakatan

22 Kompas,, 16 Desember 2002  
 23 Kompas,, 16 Desember 2002  
 24 Kompas,, 16 Desember 2002  
 25 Kompas,, 16 Desember 2002

ditilai sebuah langkah maju menuju perdamaian Aceh yang diwujudkan oleh berbagai pernyataan dan aliran bantuan dana internasional. Tetapi di dalam negeri, Pemerintah justru menuai kritik karena kesepakatan tersebut dianggap sebagai pengakuan resmi terhadap eksistensi GAM.<sup>28</sup>

Berikutnya, pada tanggal 5 Agustus 2000, kembali melalui prakarsa HDC, perwakilan GAM dan Indonesia melakukan pertemuan di Geneva, Swiss untuk membicarakan hasil yang dicapai selama 2 bulan terakhir setelah penandatanganan nota kesepahaman Jeda Kemanusiaan untuk Aceh. Pada fase ini, kedua belah pihak memutuskan untuk memperpanjang Jeda Kemanusiaan di Aceh hingga kemudian berakhir pada tanggal 15 Januari 2001.<sup>29</sup>

Walaupun Jeda Kemanusiaan telah ditandatangani dan diperpanjang masanya, kontak senjata antara aparat keamanan (biasanya Brimob) dengan GAM kerap terjadi di lapangan.<sup>30</sup> Salah satu contohnya adalah terbunuhnya Tengku Al Kamal, salah seorang wakil GAM dalam komite monitoring untuk keamanan pada 30 Maret 2001 oleh aparat keamanan.<sup>31</sup> Dengan alasan melakukan patroli keamanan rutin, aparat keamanan memasuki wilayah-wilayah yang selama ini dikenal di bawah kontrol GAM. Bagi GAM, tindakan aparat tersebut merupakan provokasi yang disengaja untuk memancing bentrokan senjata. Dalam konteks itu, baik GAM maupun aparat keamanan menafsirkan tindakan militer mereka sebagai aksi mempertahankan diri atas serangan musuh. Kemudian pada awal 2001, terjadi sebuah peristiwa serangan terhadap perusahaan gas Exxon Mobile. TNI menuduh GAM merupakan pihak yang bertanggungjawab atas serangan tersebut, sementara GAM menolaknya.<sup>32</sup> Tingkat kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat keamanan, GAM, maupun “pihak ketiga” yang bertujuan mengail keuntungan pribadi terus meningkat dengan jumlah korban yang juga tidak sedikit.

Secara paradox, dibalik terjadinya berbagai aksi kekerasan tersebut, proses dialog terus dilanjutkan seperti pertemuan yang terjadi tanggal 1-10 Januari 2001. Pertemuan ini membahas isu-isu substansial untuk mencari formula abadi dan solusi komprehensive

<sup>28</sup> *Jakarta Post*, 18 Januari 2000

<sup>29</sup> Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation”, *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center, 2004, hlm.23

<sup>30</sup> Edward Aspinall and Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It Failed*, *Policy Studies* 1, East-West Center, Washington, 2003, hlm.18-19

**Tabel 4.**  
**Beberapa Materi Penting dalam Undang-Undang Penyertaan**  
**Pemerintahan Aceh<sup>61</sup>**

No	Ketentuan dalam MoU	Perbandingan
1.	Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia	Pemerintahan daerah akan mengurus pemerintahan jadi kewenangannya pemerintahan yang urusan pemerintahan yang nmerintah meliputi pertahanan, keaman ter dan fiskal nasional 10 UU No. 32/2004)
2.	Peretujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh	DPRD mempunyai wenang antara lain dapat dan pertimbangan daerah terhadap perjanjian internasional berikan persetujuan kerja sama internasional oleh pemerintah 42 UU No. 32/2004)
3.	Keputusan DPR yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh	DPR mempunyai tugas membuat undang-undang has dengan persetujuan bersan No. 22/2003)
4.	Kebijakan administrasi yang diambil Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh	
5.	Aceh memiliki hak menggunakan simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan himne	Propinsi NAD dapat bang daerah, yang suk alam atau panj mencerminkan kekekhususan Propin daerah bukan meru aulatan dan tidak bagai bendera ked NAD (Pasal 7 UU N
6.	Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dengan selanjutnya	Wali Nanggroe dan lah lembaga yang bagi pelaksanaan

Spangyol, Truki dan Skotlandia. Tujuannya, selain mengurangi mengenai kasus Aceh. Ada empat hal yang dibahas dan kekerasan, juga untuk lebih memudahkan dalam mengontrol gerakan ini; hak asasi dan hukum kemanusiaan, pembangunan mereka. Memang tidak ada jaminan partai politik tersebut dapat meningkatkan rasa keamanan, dan proses demokrasi.<sup>33</sup> meredam kekerasan yang ada tetapi dapat lebih memudahkan. Berikutnya, tanggal 18 Maret 2001, Pemerintah memerintah yang bersangkutan untuk memberikan sanksi atau huku-GAM menyepakati satu zona aman (*peace zone*) di Aceh man seperti yang terjadi di Spanyol dimana partai *Batasuna*, salah sa-Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen.<sup>34</sup> Pada tahun 2001, partai lokal kelompok garis keras separatisme Basque yaitu Tanah kekerasan di Aceh semakin meningkat seiring dengan Air untuk Basque atau *Euskadi Ta Azkatasuna (ETA)*, dibubarkan oleh tekanan politik domestik terhadap Presiden Abdurrahman pemerintah karena terbukti hanya bertindak sebagai kaki tangan ETA yang membuatnya mengabaikan permasalahan Aceh. Hal ini saja. Ini bisa diadopsi oleh pemerintah dimana partai bentukan GAM kabinetnya pun mengisyaratkan dihentikannya proses dialog dapat dibubarkan apabila melanggar konstitusi. Malik Mahmud damai. Pada tahun ini jugalah Gusdur mengeluarkan kebijakan sendiri menjamin partai lokal milik GAM tidak akan memiliki program-program yang isinya memerintahkan TNI untuk melakukan program merdeka karena dalam MoU dinyatakan Aceh tetap di bawah pengawasan kekuatan dan pasukannya dalam memelihara NKRI.<sup>60</sup> Dengan demikian, apabila ternyata partai lokal tersebut ontakan di Aceh.<sup>35</sup> Indikasi ini semakin menguatkan keinginan melakukan tindakan atau memiliki program yang dapat mengancam keamanan di Aceh untuk melakukan berbagai aksi militan kedaulatan dan bertujuan memisahkan dari NKRI, maka partai jak awal memang tidak menyetujui proses dialog tersebut dapat dibubarkan oleh pemerintah

Naiknya Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden melahirkan harapan bagi dilanjutkannya dialog. Reto sewaktu menjadi Wakil Presiden cenderung lebih dekat jenderal daripada kepada presidennya sendiri, Abdurrahman Tetapi ini tidaklah berarti segala proses dialog menuju terhenti. Tidaklah mungkin bagi pemerintah atau menghentikan proses dialog begitu saja karena hal yang mengundang kecaman masyarakat internasional yang mendukung proses dialog.

Dialog berikutnya kemudian dilaksanakan pada Pebruari 2002 di Swiss. Kedua belah pihak, baik Pemerintah sia maupun GAM secara formal mengatakan adanya yang cukup positif dari dialog-dialog interaktif dan pengertian yang terjadi selama ini. Berikutnya, pada tanggal 9-11 Mei 2002 pihak GAM menerima undang-undang khusus Nangroe Aceh Darussalam yang sebelumnya oleh Presiden Megawati tanggal 9 Agustus 2001. Undang-undang khusus Aceh ini dirancang sejak saat pemerintahan Habib parlemen pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan gani menjadi menjadi sebuah keputusan hukum oleh

---

<sup>33</sup> Konrad Huber "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of Implementation", *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center, 2001.

wati. Mengatakan bahwa undang-undang otonomi ini merupakan pintu masuk bagi perdamaian di Aceh.

#### D. Cessation of Hostility Agreement (CoHA)

Puncak dari rangkaian dialog tersebut terjadi pada tanggal 8 dan 9 Desember 2002. GAM, yang dipimpin oleh Zaini Abdullah dan akan mampu memperjuangkan secara maksimal aspirasi Hasan Tiro, dan Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, kedua-duanya paham betul kebutuhan masyarakat lokal.<sup>57</sup> Pertemuan bertema untuk membicarakan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostility Agreement* (CoHA). Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 oleh Zaini Abdullah, sebagai wakil GAM, dan Wirjono Sastrohandoyo, wakil dari pihak Pemerintah Indonesia.<sup>36</sup>

CoHA terdiri dari sembilan pasal.<sup>37</sup> Pasal pertama berisi tujuan penghentian permusuhan dan segala aksi kekerasan yang terdiri dari tiga poin; Melanjutkan fase berikutnya dari proses perdamaian; telah disetujui di Swiss 10 Mei 2002; Melanjutkan proses penenggalan rasa saling percaya (*confidence building*), dan; Menjamin proses damai untuk melanjutkan fase berikutnya seperti pemberian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal kedua berisi komitmen kedua belah pihak untuk menghentikan segala aksi kekerasan. Kedua belah pihak menjamin bahwa mereka mengontrol penuh TNI/Polri dan GAM di lapangan. Kedua belah pihak, setelah penandatanganan kesepakatan ini, menginstruksikan untuk menghentikan permusuhan secepatnya. Selama periode *confidence building*, masing-masing pihak setuju untuk tidak akan meningkatkan kekuatan militer mereka, termasuk pemindahan (*redeployment*) kekuatan, meningkatkan personel atau peralatan militer ke Aceh.

Pasal ketiga menerangkan fungsi Komite Keamanan Bersama / KKB atau JSC yang terdiri dari: Memformulasikan proses implementasi kesepakatan, Memonitor situasi keamanan di Aceh, Melakukan investigasi secara penuh terhadap kekerasan keamanan, Memperbaiki situasi keamanan dan memberikan sanksi, Meyakinkan tidak adanya kekuatan paramiliter baru, dan Mendesain dan mengimplementasikan proses demiliterisasi.

Setelah zona damai diidentifikasi dan dua bulan setelah penandatanganan kesepakatan ini, GAM akan meletakkan senjata dalam tempat yang ditentukan secara bertahap. JSC juga akan mengusulkan relokasi secara bertahap kekuatan TNI yang akan mereformu-

didasarkan pada kebutuhan mengkomodir keinginan GAM aja. Ka-lasi mandat mereka dari kekuatan menyerang menja-  
laupun keran partai lokal dibuka, harus diperjelas dulu konsepnya fensif. Komposisi JSC adalah pejabat-pejabat senior ya-  
dan harus pula dimuat dalam sebuah undang-undang. bagi wakil Pemerintah dan GAM dan seorang pihak

Bagi yang mendukung keberadaan partai politik lokal, partai setuju kedua belah pihak.  
lokal justru positif untuk semakin mempercepat demokratisasi di In- Pasal keempat berkaitan dengan penetapan zo-  
donesia. Karenanya keberadaannya tidak perlu ditakutkan. Todung JSC sesegera mungkin mengidentifikasi dan menyiapk-  
Mulya Lubis memberikan gambaran dimana dalam kenyataan saat ini, konflik menjadi zona-zona damai. Untuk dua bulan p-  
banyak partai nasional yang berjuang mendapatkan kursi di DPR, belah pihak akan memindahkan posisi-posisi bertaha-  
tetapi hanya mampu meraih kursi DPRD. Apa bedanya dengan partai disetujui. Daerah-daerah demiliterisasi itu meliputi s-  
lokal? Ia memberikan contoh *Green Party* di Jerman yang memiliki tempat-tempat umum dan kesehatan, bazar, *me-*  
pengaruh bcukup signifikan dalam politik nasional, semula adalah warung, pusat telekomunikasi termasuk terminal bus,  
partai lokal.<sup>55</sup> Wacana pembentukan partai politik lokal sebenarnya jalan, transportasi sungai dan tempat mencari ikan.  
merupakan tamparan bagi partai politik yang ada karena ketid- Pasal kelima, kerangka waktu. Kedua belah pil-  
akpekaan mereka dalam memperjuangkan aspirasi lokal. Dalam wak- bahwa permusuhan dan aksi kekerasan selama tiga bu-  
tu singkat memang tidak mudah menghadirkan partai politik lokal di jak JSC dan tim monitoring operasional terbentuk ada  
Republik ini. namun kehadirannya akan melahirkan sesuatu hal yang sial dan sebagai indikator keseriusan komitmen ked-  
positif bagi sistem politik ke depan, bukan hanya untuk Aceh, tetapi Pasal keenam berisi ketentuan dialog yang melibatk-  
juga untuk Indonesia secara keseluruhan, terutama untuk kemajuan (*all inclusive dialogue*). Pasal ketujuh mengenai inform-  
daerah. nikasi. Pasal kedelapan menerangkan Dewan Bersama

Pembentukan partai politik di Aceh adalah upaya mengubah Dewan bersama ini dibentuk terdiri atas wakil  
konflik yang semula bersifat fisik, destruktif dan karenanya Pemerintah dan GAM dan pihak ketiga (HDC) yang  
destruktif, berubah menjadi konflik yang sifatnya ide, konstruktif dan nyelesaikan segala isu atau sengketa yang timbul dar-  
karenanya menjadi positif. Daniel Sparringa melihat kesepakatan perjanjian ini. Pasal kesembilan tentang amandemen, o-  
partai lokal adalah alternatif yang paling murah untuk memberi jalan katan hanya dapat diamandemen dengan persetujuan  
politik bagi GAM melakukan reintegrasi pada negara nasional. Untuk pihak dalam dewan bersama.  
mengakomodasi partai politik lokal di Aceh, pemerintah hanya perlu Sesuai kesepakatan, CoHA itu akan segera dit-  
melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tentang lapangan dengan membentuk Komite Keamanan Bersa-  
Otonomi Khusus NAD terkait dengan keberadaan partai politik lokal *Security Committee / JSC* sebagai instrumen untuk n-  
di propinsi tersebut. Amandemen tidak perlu dilakukan terhadap Un-pakatan tersebut. Anggota-anggota KKB terdiri dari  
dang-Undang nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik karena yang tidak hanya melibatkan Indonesia, GAM dan H-  
partai lokal hanya dikhususkan di Aceh saja sehingga tidak berlaku pihak-pihak lain yang dianggap netral dari sejumlah r-  
bagi wilayah lain karena sifatnya yang *lex specialis*. Partai lokal be-KKB dipimpin oleh Mayjen Tanongsuk Tuvinun dar-  
lum tentu relevan dengan daerah lain karena masalah di daerah lain Brigjen Lomodag Nagamura sebagai wakilnya dari Filip-  
masih punya peluang untuk dikanalisasi melalui pemerintahan dae- Pelaksanaan CoHA terdiri dari beberapa fase.  
raha, DPD atau partai nasional. Jika GAM tidak mempunyai basis yang adalah membangun rasa saling percaya diri me-  
kuat, maka partai lokal akan dengan sendirinya mati. Partai lokal ini rangkaian dialog. Fase kedua, demiliterisasi. Setia-  
merupakan jalan keluar paling masuk akal sekaligus untuk membuk- Pemerintah Indonesia melalui TNI dan GAM diminta-  
tikan basis GAM karena dengan mengusulkan partai lokal, sebetulnya menarik pasukan dan meletakkan senjata. Fase terakh-  
GAM sedang mengambil resiko.<sup>56</sup> berian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan reko-  
warga Aceh.

Walaupun ada kesepakatan damai, konflik senjata antara apa-eksis karena tidak adanya dukungan serta kebijakan rat keamanan dan GAM tetap terjadi. Kendati demikian, situasi di tah saat itu yang menyederhanakan partai.<sup>50</sup> Aceh pasca penandatanganan CoHA realtif lebih tenang dibandingkan Tetapi, menurut Liddle, kondisi Indonesia saat sebelumnya. Dengan ditandatangani CoHA, pembunuhan terhadap beda dengan Indonesia tahun 1955. Pada tahun 1960-warga sipil turun drastis. Berdasarkan laporan HDC, selama dua bu-tidak perlu ditakutkan karena bukanlah sesuatu h lan pasca kesepakatan, jumlah rata-rata korban yang tewas di pihakmengancam integrasi. Tetapi saat ini, kondisinya suda sipil menurun menjadi 12 dibanding sebelumnya yang mencapai 87 dan ada alasan besar bagi para politisi Indonesia un orang per bulan. Hanya 9 anggota GAM yang tewas dibanding 102 perSaat ini, lanjut Liddle, ada banyak variabel yang p bulan dan 4 anggota aparat keamanan dibanding 45 orang per bulan bangkan sehingga menjadikan partai lokal sebagai se sebelum adanya kesepakatan.<sup>38</sup> Variabel tersebut bersumber dari desentralisasi keku

Tetapi pihak TNI terlihat mencoba mengalihkan konflik sedang menjadi kebijakan negara. Desentralisasi se vertikal menjadi konflik horisontal antara Aceh dengan pendatang dalam jangka waktu panjang adalah sesuatu yang jauh dari Jawa. Peralihan konflik menjadi horisontal dimaksudkan sebagai menguntungkan bagi warga negara. Tetapi dalam jng timbulnya image masyarakat internasional bahwa konflik di Aceh lagi kebijakan tersebut dilahirkan dari sebuah per adalah persoalan internal negara yang tidak berhak dicampuri oleh yang terpaksa dalam sebuah negara yang terdiri dari negara lain kecuali dinilai dapat mengganggu stabilitas regional. ogenitas dan berbagai ketimpangan sosial ekonomi se

Sayangnya, walaupun kedua belah pihak berhasil melahirkan bilan politik, maka desentralisasi dapat melahirkan ko berbagai kesepakatan penting, mereka tidak pernah berhasil Dalam konteks desentralisasi yang tidak mata menemukan titik kompromi mengenai isu fundamental mengenai keberadaan partai lokal dapat menjadi sebuah ancam apakah Aceh tetap bagian integral dari NKRI atau menjadi merdeka. abel primordialitas, kedaerahan dan para petualan Para pemimpin Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritas dominan bermain. Karena itu, menurut Liddle, kebera wilayah dan sebaliknya, mencegah disintegrasi. Sedangkan pemimpinkal di Aceh adalah sebuah resiko besar karena Aceh GAM bersikukuh mengenai hak untuk memerdekakan diri. Ini yang yang sangat sensitif dengan berbagai variabel tersebu menjadikan proses damai gagal. yak kasus, *self determination* sangat berkaitan dengan

Sebagai respon atas timbulnya berbagai insiden atau ben- dalam negeri sebuah negara yang tengah mengalami d trokan bersenjata di lapangan, CoHA menugaskan JSC untuk Apabila ternyata kelak partai GAM menang mutlak, k melakukan investigasi atas berbagai pelanggaran yang terjadi selama akan dimanfaatkan untuk mengkampanyekan kembal kesepakatan dibuat. JSC membentuk tim monitoring *tripartite* (anghalus dan tidak transparan) ke masyarakat intern terdiri dari Indonesia, GAM dan pengawas internasional. Hasil inves-rakyat Aceh benar-benar ingin merdeka. Jika ini terja tigas tersebut menyebutkan bahwa GAM bersalah atas dua insiden. isahan Aceh hanya tinggal menunggu waktu dan akan Satu di Lokop, Aceh Timur, pada tanggal 14 Januari yang penyebab- mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat intern kan seorang TNI tewas dan beberapa terluka, satu lagi di Lamno, Senada dengan Liddle adalah Riswandha Imawa Aceh Barat, yang juga menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan keberadaan partai politik yang berbasiskan etnis di A beberapa terluka. JSC juga mengkritik aparat keamanan yang sebuah langkah mundur. Parpol di Indonesia dimundu melakukan intimidasi terhadap wakil GAM yang duduk menjadi ang- ke belakang.<sup>54</sup> Menurutnya, partai politik sebagai s gota JSC saat melakukan observasi konflik antara aparat Brimob seharusnya tidak diskriminatif dan non primordia dengan demonstran di Bireuen pada tanggal 14 Januari.<sup>39</sup> Wacana keberadaan partai politik lokal tidak bole

Pada bulan Februari, JSC meluncurkan laporan hasil investi- gasinya. Indonesia dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus kekerasan dimana dua kasus dikategorikan "sangat serius" dan satu

<sup>50</sup> Kompas, 21 Juli 2005

<sup>51</sup> Tempo, 14 Agustus 2005



Di antara partai politik merupakan item yang paling kontroversial. Ban-kasus kekerasan “sangat serius”. Laporan ini menin-yak pihak yang menentang karena beranggapan partai politik ada-baik dari Indonesia, terutama TNI, maupun dari GAM. lah taktik GAM untuk memformalkan perjuangan Aceh merdeka. Par-tai lokal sangat dianggap krusial karena akan mengubah format per-juangan yang semula informal menjadi legal formal, dimana tuntutan Aceh merdeka bukan tuntutan orang-orang “pinggiran” tetapi sudah menjadi tuntutan yang diakui oleh undang-undang. Selain itu, pem-bentukan partai politik lokal akan memiliki efek domino bagi daerah lain yang juga akan menuntut hal yang sama. Jika ini terjadi, maka menurut Liddle, ini akan sangat membahayakan keutuhan negara ka-rena kondisi Indonesia saat ini sama sekali belum siap untuk mengijinkan kembali bangkitnya partai-partai lokal.

#### F. Upaya Penggagalan CoHA

Effendy Choirie melihat partai lokal berbahaya.<sup>49</sup> Pandangan-nya didasarkan pada pengalaman tuntutan partai politik lokal di Papua yang kemudian diakomodir dalam undang-undang otonomi khusus Papua nomor 21 Tahun 2001 tetapi kemudian “dimandulkan” oleh pasal atau ayat berikutnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Otono-mi Khusus Papua menyebutkan “Penduduk Propinsi Papua dapat membentuk partai politik. Namun ayat (2) dari pasal 28 tersebut membuat persyaratan yang tidak memungkinkan partai lokal eksis: “Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsetaan dalam pem-ilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Walau-pun tidak disebutkan secara eksplisit undang-undang yang dimaksud, maksudnya tentulah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik yang mensyaratkan seluruh partai harus berskala nasional, berada di sebagian Propinsi Indonesia dan lain sebagainya.

Dalam sejarah partai politik di Indonesia, partai politik lokal pernah ada pada era Orde Lama yang kemudian berlanjut pada awal Orde Baru. Pada pemilu 1955, ada empat kelompok yang bermain da-lam pentas politik memperebutkan suara rakyat; partai politik besar, partai menengah, partai kecil namun memiliki skup nasional dan par-tai kecil yang memiliki skup kedaerahan, termasuk kelompok indivi-du, yang mengandalkan pada primordial kedaerahan dan sentimen lokal. Namun partai-partai lokal tersebut tidak mampu mendominasi perolehan suara di daerahnya dan kalah oleh partai berskala nasio-nal. Dari sekian banyak partai lokal, hanya satu partai yang mampu mendudukan wakilnya di DPR, yakni Partai Persatuan Daya. Pada pemilu selanjutnya, tahun 1971 dan setelahnya, partai lokal tidak lagi

CoHA yang semula diharapkan menjadi titik aw-araan damai selanjutnya di Aceh pada akhirnya gag-implementasi. Setiap pihak, baik itu GAM maupun Pe-nesia menuduh lawannya telah melakukan berbag-kesepakatan. Terjadi banyak insiden baik itu ditujuk-GAM, maupun KKB sendiri. Bahkan kemudian se-diserang dan dihancurkan oleh massa yang melakuka-Pihak TNI menuduh GAM terlibat di balik berbagai-terjadi, sebaliknya, GAM menuduh segala kekacauan in-adalah rekayasa Pemerintah, khususnya TNI. Demonstrasi pertama terjadi di Takengon tang-bagai aksi protes atas tindakan GAM yang telah me-pedangang kopi.<sup>40</sup> Sekitar seratus demonstran, dipimp-as Adijan, melakukan serangan terhadap tiga anggotataranya wakil GAM) yang mengakibatkan mereka ha-rumah sakit dan membakar tiga kendaraan. Protes ir-tanggunggi oleh para milisi bentukan militer karena ter-transmigran Jawa yang sama sekali tidak mendapatk-rintangan apapun dari aparat keamanan meskipun p-mengkontak aparat keamanan untuk meminta perlin-tidak seorang polisipun datang ke lokasi.

Satu minggu kemudian, tanggal 10 Maret, selam-turut-turut, sekitar dua ratusan demonstran berkumpu-Langsa, Aceh Timur, yang juga memprotes tindakan p-dilakukan oleh GAM.<sup>41</sup> Demonstran menuntut dibubar-bila tidak mampu memberikan jaminan keselamatan-penculikan. Menurut pihak GAM, kejadian itu dipic-pertengkaran pribadi yang berkaitan dengan persoal-orang Aceh dan Jawa. Karena tidak berhasil menunjuk-kemudian menangkapnya dan berjanji akan dilepaskan-janji meminta maaf pada masyarakat dan menarik-pemerasan yang dialaminya. Para demonstran jug-tuntutan mereka agar JSC di Aceh Timur dibubarkan-TNI untuk dikirim kesana. <sup>42</sup>

Kemudian, pada tanggal 17 Maret, beberapa demonstran menghadap kepada Aceh dalam melakukan hubungan luar negeri mengaku dari Tangse yang diklasifikasikan sebagai *peace zone*, guasaan sumber daya alam.<sup>48</sup> Anhar mungkin kurang melakukan protes di kantor JSC Sigli, Pidie, yang menuntut hal yang membaca MoU tersebut karena hubungan luar negeri sama, yaitu dibubarkannya JSC di Pidie jika tidak mampu melakukan rupakan kewenangan pemerintah pusat. tindakan atas pemerasaan yang dilakukan oleh GAM dan meminta agar Klausul tentang penyelenggaraan pemerintah y TNI ditempatkan kembali di wilayah tersebut.<sup>43</sup> Demonstrasi serupakan kontroversi adalah poin: muncul di Meulaboh, Aceh Barat dan Tapaktuan, Aceh Selatan tanggal 1.1.2. (b): “Persetujuan-persetujuan internasional yang 6 April.<sup>44</sup> Sebanyak tiga puluh truk membawa para demonstran ke oleh Pemerintah Indonesia yang terkantor JSC Langsa dan membakarnya. Khawatir atas keselamatan para ikhwal kepentingan khusus Aceh akan b anggotanya yang terdiri dari 144 tenaga sukarelawan, pada tanggal konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh 8 April JSC memutuskan untuk meninggalkan kantor-kantornya 1.1.2. (c): “Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan R Indonesia yang terkait dengan Aceh akan 1.1.2. (d): “Kebijakan-kebijakan administrasi yang diambil b gannya konsultasi dan persetujuan legislatif A menuju Banda Aceh.<sup>45</sup> Beberapa insiden tersebut menunjukkan bahwa gannya konsultasi dan persetujuan legislatif A untuk aparat keamanan, terutama TNI, tidak memiliki keinginan terjadinya proses damai di Aceh. Insiden itu kemudian dijadikan alasan 1.1.2. (d): “Kebijakan-kebijakan administrasi yang diambil b gannya konsultasi dan persetujuan legislatif A bagi TNI bahwa CoHA telah gagal dalam memainkan peran damai di nesi berkaitan dengan Aceh akan dilaksan sultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Ace Aceh.

Rasa saling percaya yang mulai terbangun melalui dialog interaktif kemudian mulai menyusut. Berbagai upaya dialog baik yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia maupun GAM banyak menemui kendala dan kegagalan. Kendati demikian, berbagai upaya dialog tetap dilakukan oleh HDC untuk kembali menciptakan rasa saling percaya dan perdamaian di Aceh.

Pemerintah selanjutnya mengagendakan pada tanggal 25 April di Jakarta. Tetapi GAM menolak jakarta dan meminta untuk dilaksanakan di tempat netral, Genewa, yang kemudian disepakati. GAM membuat simbol-simbol sendiri yang statusnya sejajar atau kemudian menunda pertemuan sampai tanggal 27 April. Pemerintah kemudian menunjukkan sikap marahnya. Berdasarkan hasil rapat kabinet, Susilo Bambang Yudoyono, pada tanggal 28 April, mengemukakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan akhir pada undang nomor 18 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi pihak GAM. GAM kemudian mengusulkan diadakannya pertemuan dengan Wali Nanggroe merupakan simbol adat dan tanggal 12 Mei di Genewa.<sup>46</sup>

Atas berbagai kejadian di lapangan, GAM kemudian melaporkan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan Pemerintah RI. Menurut GAM, mulai dari ditandatanganinya CoHA (9 Desember 2002) sampai 27 April 2003, Pemerintah Indonesia (TNI) melakukan 1.289 pelanggaran. Pelanggaran paling banyak adalah pemerasan posisi wali nanggroe berada di atas gubernur, atau pungutan liar yang mencapai 410 kasus, penyisiran atau operasi penuh dan bukan sekedar simbol adat. 1.1.5.: “Aceh memiliki hak menggunakan simbol wilayah, ter lambang dan himne”. Poin ini mengundang perdebatan karena seolah-olah Masalah Wali Nanggroe bisa menjadi persoalan bukan lembaga politik atau pemerintahan. Sementara

## 5. Partai lokal

desain politik, ekonomi dan militer di masa mendatang.<sup>46</sup>

Dalam konteks Aceh, banyak para pejuang GAM yang melarikan diri ke Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina, termasuk ke Swedia dari pihak Pemerintah Indonesia, Komisaris Besar dan Libya. Di negara terakhir inilah mereka mendapat pelatihan khu-berdasarkan laporan terakhir yang dimiliki KKB sam- sus kemiliteran. Di berbagai negara pengasingan tersebut mereka te-Maret 2003, terdapat 1.191 kasus pelanggaran yang tap melakukan perjuangan dengan cara koordinasi kebijakan, mensu-oleh TNI maupun GAM, dimana, menurut Ramdja, plai bekal atau biaya serta terlibat dalam penyulundupan senjata. Ini pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh GAM.<sup>47</sup> menunjukkan bahwa konflik Aceh akan menjadi permasalahan inter- nasional kendati tidak ada perundingan Helsinki yang melibatkan ne- minan keselamatan terhadap anggota tim KKB dan HD KKB dan HDC pada tanggal 15 Mei 2003 akhirnya men- gara-negara Eropa dan ASEAN.

Pelibatan ASEAN harusnya dilihat sebagai institusi regional KKB dan HDC pada tanggal 15 Mei 2003 akhirnya men- antara negara di wilayah Asia Tenggara dimana Indonesia merupakan keamanan, merupakan wujud kemarahan rakyat Aceh salah satu anggotanya. Pelibatan Uni Eropa karena ASEAN memiliki dan ketidakpuasan mereka atas perjanjian yang telah konsep kerjasama *ASEAN Community Security* dengan beberapa nega- baliknya, GAM dan para pengamat melihat demonstras- ra, diantaranya Uni Eropa

#### 4. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah

Dalam MoU terdapat klausul *governing of Aceh*. Kalimat terse- menginstruksikan aparat keamanan untuk menya- but menimbulkan polemik yang cukup ramai karena dimaknai sebagai langkah operasi keamanan. Pada saat yang sama, p- *self government*. Wiryono, salah seorang mantan juru runding RI-GAM meminta JSC untuk melakukan dialog dengan GAM. yang diprakarsai HDC, dalam sebuah diskusi mengenai “Revitalisasi kemudiam muncul kembali ketika disepakati diadakan Aceh: Memperkenalkan Prespektif Baru” yang diselenggarakan di Ja- bersama pada tanggal 17 dan 18 Mei 2003 di Tokyo di- karta oleh “Reform Institute” 24 Pebruari 2005 mengatakan, *self gov-* lah pihak tidak saling bertemu muka dalam sebuah r- *ernment* berarti *self determination, independence* atau kemerdekaan. Ketegangan tidak saja muncul pada saat dialog dilaku- Harusnya, lanjut Wiryono, isi pembicaraan difokuskan pada gencatan berapa hari sebelumnya dimana para wakil GAM (Mul- senjata dan reafirmasi UU otonomi Khusus NAD. Pada pengalaman Lampoh Awe, Kamaruzzaman, Ibrahim Tiba, Amni bin- Australia, negara ini pernah menggunakan istilah *self government* ki) ditahan oleh kepolisian Indonesia di bandara saat- kepada Pemerintah Inggris yang kemudian berubah menjadi negara berangkat ke Tokyo untuk melakukan perundingan. Pa- persemakmuran, *common-wealth*, yang siap memisahkan diri dari but kemudian dilepas setelah GAM mengancam akan r- Inggris. Wiryono khawatir strategi itu ditiru dan diterapkan oleh temuan jika mereka tetap ditahan. Aceh, apalagi salah satu penasehat utama GAM sendiri berasal dari Australia yaitu Daniel Kingsbury.<sup>47</sup>

Menurut pemerintah, *governing of Aceh* bukanlah cikal bakal kemerdekaan, melainkan gubernur dan legislatif Aceh. Kontroversi semantik atau terminologi *self government* atau *government of Aceh* memang mereda. Tetapi pembicaraan substansinya tetap ramai diperdebatkan karena isinya dinilai jauh melampaui kewenangan pe- merintah lokal. Anhar, anggota DPR dari Aceh menilai isi MoU keba- blasan, terutama dengan memberi kewenangan yang sangat luas

“Jadi, yang terjadi di Tokyo pada waktu itu ada menyatakan kpd pihak internasional kami har- berunding dengan 2 syarat ; pertama, lepaskan runding GAM yang pada waktu itu ditangkap di Ban- Kedua, semua pasukan TNI/Polri non organic yan- Aceh agar segera ditarik. Tanpa 2 syarat itu dipenu- tidak mau berunding”.<sup>49</sup>

Kedua belah pihak bernegosiasi tidak secara langsung bertatap muka melainkan melalui perantara HDC. Dalam draftnya, GAM pihak-pihak tertentu untuk menjadikan Aceh sebagai mengajukan penguatan kembali kesepakatan CoHA, dimana GAM akan salahan internasional atau internasionalisasi konflik ini mengendurkan kekuatan perjuangan bersenjataanya dengan syarat seperti pelibatan tim pemantau dari ASEAN dan Uni pemerintah juga melakukan hal yang sama, berpartisipasi aktif alam uensi dari internasionalisasi permasalahan internal proses politik seperti yang diinginkan CoHA, dan, dalam konteks Co-bolehkannya berbagai macam organisasi internasional HA, akan mengendurkan tuntutan kemerdekaan. Konsekuensinya, maupun bukan, untuk masuk dan terlibat langsung GAM akan meletakkan senjata dan berhenti melakukan penambahan Aceh. Jika itu terjadi, maka kontrol dan kedaulatan pe senjata atau amunisi. berkurang sementara GAM posisinya akan semakin

Tuntutan Pemerintah Indonesia pada pembicaraan di Tokyo memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan propa adalah: Menghentikan segala tindakan yang mengarah pada Ke-han diri. Dalam praktek hubungan internasional saat ini, merdeka Aceh; Menerima status Otonomi Khusus dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, dan; Meletakkan senjata. kasus konflik internal yang mengakibatkan jatuhnya Pemerintah menekankan bahwa penolakan terhadap tuntutan terse-jiwa benar-benar menjadi kasus domestik. Konflik but berarti justifikasi bagi dilaksanakannya aksi militer dan ter-memiliki dimensi internasional baik karena salah satu hentinya proses damai.<sup>50</sup> duanya mengundang organisasi internasional maupun

Tuntutan tersebut tentu saja ditolak oleh GAM. Menurut nur tetangga yang berada di sekitar area konflik biasanya Djuli, anggota perunding GAM, Indonesia terperangkap dengan tuntu-korban pasif karena harus menanggung berbagai b tan mereka sendiri yang tidak mau beranjak dari kesepakatan damai seperti aliran arus pengungsi yang masuk ke wilayah yang didasarkan pada status otonomi Aceh. "Padahal pada kesepaka- arus pengungsi ini berdampak pada stabilitas keama tan sebelumnya, otonomi hanya starting point. Kita start disitu masaksosial dan politik *host states* (negara penerima pengtujuan yang hendak dituju juga kesitu)".<sup>51</sup> Dalam mensikapi tuntutan keamanan regional juga akan meningkat karena ada tersebut, Malik Mahmud, salah satu pemimpin GAM mengatakan senjata dan suplai bantuan bagi salah satu pihak yang "Pemerintah Indonesia bermaksud melanjutkan perang di Aceh", dan yang masuk melalui garis perbatasan. Apalagi jika ia menambahkan "Kami akan bertempur. Kami siap menghadapinya. pengungsi tersebut terdapat para *refugee warriors* ya Kami telah berperang selama 27 tahun".<sup>52</sup> kamp pengungsian sebagai basis perlawanan terhadap

Setelah melalui pembahasan yang ketat, upaya dialog untuk Menurut Brown, meskipun negara-negara tetan menyelesaikan konflik Aceh secara damai praktis berhenti pada tang- regional kerap menjadi korban pasif sebagai tempat l gal 18 Mei 2003 saat GAM menolak menerima draft pernyataanlah dari area konflik negara lainnya, tidak jarang nega pemerintah Indonesia dan tidak bersedia mengajukan *counter draft*libat aktif dalam kontribusi eskalasi konflik dan insta nya. Respon Pemerintah Indonesia terhadap penolakan GAM sangat melalui intervensi opor-tunistiknya.<sup>44</sup> Konflik intern cepat dan tegas. Dalam hitungan jam, Presiden Megawati Sukarno- menimbulkan masalah kemanusiaan, politik dan milita putri menandatangani Darurat Militer di Aceh yang berarti dilegal- negara lain. Hal ini karena setiap negara mengalami i kannya tindakan kekerasan untuk menghadapi GAM dan kekuasaan dan memiliki pengaruh terhadap instabilitas politik.<sup>45</sup> berada di bawah kendali militer seluruhnya. ga dapat memanfaatkan konflik yang ada untuk melaku

Kecepatan Pemerintah dalam merespon penolakan GAM dan secara langsung maupun tidak dengan beragam a mendeklarasikan Darurat Militer karena Pemerintah dan TNI, khu- kemanusiaan, menjaga keamanan dan perdamaian intusunya, telah mempersiapkan hal tersebut jauh-jauh hari sebe-tervensi defensif yang bertujuan menyelamatkan kepo nal; intervensi protektif, untuk melindungi sekelompo

Padahal di tubuh GAM terdapat faksionalisasi sehinggalah sebelumnya, karena tidak ada kesem memunculkan keraguan benarkah keputusan Hasan Tiro akan me-rencanakan jauh sebelumnya, karena tidak ada kesem lahirkan kepatuhan di tingkat lapangan? Mendamaikan para pem-runding Indonesia untuk mengkomunikasikan apa yanimpin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit adalah men-kyo kepada Pemerintah disana, sementara disana se damaikan para pengikutnya. Tidak ada jaminan kesepakatan elit ter-untuk menggagalkan sudah berjalan, kata M. Nur Djuli. sebut akan dipatuhi pasukannya di lapangan. Ketika saat para pem- Status darurat militer ini efektif berlaku mulaiimpin politik berjabatan tangan menyepakati perjanjian damai, mili-2003 sampai jangka waktu 6 bulan yang kemudian a ter masing-masing pihak di tingkat lapangan tetap saling membunuh pelaksanaannya. Panglima TNI, Jenderal Endriart baik karena alasan ketidak tahuan maupun ketidak setujuannya. 35.000 TNI ke Aceh<sup>54</sup> atas nama "Operasi Pemulih

Keraguan ini ditepis oleh juru bicara GAM, Bachtiar, yang dengan tujuan "menghancurkan kekuatan GAM sa mengatakan bahwa tidak ada faksi dalam tubuh GAM. Semua anggota akarnya".<sup>55</sup> GAM tunduk pada keputusan pimpinannya. MoU akan mampu Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, CoH mengikat semua anggota GAM baik yang berada di dalam negeri mau-baik dan peran HDC terhenti. Pada tahap inilah ker pun luar negeri.<sup>43</sup> Tetapi Bachtiar lupa memperhitungkan Husainilah gagal menjalankan perannya sebagai fasilitator Hassan, salah satu sempalan minoritas. Meskipun ia hanya minoritas, Aceh. di lapangan, banyak kelompok minoritas lain yang tidak lagi sepaham dengan perjuangan Hasan Tiro.

Hasan Tiro dan para pemimpin GAM lainnya bermukim di Swedia selama hampir dua dekade, sementara para pejuang GAM pang mendamaikan pihak-pihak berkonflik dengan pe tinggal di Aceh. Perbedaan ini menjadi pertimbangan mengenai mengakar dan telah berlangsung puluhan tahun dalam apakah GAM memiliki tingkat koherensi struktur organisasi yang walau itu juga bukan sesuatu hal yang mustahil. Ber tinggi atau tidak. Sebab meskipun para pemimpin militer GAM emi- tersebut pada awalnya telah diterobos oleh HDC der liki loyalitas tinggi terhadap para pemimpinnya di Stockhlo, ada ke- imbulkan rasa saling percaya melalui berbagai dialog, raguan para pemimpin di Swedia mampu mengontrol sayap-sayap mi- mediasi konflik internal, tahap yang paling sulit buka- liternya di lapangan. Selama terjadi konflik di Aceh, banyak terjadi kesepakatan bersama, tetapi di tingkat implementasi. tindakan kriminal yang mengatasnamakan GAM demi keuntungan Berikut ini adalah beberapa analisis mengenai pribadi, atau tidak adanya kepastian apakah sebuah aksiden dila- dalam mengimplementasikan kesepakatan damai dala- kukan oleh GAM, TNI, Polisi, milisi atau kelompok-kelompok lainnya. 1. **Belum terciptanya kondisi ripe for resolution** Selain itu, antara Tiro dan orang-orang GAM di lapangan banyak me- **stalemate** miliki perbedaan visi tentang hendak dibawa kemana jika Aceh ber- Dalam pandangan Zartman,<sup>56</sup> ada beberapa l- hasil merdeka. Tiro menginginkan negara sekuler, sementara sebagi- diharapkan keberhasilan mediasi atau negosiasi- an orang di lapangan menginginkan negara Islam. internal. Diantaranya adalah, situasi atau konteks y- memungkinkan untuk dilakukannya mediasi atau

### 3. Internasionalisasi Aceh

Berbagai kalangan, terutama DPR, khawatir kasus Aceh yang seharusnya menjadi permasalahan domestik berubah menjadi isu internasional dengan adanya perundingan Helsinki. Kehadiran tim monitoring dari ASEAN dan Uni Eropa dianggap internasionalisasi Aceh. Menghadirkan kembali perundingan dengan GAM dengan melib- atkan institusi Institusi asing adalah internasionalisasi Aceh.

<sup>53</sup> Wawancara dengan M. Nur Djuli

<sup>54</sup> Konrad Huber "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of N

point untuk mengajak seluruh pihak bertikai duduk di meja pe-Inggris dalam berdialog dengan kelompok yang menuntut rundungan. Untuk kasus Aceh, kondisi *hurting stalemate* atau landia utara, IRA. Perundingan dilakukan secara sangat raha situasi *ripe for resolution* itu belum terjadi. Masing-masing pihak belah pihak sadar akan keberadaan kelompok radikal yang bersikeras dengan posisinya dan siap untuk melakukan pepe-pakat dengan berbagai negosiasi. Perundingan dibuka ketika rangan kapan saja. Pihak-pihak yang terlibat konflik di Aceh tetaplah dibuat. Strategi ini juga diterapkan dalam workshop *pro* percaya pada kekuatannya masing-masing untuk dapat mencapai *interactive problem solving* antara para pejabat formal dan in tujuannya yaitu mengeliminasi lawan dan menjadikan aceh Palestina sehingga melahirkan kesepakatan Oslo yang mer merdeka (untuk GAM) atau tetap bagian dari NKRI (bagi TNI). dan Gaza bagi Palestina. Sesuatu yang sebelumnya tidak pern

Kendati inisiasi proses perdamaian dimulai dari Pemerintah Indonesia, beberapa kelompok yang memiliki **2. Bargaining GAM** kekuatan dan pengaruh signifikan, seperti TNI dan anggota par- Pasca kegagalan CoHA, banyak pihak yang pes lemen justru ambivalen atau tetap memperlihatkan sikap ber-gan damai akan terulang lagi. Masa peredaan ketega musuhan sementara GAM tidak pernah sedikitpun meredupkan dimanfaatkan GAM sebagai masa untuk melakukan ke semangat merdeka. atau *regroup* untuk memperkuat diri. Perjanjian itu ju,

Di pihak GAM, penerimaan atas inisiatif proses damai me- anggap hanya akal-akalan GAM untuk menaikkan citra lalui dialog diselimuti berbagai maksud lain. GAM yakin tidak bisa ternasional dan mempropagandakan berbagai peristiwa mengalahkan TNI. Proses damai hanyalah strategi agar GAM tetap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh. survive. GAM yakin akan terjadi disintegrasi di Indonesia seperti Karena itu, ketika perundingan Helsinki dipra halnya di Soviet. GAM mencoba memanfaatkan perubahan dalam ini adalah upaya GAM untuk kembali memperkuat pos sistem politik Indonesia pasca kejatuhan Soeharto dan isu refer-muncul. Pada periode tersebut, posisi dan kekuatan C endum yang baru saja mengakibatkan Timor Timur lepas merdeka sangat lemah akibat digelarnya darurat militer dan da dari Indonesia. Bagi GAM, kesepakatan damai antara Indonesia ambah dengan bencana tsunami yang membuat mereka dengan GAM bukanlah hal penting, melainkan GAM hanya membu-menerima atau mengambil suplai bantuan dari pendud tuhkan upaya-upaya agar dirinya tetap *survive* hingga saat disin- Perundingan Helsinki diduga sebagai takti tegrasi itu tiba. Proses damai akan menjadikannya aman dari tin-menaikkan bargaining GAM dalam politik lokal atau na dakan militer Indonesia. Pembicaraan damai hanya merupakan mata internasional. Aceh bukanlah sebuah area konflik upaya GAM untuk melakukan konsolidasi organisasi.<sup>57</sup> dihuni oleh dua kekuatan besar; GAM dan Pemerintah

Para pemimpin GAM tidak yakin pemerintah Indonesia mauisasi atau kelompok sipil lain di luar dua kekuatan memberikan persetujuan kemerdekaan Aceh melalui negosiasi. turut memainkan peran penting dalam situasi lokal. Bagi GAM, proses negosiasi adalah masa penting dimana posisi hanya GAM yang dilibatkan? Mengapa tidak melibatkan mereka diakui eksistensinya, perhatian internasional menjadi be-lam masyarakat Aceh? Apakah GAM yang hanya beran sar serta moment baginya untuk melakukan konsolidasi dan per-orang dianggap representasi resmi Aceh secara luasan basis GAM.<sup>58</sup> Bagaimana dengan masyarakat lain yang tidak sejalan

Masing-masing pihak juga saling menyalahkan mengenai Seperti halnya dialog damai yang difasilitasi berbagai insiden yang erjadi di lapangan dan kerap memaknai apa mang menolak keterlibatan aktor-aktor lain yang be yang dilakukan pihak lawan sebagai upaya provokasi atau seperti berbagai gerakan *civil society*, dalam proses ditafsirkan negatif yang membuat kecurigaan timbul. Inilah salah upaya untuk menunjukkan ke publik internasional bah satu alasan mengapa kemudian Stedman sangat meragukan proses satu-satunya representasi rakyat Aceh. Penerimaan dialog tersebut juga guna memperkuat otoritas pen Swedia atas gerakan di Aceh baik di mata orang A

DPR menganggap pemerintah telah menyalahi prosedur perjanjian internasional. Kegusaran DPR bertambah ketika pemerintah tidak bersedia membuka materi yang sedang dibahas dengan alasan telah adanya kesepakatan untuk tidak mempublikasikannya sebelum MoU ditandatangani. Perundingan itu kemudian dinilai terlalu tertutup, sangat rahasia dan eksklusif padahal eksekusi dari perjanjian itu bersifat nasional dimana DPR pada akhirnya mau tidak mau akan terlibat. DPR kemudian meminta agar Mahkamah Konstitusi segera turun tangan membatalkan MoU karena prosedur dan materinya banyak bertentangan dengan UUD 1945 dan bahkan tidak menyebut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi.

Sebaliknya, pemerintah menyatakan perundingan dengan GAM tidak perlu meminta persetujuan DPR karena itu bukanlah sebuah perundingan perjanjian internasional melainkan sebuah dialog informal antara “ayah dan anak”. Perundingan itu adalah perundingan domestik yang bersifat internal sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR.

Menurut Hamid, perundingan yang dilakukan pemerintah dengan GAM adalah pertemuan informal. Hal yang akan menonjol dalam pertemuan itu adalah persamaan persepsi tentang agenda yang dibicarakan, bukan persetujuan atau *agreement*.<sup>41</sup> Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan, memperkuat argumen Hamid dalam forum dengan pendapat dengan DPR bahwa apa yang berlangsung di Helsinki merupakan *informal contact* karena tidak dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Keberadaan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS, hanya sebatas penyelia saja. Perundingan tersebut merupakan prakarsa Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menugaskan Hamid Awaluddin, sebagai Menteri Hukum dan HAM, sebagai utusan pribadi, bukan penugasan pemerintah. Namun demikian, Juwono menganggap aktifitas tersebut masih valid dalam rangka teater politik yang namanya kepedulian internasional terhadap Aceh.<sup>42</sup>

Dalam kenyataannya, perundingan “informal” tersebut memang tidaklah murni informal. Kesan yang ada justru sangat formal dan rahasia. Seharusnya, pemerintah menerapkan strategi kerahasiaan bukan pada materinya saja, tetapi juga pada prosesnya. Ini karena tidak semua pihak yang terlibat dalam kasus Aceh menginginkan perdamaian. *Secrecy* atau kerahasiaan ini penting untuk mencegah terjadinya penolakan atau mobilisasi penentangan terhadap jalan damai yang dilakukan oleh kelompok radikal masing-masing kelompok. *Secrecy* dilakukan untuk mengantisipasi dilakukannya berbagai manuver oleh berbagai pihak yang tidak menginginkan terjadinya perdamaian serta pemboikotan atau bahkan pembunuhan terhadap para pelaku perundingan. Strategi *secrecy* inilah yang pernah dilakukan oleh pemerintah

implementasi damai dalam sebuah konflik. Menurutnya, selama masa implementasi damai, pihak-pihak yang berseteru selalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menentang tujuan damai, melainkan melakukan resume, dan menunggu momen yang tepat dalam melakukan aksi. Oleh karena itu, pada saat kondisi stabil tercapai, para pelaku konflik harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin muncul dari situasi tersebut. Masa *cease fire* harus menolong warga sipil. Tapi jika masa itu digunakan untuk mempersiapkan tiap pasukan untuk melakukan *re-group*, maka konflik akan menjadi semakin berkepanjangan. Kondisi atau alasan tersebut selalu dikedepankan TNI untuk menolak perundingan. Hal ini menuduh masa jeda kemanusiaan dimanfaatkan GAM untuk mengkonsolidasi dan memobilisasi diri. Sebaliknya, GAM memanfaatkan situasi tersebut untuk menargetkan pasukan-pasukannya di Aceh guna memerangi GAM<sup>60</sup>

Secara lebih halus, Wagner<sup>61</sup> mengatakan bahwa perang sipil adalah bukannya kompromi yang menimbulkan kesulitan dalam menemukan cara memaksakan sebuah kesepakatan. Dan meskipun pihak-pihak yang ada mau melakukan kompromi atas tujuan-tujuan politiknya, ketakutan mereka untuk mencegah terjadinya untuk melakukan membuat sebuah kesepakatan kompromi tersebut.

Etzioni mencoba membela apa yang telah dilakukan pemerintah dalam mediasi lakukan. Menurutnya, kegagalan mediasi tersebut disebabkan kegagalan di pihak mediator, melainkan lebih karena ketidakpercayaan para kelompok yang bertikai.<sup>62</sup> Ini karena dalam damai yang internal, menurut Rasmussen, negara atau pihak yang terlibat dalam perang biasanya jarang bersikap rasional, bahkan mereka yang ingin mencegah konflik perlu dilanjutkan karena merupakan bagian yang efektif untuk meraih tujuan.<sup>63</sup> Setiap pihak selalu berusaha memaksakan kemenangan walau resiko yang dihadapi dalam peperangan itu sangat tinggi, yaitu lahirnya tragedi kemanusiaan jaman terhadap kemanusiaan. Ini karena dalam konflik

<sup>59</sup> Stephen J. Stedman, op.cit, hlm.364-365

<sup>60</sup> Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of Mediation Implementation”, *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center, 2001

sukar untuk menemukan kepentingan yang objektif dan yang asli, kemudian menjadi formal dan menggunakan untuk dapat dinegosiasikan.<sup>64</sup> merintah. Fraksi-fraksi lain terbelah sikapnya. Secara reka mendukung namun secara individu banyak yang

## 2. Tidak menyentuh akar persoalan utama tentang status Aceh

Proses damai yang diprakarsai HDC gagal karena kedua belah pihak gagal menyepakati isu mendasar tentang status Aceh; apakah merdeka atau tetap merupakan bagian integral NKRI.

Pada saat Hasan di Tiro mendirikan GAM dan mulai melakukan perlawanan, situasi konflik di Aceh mengalami melakui masalah yang harus diinventarisir dan dipertanyapatan jauh dari faktor agama atau ketimpangan ekonomipada agenda politik.<sup>65</sup> Ini yang membedakan GAM-nya Hasan dengan DI/TII-nya Daud Beureueh. Jika platform pemberontakan dengan DI/TII berupaya melindungi dan membangun entitas kultur Islam di Aceh, GAM justru melakukan ekstrim atas sejarah integrasi nasional Aceh ke Republik Indonesia. Jika DI/TII masih berbicara dalam konteks Indonesia, GAM melesat jauh dengan cita-cita negara "Aceh-Sumatera".<sup>66</sup>

GAM bukan sekedar gerakan oposisi bersenjata terhadap pemerintah pusat, tapi juga menghidupkan kembali "negara tua (*old state*)" Aceh yang pernah bergabung dengan Indonesia. Menurut Lukman Thaib, kan hukum internasional, negara Aceh Sumatera tetap diakuisistensinya sebagai sebuah entitas sejarah yang legal yang tidak pernah hilang kedaulatannya karena diserang oleh asing; Belanda, Jepang dan Indonesia.<sup>67</sup> Berdasarkan itu, menurut Thaib, kemerdekaan Aceh sah secara hukum internasional, sekedar untuk mendirikan negara Islam seperti yang diberitakan oleh media. Islam atau tidaknya Indonesia tidak akan

Dalam kasus partai politik lokal misalnya, yang semula menentang keberadaan partai lokal karena sejalan dengan konsep NKRI karena dapat membuka p

seperti Fraksi TNI/Polri, tidak menjadikan item sebagai masalah yang harus diinventarisir dan dipertanyapada agenda politik.<sup>65</sup> Ini yang membedakan GAM-nya Hasan dengan DI/TII-nya Daud Beureueh. Jika platform pemberontakan dengan DI/TII berupaya melindungi dan membangun entitas kultur Islam di Aceh, GAM justru melakukan ekstrim atas sejarah integrasi nasional Aceh ke Republik Indonesia. Jika DI/TII masih berbicara dalam konteks Indonesia, GAM melesat jauh dengan cita-cita negara "Aceh-Sumatera".<sup>66</sup>

Laksono semula berinisiatif memanggil pemerintah k

Berikut adalah perdebatan seputar perunding

---

<sup>64</sup> Joseph R. Rudolph, Jr. "Intervention in Communal Conflicts", *Orbis*, Vol.39, No.2, (Spring 1995), hlm.261

<sup>65</sup> Samantha F. Ravich. "Eyeing Indonesia Through the Lens of Aceh", *The Washington Quarterly*, Vol.23, No.3, Summer 2000, hlm.12

<sup>66</sup> Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh; Sebuah Sketsa sosiologi Politik*, Buku 1, Jakarta, LSP, 200, hal.ix; baca juga tulisannya Lukman Thaib, "Aceh's Case: Possible Solution to a Fastening Conflict", *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol.20, No.1, (2000); Lukman Thaib, "National Integration of Indonesia: Aceh's Experience. A Concerned View from the Region", *Internationales Asienforum*, Vol.32, No.1-2, (2001); Lukman Thaib, *Aceh's Case: A Historical Study of the National Movement for the Inde-*

## 1. Metode dan Prosedur yang tidak Transparan

Pihak yang paling keras menyuarakan kritik ini adalah Mereka menganggap apa yang tengah dilakukan pemerintah tanpa meminta persetujuan DPR ter karena harus dihentikan. Sikap DPR ini didasarkan pada 11 ayat (1): "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain"

Terlebih-lebih beberapa kesepakatan dalam MoU ter dengan peraturan perundang-undang yang berlaku atau beberapa undang-undang harus diamandemen seperti UU Otonomi Daerah, UU No. 18/2001 Tentang Otonomi Khusus, UU No. 31/2002 tentang Partai Politik. Berbagai ketentuan dalam dampak pada penyesuaian dan amandemen terhadap beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan partai politik, otonomi khusus dan sistem pemerintahan di Aceh. Dalam UUD 1945 pasal 11 ayat (2) disebutkan: "Presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat langsung bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban k



meminta agar Wakil Presiden Yusuf Kalla tidak mudah marah dengan kritik yang mereka berikan. Para purnawirawan tersebut dengan tegas menyatakan diri menolak nota kesepahaman karena dinilai membahayakan negara serta meminta agar Mahkamah Konstitusi, DPR, MPR serta DPD melakukan kajian mendalam terhadap seluruh isi materi MoU baik secara politis maupun yuridis. Para purnawirawan juga menyerukan kepada TNI, melalui Panglimanya, untuk bersikap tegas terhadap siapapun yang memanfaatkan perdamaian untuk menggoyahkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seruan tersebut sesungguhnya tak ubahnya sebagai seruan agar Panglima TNI dan seluruh prajurit TNI melakukan pembangkangan dan penolakan terhadap nota kesepahaman damai Helsinki dan sangat membahayakan sebab mengisyaratkan pemberontakan dan langkah mundur bagi profesionalitas tentara Indonesia. Untungnya, Pangdam Iskandar Muda Supiadin menyatakan sebagai tentara profesional, TNI patuh pada keputusan politik negara.

Yang menentang perjanjian bukan hanya dari pihak RI, tetapi juga dari GAM sendiri. Dr. Husaini Hassan, mengatakan GAM pimpinan Malik Mahmud telah tejobak dalam perangkap politik Indonesia dan keluar dari garis perjuangan GAM; Aceh Merdeka. Husaini adalah pimpinan Majelis Pemerintahan GAM, kelompok minoritas GAM yang memisahkan diri dari kepemimpinan Malik Mahmud, berkedudukan di Stockholm Swedia. Kritik ini terkesan aneh karena Husaini selama ini terkesan lebih moderat dibanding Malik.<sup>39</sup>

Disamping ada yang mengkritisi, ada juga yang mendukung. Yusuf Kalla memperlihatkan berbagai dukungan yang muncul dari dalam masyarakat Aceh terhadap perundingan damai dengan GAM berupa surat pernyataan dukungan dari berbagai bupati dan wali kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian ditimbuskan kepada DPR agar memberikan kesempatan kepada pemerintah dan GAM untuk melanjutkan perundingannya.<sup>40</sup> Sejumlah tokoh masyarakat Aceh dari Komite Bersama Aceh Baru yang terdiri dari unsur adat, akademisi dan tokoh perempuan Aceh meminta DPR, khususnya Komisi I untuk menghentikan perdebatan tentang Helsinki dan sebaliknya, mendukung kesepakatan damai tersebut.

Sikap DPR terhadap perundingan Helsinki sendiri terbelah. Hanya Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja yang tetap konsisten pada pendiriannya agar pemerintah menghentikan perundingan dengan GAM. Menurut mereka, kendati perundingan itu bersifat informal, tetapi pada pelaksanaan-

merdeka sejak ratusan tahun yang lalu.<sup>68</sup>

Dengan demikian, jelas latar belakang GAM dan lawanannya adalah membuat Aceh merdeka dan Pemerintah Indonesia yang kemudian mendapat perintah pusat melalui militer. Status Aceh, dalam hal ini merupakan hal fundamen dalam konflik. Sayangnya, CoHA Tidak menyinggung mengenai permasalahan yang mendasar yaitu status Aceh, apakah tetap bagian dari NKRI atau tidak. Konrad Huber menyebutnya dengan istilah *fragile barrier*. Richard Betts dan Leslie Gelb mengatakan, negosiasi akan dalam perang sipil karena adanya sumbu tarungan konflik yang tidak dapat dibagi "Siapa yang memimpin pemerintah?" Koalisi hanya mungkin apabila konflik tidak begitu fundamen.<sup>71</sup>

Di Aceh, permasalahan konflik telah begitu malar karena dari persoalan agama, sosial, ekonomi, sampai politik. Setiap akar permasalahan, meskipun kompleks, harus sendiri, pada tahap selanjutnya jalin menjalin masalah yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Kedua belah pihak secara tegas memosisikan dirinya masing-masing sebagai bagian integral Indonesia melihat Aceh sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan konsep gerakan yang bermaksud memecah atau memisahkan Aceh yang dianggap makar (pemberontakan). Di sisi lain, pihak GAM sendiri dirinya sebagai pemerintahan resmi dari negara yang kini tengah diduduki oleh Indonesia.

### 3. Tidak ada kohesivitas organisasi

Faktor lain yang membuat HDC dan CoHA gagal adalah adanya kohesi yang kuat antara pihak yang melaksanakannya. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan

<sup>68</sup> Lukman Thaib, *Acheh's Case: A Historical Study of the National Independence of Acheh-Sumatra*, Kula Lumpur, University of Malaya, hlm.296

<sup>69</sup> Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Alternative to the Helsinki Agreement?", *Policy Studies 20*, East-West Center, Washington, hlm.3-7

<sup>70</sup> Konrad Huber: "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of the Helsinki Agreement"

damai tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kelompok-kelompok internanya, terutama Indonesia, dimana TNI dengan te- Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendi MS. Simbolon dan gas menyatakan bahwa GAM adalah pemberontak dan pemberon- dan Hilman Rosyad dari Fraksi Partai Keadilan Sja tak harus ditumpas habis.<sup>72</sup> kecewa atas dilakukannya perundingan RI-GAM di

Tepat seperti apa yang dikatakan Stedman bahwa adanya mendesak pemerintah menghentikan perundingan t upaya damai dari kelompok-kelompok yang bertikai tidak selalu dianggap menguntungkan posisi GAM dan sebaliknya, diketahui atau diinginkan oleh semua anggotanya.<sup>73</sup> Mendamaikan keutuhan Indonesia. Seorang anggota DPR menemu para pemimpin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit ada- yang menjelaskan bahwa MoU tidak menghalangi cita- lah mendamaikan para pengikutnya. Karena itu, para analis berar- memerdekakan diri. Juga sebuah surat dari Juru Bicara gumen bahwa sebelum seluruh kesepakatan damai diimpelemen- Abdullah, kepada Hasan Tiro yang mengatakan bahwa tasikan, masyarakat internasional harus terlebih dahulu mengerti Helsinki adalah kemenangan terbesar GAM mengecoh keinginan para pengikut dari setiap kelompok. Kohesivitas organ- Tidak dapat dipastikan pernyataan dalam situs terse isasi yang tidak kuat membuat selalu ada sayap atau faksi yang nyataan GAM atau bukan dan apakah surat tersebut tidak setuju dan berada di luar komando untuk terus melakukan benar atau tidak adanya. Namun hal tersebut dapat m peperangan.<sup>74</sup> Menyepakati kesepakatan bukanlah sebuah jaminan ciptanya saling curiga diantara kedua belah pihak. valid bahwa pelakunya lebih memilih damai daripada perang.

Di Aceh, keengganan beberapa kelompok untuk melakukan kui eksistensi GAM secara yuridis sebagai pihak pembicaraan damai sangat kentara sekali dimana TNI dan bebera- kesejajaran status dengan Pemerintah Indonesia. Per pa anggota parlemen secara tegas menolak perundingan yang ter- terjadi seolah-olah antar dua pemerintahan. Menurut E jadi. Sejak semula, ketika Jeda Kemanusiaan untuk Aceh ditanda- penyelesaian Aceh harus dilakukan dengan operasi t tangani 12 Mei 2000, pihak TNI tidak pernah mendukung karena la perundingan harus dilakukan di dalam negeri. Pan menganggap jeda kemanusiaan akan memberikan kesempatan ini berlawanan dengan kebijakan ketika pemerintah terhadap GAM untuk melakukan konsolidasi organisasi.<sup>75</sup> Gus Dur yang nota bene dari PKB. Gus Dur lah justru

Dalam strategi penyelesaian kasus Aceh, sikap pemerintah pertama kali memprakarsai penyelesaian konflik Ace pusat terbagi dua; *hawks* dan *doves*. *Hawks* merupakan strategi dengan melibatkan Henry Dunant Centre sebagai pi keras yang lebih mendahulukan penyelesaian senjata dan pen- dilaksanakan di luar negeri. dekatan keamanan atau militer sebagai instrumen penyelesaian Bukan hanya kalangan anggota DPR yang mengi utama. Sebaliknya, kaum *dovish* cenderung lebih suka menolak perundingan Helsinki. Masyarakat awam yang t mengedepankan cara-cara damai, seperti dialog dan negosiasi, se- hasiswa dan elemen rakyat juga menentanginya. Lebih bagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik. Pendekatan yang tergabung dalam Komando Bela Tanah Air (KOM yang digunakan adalah pendekatan psikologis, memenangkan hati men mahasiswa berunjuk rasa menolak perundingan H dan pikiran.<sup>76</sup> dingan adalah sebuah tindakan bodoh karena menur

Sikap menolak pembicaraan proses damai tidak hanya di- war pemerintah, takut Aceh akan jadi Timor Timur tunjukkan oleh TNI dan Polri, tetapi juga oleh mayoritas anggota membakar foto para delegasi dan menuntut agar peru parlemen dari fraksi PDIP, Golkar dan TNI/Polri yang mencapai tikan. Bagi mereka, tidak ada kata damai dengan kau perti GAM.

Setelah MoU telah ditandatangani, giliran para TNI/Polri yang mengkritik kesepakatan MoU. Mereka kesepakatan itu adalah sebuah kekeliruan. Namun me meminta agar sikap kritis tersebut tidak dimaknai seb

---

<sup>72</sup> Konrad Huber: "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation", East-West Center, Washington, hlm.31

<sup>73</sup> Stephen J. Stedman, op.cit, hlm.364-365

Banyak pihak terkejut dan kecewa dengan materi dalam MoU tersebut karena dianggap terlalu banyak menguntungkan GAM dan sebaliknya, mengorbankan Indonesia secara keseluruhan karena biaya yang harus dibayar terlalu mahal. Sejumlah politikus, mantan pejabat sipil dan TNI dan bahkan mantan presiden mengkritik dan menolak MoU.

Kritik muncul tidak hanya ketika MoU telah disepakati dan ditandatangani, tetapi ketika proses perundingan tengah berlangsung mulai dari lokasi diselenggarakannya perundingan, siapa yang diajak berunding maupun substansi pembicaraan.

### E. Kontroversi dan tantangan

Kecuali para pialang konflik dan kelompok yang mengambil keuntungan dari darah yang mengalir di Aceh, semua pihak menginginkan konflik di Aceh selesai. Masalahnya adalah bagaimana konflik itu harus diselesaikan? Strategi pendekatan keamanan yang diterapkan selama tiga puluh tahun terbukti tidak mampu membuat GAM habis dan tuntutan kemerdekaan hilang. Jalan damai kemudian coba dilakukan Gus Dur, tetapi juga gagal dengan dikeluarkannya kebijakan darurat militer dan sipil oleh presiden berikutnya, Megawati. Namun demikian, GAM dan ide kemerdekaan tetap muncul. Dijajakilah kemudian pembicaraan damai jilid dua dengan GAM, yaitu perundingan Helsinki.

Belum teruji apakah damai jilid dua ini akan efektif atau tidak, kritik tentangnya telah bermunculan dari kalangan rakyat biasa, akademisi dan intelektual, politisi sipil, militer dan unsur masyarakat lainnya. Ada beberapa kesulitan dan kritikan terhadap MoU Helsinki, mulai dari proses dialog sampai dengan materinya. Dari proses dialog, mereka yang kontra mengkritik kebijakan tersebut mulai dianggap tertutup dan terkesan sangat eksklusif. Materi-materi yang dikandung juga dinilai *kebablasan* dan banyak melanggar undang-undang yang berlaku, seperti masalah kewenangan untuk membentuk partai tunggal dan penentuan suku bunga tersendiri yang berbeda dengan bank sentral, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkesan terlalu memberi ruang gerak yang terlalu bebas bagi GAM. Kesepakatan itu dianggap telah melampaui undang-undang otonomi khusus bahkan jauh lebih radikal dibanding sistem negara federal sekalipun. Beberapa pihak, baik TNI maupun kelompok sipil di parlemen maupun non parlemen banyak yang menolak kesepakatan tersebut karena khawatir Aceh bernasib sama dengan Timor Timur; lepas

lebih dari 60% kursi dari total kursi di parlemen proses damai hanya akan memberikan kesempatan untuk memperkuat perlawanannya. Mereka rupanya mengenal konsep "memenangkan hati dan pikiran".

Proses pembicaraan damai agaknya hanya syarat bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada domestik dan dunia internasional bahwa pemerintah bersedia mengambil jalan damai dalam menyelesaikan GAM, tetapi GAM sendiri yang menolaknya. Ini dapat mengapa dalam negosiasi terakhir tersebut, tuntutan Indonesia lebih tegas ketimbang sebelumnya. Yudoyono sendiri, yang terlibat banyak dan me pemerintah dalam proses negosiasi, nota bene adalah liter dan mendapat tekanan banyak dari para kole yang tidak sabar melakukan aksi di Aceh.<sup>78</sup>

Di sisi lain, ada pandangan TNI sebenarnya menginginkan penyelesaian damai di Aceh. Perwir ter bersikap sangat waspada terhadap setiap pem Aceh yang tidak menghasilkan kekalahan total AGA ter GAM) dan tunduknya GAM. Banyak yang percaya esi apapun kepada pemberontak, termasuk otonom tif, dapat menjadi langkah pertama ke arah merend renanya, TNI lebih suka melanjutkan peperangan sa menyepakati konsesi yang pada akhirnya menghas dipandanginya sebagai kekalahan.<sup>79</sup> Menurut TNI, hanya dapat tercapai apabila kekuatan GAM telah Bagi TNI, tidak ada metode penyelesaian dengan C jata.

Membandingkan proses negosiasi Timor Aceh, Wakil KASAD Letnan Jenderal Kiki Syahnan bahwa keberhasilan Xanana adalah membawa konflik ke diplomasi, dari hutan ke kota.<sup>80</sup> Karena itu, men gosiasi dengan GAM berarti Pemerintah telah mem patan emas kepada GAM untuk memenangkan tuju mata kepala kita sendiri. Kiki menjelaskan bahwa asi tersebut, pemerintah telah memberikan kesemp gat besar kepada GAM untuk berinteraksi deng

<sup>77</sup> Edward Aspinall and Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: W Studies 1*, East-West Center, Washington, 2003, p.3

secara lebih bebas karena mereka tidak lagi takut terhadap tekanan TNI.

**Tabel 3.**  
**Poin-Poin Realisasi Damai**

**4. Tidak ada lembaga *monitoring* yang kredibel**

Kurangnya keterlibatan dan perhatian internasional pada saat kesepakatan akan diimplementasikan juga memiliki andil dalam kegagalan proses damai. Kepedulian itu bisa dalam bentuk janji para donatur yang akan memberikan bantuan saat negosiasi dilakukan namun tidak pernah dilakukan saat tahap implementasi tiba,<sup>81</sup> tetapi bisa juga dalam bentuk keterlibatan internasional secara langsung sebagai lembaga *monitoring*.<sup>82</sup> HDC memang membentuk lembaga *monitoring*, tetapi kurang berjalan efektif karena hanya beranggotakan dua pihak yang berseteru dan HDC sebagai pihak ketiga. Dalam posisi seperti itu, masing-masing pihak dapat saja melakukan veto atas permasalahan, laporan atau investigasi pihak lain tanpa pihak ketiga mampu memutuskan apapun. Lembaga *monitoring* yang dibentuk HDC tidak berjalan efektif karena tiadanya saling kepercayaan diantara mereka.<sup>83</sup>

**5. Adanya kepentingan ekonomi di balik konflik**

Berlarutnya konflik di Aceh membawa keuntungan-keuntungan bagi TNI, seperti ekonomi dan politik. Kepentingan politik di TNI berkaitan dengan perannya yang terus menurun di pentas perpolitikan nasional sejak 1998. Kekacauan di Aceh akan memberikan justifikasi bagi TNI untuk tetap bertahan memainkan perannya dalam konsep pertahanan negara, minimal melegalkan kehadiran mereka untuk menduduki kursi kekuasaan sipil di Aceh.<sup>84</sup>

Dari segi ekonomi, TNI memperoleh keuntungan dengan mempekerjakan mantan perwira militer untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan usaha yang didukung militer memperoleh kemudahan kontrak karena kehadiran angkatan darat tersebut serta kebiasaannya untuk melindungi kegiatan usaha itu dan kekuatan pengincar lainnya. Kekayaan yang dimiliki Aceh mampu memenuhi kebutuhan TNI baik secara individu maupun organisasi. Secara organisasi, anggaran pemerintah mengenai per-

Komitmen Perdamaian		Upaya Realisasi
Hubungan Pemerintah NAD	Rehabilitasi hak-hak sipil dan politik anggota GAM	Dirumuskan dalam Undang-Peraturan Perundang-undangan Melalui pendirian partai revisi UU No. 18/2001 Khusus NAD
Ekonomi		- Aceh dilakukan dengan membuka - Pembagian keuntungan Aceh) dan 30% (untuk
Hak Asasi Manusia		Dibentuk pengadilan HAM
Amnesti		benaran dan Rekonsiliasi Dilakukan setelah 15 Agustus
Reintegrasi		G. Diberikan jatah hid pertanian dan uang anggota GAM H. Dibentuk Komisi B saian Klaim I. Gencatan senjata J. Penarikan/penghanc GAM K. Penarikan satuan no L. Dilaksanakan secara September – 31 Desember
Pengaturan keamanan		Dibentuk Misi Monitoring perwakilan negara-negara ASEAN
Pengawasan di lapangan		
Penyelesaian Konflik MoU		M. Diselesaikan oleh Ke N. Jika tahap pertama diselesaikan oleh dengan melibatkan setiap pihak O. Apabila tahap ke selesai, diambil kep sifat final dan men Dewan Direktur CMI

<sup>81</sup> Stephen J. Stedman, op.cit, hlm. hlm.368-369

<sup>82</sup> J. Lewis Rasmussen, op.cit, hlm.39-40

<sup>83</sup> Konrad Huber, "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

akhir atau poin keenam adalah penyelesaian apabila terjadi konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini.

tahanan hanya menyediakan 30% dari total anggaran TNI. Sisanya, sebanyak 70%, harus dicari sendiri. Berbagai industri gas alam dan minyak di Aceh memanfaatkan kekurangan anggaran militer tersebut.

Apabila proses damai terjadi, maka praktis itu akan merugikan lagi di Aceh. Itu berarti mereka akan kehilangan ekonomi penting. Kondisi keamanan yang tidak stabil memaksa berbagai perusahaan meminta TNI/Polri untuk perlindungan. Personel militer dan polisi juga banyak terlibat dalam berbagai bisnis ilegal seperti perlindungan terhadap ladang kayu atau *illegal logging* dan ladang ganja. Karena itu, level kepentingan untuk tetap melestarikan konflik ini akan semakin tinggi bahkan dengan tujuan memertahakan efikasi keberadaan mereka di Aceh.

Lembaga militer pada umumnya memperoleh keuntungan dari usaha-usaha yang dilindungi oleh tentara. Sesuai kontrak Bagi Produksi, Exxon Mobil di Lhokseumawe memberi bayaran kepada Pertamina untuk dukungan logistik bagi sekitar seribu pasukan keamanan yang bertugas melindungi ladang gas Arun. Rawannya komersialisasi Lhokseumawe serta industri dan komersial lainnya oleh pimpinan GAM mendorong para pengelolanya untuk meningkatkan pendapatan tambahan dengan membayar komandan satuan untuk menempatkan tentara guna menjaga usaha mereka. Oleh karena itu, ada kepentingan tentara untuk melanjutkan konflik ini dalam batas tertentu, di daerah-daerah tersebut. Banyak pasukan GAM disinyalir bukanlah GAM bentukan Himpunan GAM memiliki agenda politik mendirikan Aceh Merdeka. Banyak GAM hasil bentukan tentara. Tidak mustahil adanya konflik ini ditunjukkan ke sebuah perusahaan bukan berasal dari Aceh, bukan dari oknum militer atau dari GAM rekayasa tentara dimaksud meningkatkan jumlah "uang perlindungan".

Seperti diketahui, di seluruh Indonesia persentase perusahaan sangat kecil dan komandan TNI tidak memiliki kemampuan berdaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi militer mereka. Di wilayah konflik di mana kekerasan terjadi seperti di Aceh, militer sebagai lembaga maupun masyarakat orang-orang dapat aktif mencari dana secara maksimal. Aceh sebagai wilayah damai berarti menutup peluang bagi mereka memperoleh dana besar.

Pihak militer setuju dengan status otonomi khusus sebab akan menguntungkan posisinya dimana dengan status tersebut, pihak pemerintah daerah akan dipenuhi oleh banyaknya pendapatan daerah dan militer akan meraih bagian yang semakin besar sebagai kompensasi penjaga keamanan dibanding apa yang telah peroleh mereka saat ini.<sup>86</sup> Itulah sebabnya, mengapa aparat keamanan, baik itu polisi maupun TNI, sama sekali tidak memiliki antusiasme mengenai penyelesaian damai di Aceh karena dikhawatirkan akan mengurangi peran mereka yang berarti dimana dampaknya, pemasukkan akan semakin kecil. Wilayah yang damai berarti tidak membutuhkan adanya aparat keamanan.

Seharusnya HDC tidak hanya mengandalkan dukungan politisi sipil dan para pendukung negosiasi yang kenyataannya sangat minoritas, etapi juga melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kelompok garis keras, terutama TNI. Tidak adanya komunikasi HDC dengan para pemimpin di TNI menjadi salah satu sebab mengapa TNI dan kelompok garis keras tidak mendukung proses damai tersebut<sup>87</sup>



**Pemberian Amnesti**

**Pengumpulan Senjata GAM dan Penarikan TNI/Polri Non-Organik**

**Pemerintah Daerah**

**Hak-hak politik**

**Sarana dan Infrastruktur**

**Ekonomi**

**Monitor**

Setelah MoU ditandatangani, maka kewenangan dalam konstitusi dan DPR akan diberikan amnesti kepada konflik. Dengan amnesti tersebut GAM dipulihkan hak-hak politik, e sama dengan warga negara biasa.

Pengumpulan dan sekaligus penarikan senjata GAM akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan September 2005 sampai bulan Desember 2005. Sejalan dengan itu dilakukan penarikan dengan penarikan satuan non-organik secara bertahap dalam waktu yang ditentukan. Pemerintah Daerah akan ditata ulang dan undang untuk mengatur hubungan dan rinci atas kewenangan pusat dan provinsi dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan amnesti, maka mantan anggota GAM nyai hak dalam peranan politik, baik dalam pilkada dan pemilu, termasuk dalam politik dengan syarat-syarat nasional. Kemungkinan tentang partai politik akan dibentuk dengan DPR dalam waktu 1,5 tahun. Pemerintah akan membangun kembali dan masyarakat yang rusak akibat konflik dan sekaligus membantu integrasi masyarakat ke masyarakat Aceh. Dalam bidang ekonomi, Aceh akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang baik dan masyarakat Aceh dan akan berpedoman pada rehabilitasi Aceh. Untuk memantau agar semua kegiatan tersebut mendapat persetujuan berlangsung dengan baik, maka akan dilakukan oleh tim Uni Eropa dan

## MoU Helsinki

Kesepakatan dalam MoU Helsinki terdiri dari 10 poin dengan masing-masing penjelasannya (lebih lengkap dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM) adalah masalah penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dari 4 (empat) item; Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; Partisipasi Politik; Ekonomi, dan Pertahanan dan Pertahanan. Poin kedua adalah masalah Hak Asasi Manusia. Poin ketiga terdiri dari 2 (dua) item, masing-masing tentang penarikan senjata GAM ke dalam masyarakat. Poin kesepuluh adalah masalah

## Bagian Kedua

# Peran AMM dalam Menjaga Perdamaian Aceh

II	21-23 Februari	Suasana perundingan sudah lebih kondusif. Kedua pihak tampak lebih memahami posisi dan pendirian masing-masing. Sama-sama menyadari bahwa konflik berdarah selama 30 tahun itu perlu diakhiri
III	12-17 April	Iklim perundingan sudah lebih nyaman. Kedua belah pihak sudah saling tukar draf keinginan dalam bentuk tertulis
IV	26-31 Mei	Pembahasan draf kedua belah pihak. Iklim perundingan sudah jauh lebih baik.
V	12-17 Juli	Sudah dicapai banyak titik temu dimana GAM tidak lagi mempersoalkan masalah Negara Kesatuan RI, konstitusi dan sudah melupakan niat referendum, tuntutan merdeka dan sebagainya. GAM hanya menuntut keberadaan partai lokal di Aceh. Tuntutan ini menyebabkan perundingan menjadi sangat ketat hingga detik-detik akhir.
	27 Juli	Penandatanganan Draf MoU oleh masing-masing pihak
	15 Agustus	Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Vanta, Helsinki, Finlandia yang disaksikan oleh fasilitator perundingan sekaligus mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.

Momen itu juga disaksikan oleh Erkki Tuomioja, Menteri Luar Negeri Finlandia, Duta Besar Inggris untuk Findandia, Matthew Kirk, sebagai representasi Presiden Uni Eropa, dan Aldo Dell'Ariccia sebagai representasi Komisi Eropa, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara ASEAN

Penandatanganan ini menandai berakhirnya konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 30 tahun di Nanggroe Aceh Darussalam

Dari pihak pemerintah, meski penarikan pasukan atau aparat keamanan non-organik dilakukan satu bulan setelah MoU ditandatangani (15 September), penarikan pasukan dilakukan lebih cepat. Sebagian bahkan telah dipulangkan sebelum MoU ditandatangani. Demikian juga dengan pihak GAM. Puluhan anggota GAM memutuskan turun gunung terlebih dahulu begitu mendengar kesepakatan MoU ditandatangani meskipun perintah demobilisasi dilaksanakan tanggal 15 September.

**Tabel 2.**  
**Draft MoU Pemerintah RI dan GAM**

Poin	Kesepakatan
Prinsip-prinsip pokok	Menyelesaikan konflik secara damai, komprehensif, menyeluruh dan bermartabat. Sepakat dengan jujur

### A. Pendahuluan

Titik paling krusial dalam menjalankan sebuah damai adalah tahap implementasi. Dari sekian banyak tahap yang berhasil dilaksanakan, sebagian besar tahap ini. Ini menunjukkan bahwa tahap implementasi sulit dari pada menghasilkan sebuah kesepakatan. Selama pada 1991-1994 negosiasi dilakukan dalam empat Kamboja, Liberia, Somalia dan Angola, negosiasi menghasilkan kesepakatan damai tetapi kemudian gagal dalam tahap implementasi. Keberhasilan implementasi menjadi suatu kunci suksesnya sebuah resolusi konflik yang bertujuan menyelesaikan semua penyebab konflik. Syaratnya adalah, para pihak konflik jangan hanya memfokuskan pada de-eskalasi tetapi juga pada *fairness* dan durabilitas dari kesepakatan dihasilkannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Stephen J. Stedman. "Negotiation and Mediation in Internal Conflict." In Michael E. Brown (Ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*

Henry Dunant Centre (HDC), sebuah *non-governmental organization* yang bergerak dalam upaya penyelesaian konflik secara damai, Aceh damai di Vantaa, Helsinki, Finlandia, yang terlibat sebagai pihak ketiga di Aceh untuk mengakhiri kekerasan bersejarah mengakhiri konflik panjang, melelahkan dan yang telah berlangsung lama. HDC berhasil mengajak kedua belah pihak 30 tahun di Aceh (lihat tabel 1). Sebagai sebuah pihak yang terlibat konflik, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menyelesaikan konflik yang telah mengakar selama 30 Pemerintah Republik Indonesia (RI), untuk duduk dalam meja perundingan dengan berbagai perdebatan kepentingan perundingan yang kemudian menghasilkan kesepakatan berupa *Humanitarian Pause (2000)* dan *Cessation of Hostilities Agreement (2002)*.<sup>3</sup> Kar bukanlah sesuatu yang mudah dan memerlukan sesuatu. Sayangnya, upaya HDC tersebut kemudian menemui kebuntuan dan ras, usaha yang sungguh-sungguh serta pengorbanan berakhir dengan kegagalan karena ketidakmampuan semua pihak yang semula dianggap prinsip untuk menyelesaikannya yang terlibat dalam penyelesaian konflik untuk mengimplementasi-konflik memerlukan sebuah seni untuk menciptakan kesepakatan kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Rasmussen, keberhasilan implementasi sangat ter-memulai perang, orang tidak perlu nasehat. Tetapi un- gantung dari kemampuan institusi-institusi yang ada dalam negaranya tanpa kehilangan keuntungan dan harga diri, dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik.<sup>4</sup> Insitusi tersebut lajar”.

adalah lembaga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan moni- Ketika MoU ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005, toring perdamaian yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak Helsinki, ribuan warga Aceh berdoa di Masjid Baiturrahman yang terlibat konflik atau melibatkan pihak ketiga. Kenyataan yang menjadi saksi melalui media elektronik seraya mengu- terjadi di Aceh jauh dari apa yang dikatakan Rasmussen dimana sta-bahagiannya. Dalam setiap konflik yang terjadi, pihak y- bilitas pasca konflik tidak dijaga akibat dari belum terciptanya rasa nyak menderita dan menjadi korban bukanlah merek- kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Pasca per-terlibat langsung dalam peperangan tersebut, seperti- janji, konflik bersenjata dan kekerasan terus berlangsung yang dil-atau tentara, melainkan rakyat kecil, mayoritas r- akukan oleh kedua belah pihak, terutama aparat keamanan dan para perempuan, yang tidak tahu mengapa konflik harus- milisi sipil. itu, wajar jika mereka merupakan kelompok yang pali-

Menurut Kriesberg, implementasi akan berhasil manakala ada setiap perundingan dan kesepakatan damai. sebuah institusi kuat yang bertugas mengontrol jalannya kesepakatan Sebagai wujud kegembiraan terhadap perjanjian damai, dengan mengkombinasikan berbagai metode baik kekuatan Aceh melakukan pawai keliling sambil memukul *rapai* militer maupun ekonomi dan politik.<sup>5</sup> Dengan catatan, tegas Krieberg, simbol perang telah dihentikan, sementara man- metode kekerasan atau penggunaan kekuatan militer harus dibatasi dilakukan konvoi keliling Aceh dengan menggunakan k- dan tidak bersifat destruktif terhadap pihak-pihak yang terlibat kon- dua. *Meuyoe ka dimeusu rapa- uroeh lageum dipiyoeh* flik.<sup>6</sup> Keberhasilan implementasi adalah produk intervensi antara kalau sudah dibunyikan gendang rapai, itu pertanda p- berbagai pihak yang terkoordinasi baik resmi atau tidak yang bekerja hentikan.

Tabel 1.

Babak-Babak Perundingan RI-GAM

BABAK	TANGGAL (Th. 2005)	AKTIFITAS DAN MATERI PEMBAHASAN
<p><sup>3</sup> lihat Kompas 13 Mei 2000, hlm.1 dan Kompas, 10 Desember 2002, hal.1. Atau langsung Lihat Nota Kesepahaman Mengenai Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh yang ditandatangani Hassan Wirajuda (wakil RI) dan Zaini Abdullah (wakil GAM) tanggal 12 Mei 2000, dan Nota Kesepakatan COHA yang ditandatangani Wirjono Sastrohandojo (wakil RI) dan Zaini Abdullah (wakil GAM) tanggal 9 Desember 2002</p> <p><sup>4</sup> J. Lewis Rasmussen. "Peacemaking in the Twenty-First Century; New Rules, New Roles, New Actors", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. <i>Peacemaking in</i></p>	<p>28-29 Januari</p>	<p>Kedua belah pihak baru saling "berker- perundingan berlangsung dalam s "Panasnya" suhu di ruang perundingan rena kedua belah pihak baru melont-</p>



Situasi ini menggugurkan optimisme para delegasi semua level masyarakat.<sup>7</sup> Dengan catatan yang berharap perundingan babak terakhir akan berjalan cepat dan keberadaan lembaga pengontrol atau *peacekeeper* harus mudah karena telah terbentuknya rasa saling memahami dan kondisi dalam lokasi konflik sampai situasi memungkinkan untuk kondusif sebelumnya. Perdebatan partai politik lokal ini nyaris tidakkan. Kepergian lembaga *peacekeeper* yang terlalu cepat mencapai titik temu dan membuat Ahtisaari, seorang mediator pe-vensi dalam sebuah konflik komunal dapat memicu perundingan yang telah berpengalaman dan piawai, turut menjadi te- yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus gang. Ahtisaari kemudian berinisiatif memberikan waktu rehat agar *peacekeeper* pergi, konflik selalu terulang seperti yang suhu kembali dingin. Tetapi upaya tersebut tidak berhasil menyusut-Srilanka atau Lebanon.<sup>8</sup> Kondisi seperti itu terjadi t-kan kedua belah pihak dalam argumennya masing-masing. Diantara proses perdamaian dipaksakan oleh pihak luar, bukan sekian babak perundingan, babak ini merupakan babak terberat da-situasi *ripe for resolution* atau *hurting stalemate*. In- lam perundingan.

Kengototan GAM terhadap usul partai politik lokal karena isu stabil, keberadaan lembaga monitor di area konflik h- ini merupakan "kartu truf" terakhir yang bisa dimainkan GAM. Pembentukan institusi atau lembaga monitor inilah "Semua kartu truf sudah kami berikan kepada Republik. Tinggal par-akukan oleh HDC. HDC hanya membentuk sebuah Ko- tai lokal ini yang menjadi pertaruhan kami" kata salah seorang de-Bersama antara GAM dan RI, sesuatu yang sukar u- legasi GAM kepada tim delegasi dari Pemerintah RI. Sebelumnya, efektivitasnya mengingat belum terbangunnya saling k- GAM telah banyak memberikan "kartu truf" berupa melepaskan tunt- antara mereka.<sup>9</sup>

utan kemerdekaan Aceh dan tidak lagi mempersoalkan posisi Aceh Belajar dari kegagalan HDC, *Crisis Management* sebagai bagian dari NKRI, tidak menuntut dan mempersoalkan refe- sebuah NGO yang kembali menjadi pihak ketiga untuk rendum. Karenanya GAM berpendapat seyogyanya Pemerintah Indo-konflik Aceh, membentuk sebuah institusi yang bertu- nesia mengabulkan tuntutan tersebut. Untuk menghindari terjadinya pelaksanaan kesepakatan damai di Aceh. Keberadaan *deadlock*, pemerintah kemudian menyetujui keinginan usulan pem- but langsung dicantumkan dalam kesepakatan (MoU- bentukun partai politik lokal di Aceh. Delegasi Pemerintah, Sofyan A. telah ditandatangani bersama oleh pihak-pihak yang Djalil, mengatakan partai lokal memang tidak dikenal dalam konst- konflik di wilayah tersebut pada tanggal 15 Agustus tusi Indonesia, tetapi demokrasi Indonesia dinamis.<sup>37</sup>

Sebagai realisasi disetujuinya pembentukan partai lokal, (AMM). Tulisan ini bertujuan menganalisis peran AM- disepakati pemerintah dalam waaktu setahun sampai 18 bulan akan faktor apa saja yang membuatnya berhasil memba- menyiapkan kondisi hukum dan politik bagi pembentukan partai lo- pihak yang terlibat konflik di Aceh (Pemerintah Indon-

kal di Aceh untuk mematuhi kesepakatan perdamaian Helsinki?

Dalam perundingan terakhir ini, kedua belah telah pihak B. **Awal Hadirnya AMM** Pada saat terjadi pembahasan kesepakatan menyepakati lima poin. Pertama, nama Aceh ditentukan oleh DPRD Pemerintah Indonesia dan GAM, salah satu permasalahan Keempat, keikutsertaan dan partisipasi GAM dalam pembangunan c- adalah siapa pihak yang memiliki wewenang un- dan rekonstruksi Aceh, serta kelima, pemilihan kepada daerah (pil- k- ada) Aceh diselenggarakan tahun 2006 dimana GAM dapat berparti- sipasi di dalamnya dan membentuk partai politik lokal.<sup>38</sup>

Dengan dilahirkannya kesepakatan tersebut, pada tanggal 17 Ju- li, delegasi Pemerintah dan GAM berhasil merampungkan seluruh ma-

<sup>7</sup> J. Lewis Rasmussen. "Peacemaking in the Twenty-First Century: Roles, New Actors", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen, *International Conflict: Methods and Techniques*, (Washington, D.C., U.S.A., 1997), hal. 10.

<sup>8</sup> Joseph R. Rudolph, Jr. "Intervention in Communal Conflict", *C*

ing dan menjadi penentu apakah kesepakatan damai berhasil dite-pokan atau tindak kriminal lainnya, tidak akan diberik- gakkan atau berakhir dengan kegagalan.<sup>10</sup> Tetapi pembentukan lem- Berkaca dari keberhasilan perundingan babak s- baka monitoring tanpa pemikiran dan pertimbangan mendalam dari bak kelima dipenuhi dengan optimisme keberhasilan. kedua belah pihak juga hanya akan sia-sia. Kegagalan HDC menjadi ta pada babak akhir ini, GAM mempertaruhkan tawaran sebuah pelajaran berharga bahwa untuk menyelesaikan konflik Aceh,tu partai politik lokal yang sangat berdampak pada harus ada pihak eksternal yang memiliki wibawa kuat sebagai pihak *vernment*. Perdebatan dan tarik ulur mengenai partai l ketiga yang bertugas mengawasi jalannya kesepakatan.<sup>11</sup> menjadikan perundingan menemui jalan buntu dan

Mempercapayakan pada PBB, melahirkan trauma bagi pihak In-karena masing-masing pihak tetap berpegang teguh p- donesia karena kasus Timor Timur.<sup>12</sup> Demikian juga melibatkan nya dan tidak ditemukan jalan keluar.

ASEAN secara politik sangat sensitif.<sup>13</sup> Pemerintah khawatir keterli- GAM mengusulkan keberadaan politik lokal di A- batan PBB secara langsung di Aceh akan memperkuat isu referendum akan digunakan oleh GAM sebagai wadah perjuangan. dan menjadikan wilayah tersebut lepas merdeka. Kekhawatiran ininolak usulan tersebut karena menganggap partai pol salah satunya diutarakan oleh Panglima Daerah Iskandar Muda,sejalan dengan kerangka konsep NKRI serta bertabrak Mayor Jenderal Abdul Rahman Gaffar yang menyatakan bahwa rakyat dang-Undang Nomor No. 31 Tahun 2002 Tentang Par Aceh akan mendukung kemerdekaan jika opsi tersebut diberikan.<sup>14</sup>merintah menjamin partisipasi politik mantan angg Sebalikny, mempercayakan pada ASEAN, melahirkan kekhawatiran terwadahi dalam lembaga atau institusi politik yang s bagi GAM karena ASEAN dinilai akan cenderung lebih berpihak padana ketika amnesti diberikan, mereka memiliki hak Indonesia karena ikatan regional. yang sama seperti warga sipil lainnya, termasuk m

Kekhawatiran terhadap dua lembaga tersebut, menurut Ou-partai politik dan dicalonkan oleh partainya menjac- draat, sangat beralasan karena PBB atau organisasi regional seperti baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah ba ASEAN bukanlah merupakan aktor politik independen yang *concern*kan garansi bahwa orang-orang mantan anggota GAM pada isu-isu perdamaian dan keamanan. Lebih akurat berpikir bahwalonkan oleh 10 partai politik yang telah ada saat ini PBB instrumen kebijakan dari negara-negara anggotanya.<sup>15</sup> Namun jaminan itu merupakan terobosan dari kegemangan GAM demikian, terlepas adanya ketidaksetujuan dalam internalgusung opsi partai politik lokal. Tetapi tawaran itu p- pemerintahan Indonesia, keterlibatan pihak internasional GAM. GAM menginginkan partai lokal karena denga bagaimanapun juga perlu untuk diikutsertakan untuk menciptakanakan lebih mudah untuk meraih kekuasaan untuk m- kredibilitas. Ketiadaan lembaga yang kredibel dan netral dalam me-kepentingan politik berdasarkan platform yang sesuai monitor proses perdamaian di Aceh akan mengancam terjadinya nilai yang selama ini GAM tuntut dan perjuangkan. berbagai pelanggaran dan pengingkaran terhadap perjanjian damai dengan hanya menumpang di partai lain ia tidak ak seperti kegagalan proses damai sebelumnya yang pada akhirnya han- maksimal didukung secara kelembagaan. ya akan memunculkan semakin dalamnya perselisihan yang ada.

---

<sup>10</sup> Joseph R. Rudolph, Jr. "Intervention in Communal Conflict", *Orbis*, Vol.39, No.2, (Spring 1995), hlm.259. lihat juga Giovanni Grevi, " The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Management", *Occasional Paper*, No.61, desember 2005, hlm.21

<sup>11</sup> Giovanni Grevi, " The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Management", *Occasional Paper*, No.61, desember 2005, hlm.21

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Edward Aspinall and Harold Crouch, "The Aceh Peace Process: Whay It Faield",

Menurut GAM, ketentuan tidak adanya parta- adalah cermin dari tidak demokratisnya Pemerintah l- na menghambat keinginan dan hak warga negaranya. U- Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dinil- membatasi dan menyumbat aspirasi daerah serta masi- rol pusat yang begitu kuat. Kewarusan parpol memiliki- persen dari seluruh propinsi yang ada dan 50 persen d- bupaten propinsi terkait menyiratkan adanya keinginan- mengontrol seluruh aktifitas politik. Karenanya GAM

di, Catalonia di Spanyol dan Hongkong. Menurut pengakuan Nur Djuli, Ahtisaari kemudian menghubungi pihak Indonesia meminta agar pentingnya kehadiran lembaga monitoring, Ahtisaari merubah tuntutan/tawaran dari otonomi menjadi *self government* AMM dalam kesepakatan damai yang harus direalisasikan yang kemudian menjadi perdebatan panjang di Jakarta. Jika sebelum-jadikan Eropa sebagai kandidat utama lembaga monitoring *self government* Indonesia yang membuat proposal dan GAM kenapa Eropa dipilih sebagai monitor, karena menurutnya merespon, setelah tuntutan *self government* GAM diharuskan Juru Bicara AMM, kredibilitasnya amat sangat bisa diajarkan membuat proposal. Dalam proposal yang diajukan GAM, dari UU Otonomi yang ada, pasal-pasal yang tidak mendapat halangan adalah dan bekerjasama dalam AMM.<sup>17</sup> Karena itu kemudian pasal-pasal tentang ekonomi karena sebelumnya sudah pernah diatur Kesepakatan damai dibentuk kerjasama Eropa-ASEAN dalam UU NAD. Kecuali satu pasal tentang 70% hasil ekonomi Aceh yang akan memonitor kesepakatan damai di lapangan *retained by Aceh* (bukan *return to Aceh*). "Kami jelaskan ke mereka-goda dari masing-masing pihak yang terlibat konflik. Kami bahwa hasil alam itu adalah milik masyarakat Aceh, kami yang akan-ma tersebut dicantumkan dalam artikel 5 dalam nota memberikan kepada pemerintah pusat".<sup>36</sup> antara Pemerintah RI dan GAM. Disebutkan bahwa

Dari apa yang disampaikan Nur Djuli maupun Nurdin, nampak-oleh Negara-negara Uni Eropa dan Negara-negara ASEAN bahwa GAM sama sekali tidak memiliki konsep jelas dan tidak siap-serta dengan mandate memantau pelaksanaan komitmen dengan strategi perundingan yang dihadapi kecuali mengkritisi kon-yang terlibat konflik di Aceh.<sup>18</sup> disisi dan proposal yang diajukan pemerintah pusat.

Perundingan babak keempat diselenggarakan 26 - 31 Mei. Babak ini merupakan pembahasan draf yang telah diajukan masing-masing yang tidak lazim, tetapi terbukti efektif.<sup>19</sup> Namun masing-pihak dimana delegasi RI memberikan jawaban atas berbagai keterlibatan ASEAN harusnya dilihat sebagai institusi draf pertanyaan atau proposal yang diajukan oleh GAM dan seba-Negara-negara di wilayah Asia Tenggara, dimana Indonesia liknya. Babak ini berjalan sangat baik dan tanpa hambatan. Kondisi-kon salah satu anggotanya. Pelibatan Uni Eropa karena ini menimbulkan optimisme di kedua belah-pihak bahwa perundingan iliki konsep kerjasama *ASEAN Community Security* dan babak kelima atau terakhir akan berjalan tanpa masalah sehingga Negara, diantaranya Uni Eropa. draf kesepakatan akan dapat ditandatangani dengan cepat.

Perundingan tahap kelima dilaksanakan pada 12-17 Juli. Dalam misi pertama di Asia dimana hampir sebagaimana babak perundingan tahap terakhir, atau tahap lima, pemerintah Indonesia belum memahami dengan baik sejarah atau kondisi Aceh melibatkan pihak TNI sebagai pihak yang paling memahami kondisi disisi. Berbagai kritikan bahkan sempat muncul, seperti lapangan untuk terlibat dalam membahas masalah pengelolaan Raya, yang mempertanyakan mengapa mereka tidak m keamanan atau *security arrangement* yaitu mantan Panglima Koop-ja pada perdamaian di region Eropa seperti Balkan.<sup>20</sup> T slihkam yang kemudian menjabat sebagai Komandan Puspenif, Mayor negara lain, seperti Perancis, menunjukkan sikap positif Jenderal Bambang Darmono. bat dalam penyelesaian konflik secara damai di Aceh

Materi yang dibahas dalam babak terakhir ini adalah amnesti mendukung, keterlibatan Uni Eropa dalam AMM dinilai dan pemberian seluruh hak sipil kepada GAM. Amnesti adalah pengampunan dari pemerintah terhadap seseorang yang sebelumnya dianggap melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Ini berarti, secara hukum, orang yang mendapatkan amnesti catatan-catatan hukum sebelumnya otomatis akan hilang dan dianggap tidak ada lagi atau *start from zero*. Tetapi amnesti hanya akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam aktifitas politik saja. Para anggota

<sup>16</sup> Wawancara dengan Faye Belnis, National speaker AMM, Tanggal 09.00 - 09.45, Tempat: Kantor AMM, Banda Aceh

<sup>17</sup> Giovanni Grevi, "The Aceh Monitoring Mission; Toward International Arrangement", *Occasional Paper*, No.61, Desember 2005, hlm.21

<sup>18</sup> Lihat Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005, artikel 5.1

<sup>19</sup> Institute for the Security Studies, "The EU Mission in Aceh"

mau memiliki beberapa arti positif yaitu, pertama, menunjukkan pada hanya bertindak sebagai supervisi saja.<sup>33</sup> Berbagi masyarakat bahwa Eropa tetap memiliki perhatian yang besar ter-but kemudian dijawab oleh Pemerintah pada hari berik hadap perdamaian global walaupun menghadapi kendala keterbata- Pada hari ketiga perundingan ketiga, GAM n san dana, jauhnya jarak atau tidak ada konstitusi yang men-jumlah permintaan tertulis kepada pemerintah Indo dukungnya. Kedua, keterlibatan di Asia menunjukkan visi Eropa se-permintaan tersebut merupakan implementasi dari bagai pemain global, tidak terbatas pada wilayahnya saja. Ketiga, mengenai konsep *self government* seperti kewenang keterlibatan di AMM merupakan sebuah *test case* terhadap kebijakan persoalan ekonomi, pendidikan, pengelolaan sumber d pertahanan dan keamanan Eropa dalam manajemen krisis sipil.<sup>22</sup> buhan udara dan laut, perikanan dan pemilihan kepa

AMM merupakan misi sipil yang terdiri dari monitor-monitor bendera dan lagu kebangsaan. dari Negara-negara Uni Eropa dan Negara-negara ASEAN serta Nor- Menurut Nurdian AR, salah seorang juru rundi wegia dan Swiss. Anggota-anggotanya tidak dipersenjatai<sup>23</sup> dan *self government* merupakan rencana kedua apabil terdiri dari orang-orang yang dianggap memiliki keahlian dan kompe-tama gagal yaitu memperjuangkan kemerdekaan Ace tensi beragam yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas da-rendum. "Plan B adalah Pemerintahan sendiri (*self g lam misi ini. Kendati misi sipil, bukan berarti AMM menolak didasarkan pada tulisan Wali Negara Tgk. Hasan Ti keanggotaan militer. Anggota yang memiliki latar belakang militer "Democracy for Indonesia". Dua paragraf terakhir p tetap diperlukan karena sebagian tugas-tugas AMM memiliki ket- nutup menjelaskan hal ini". Alasan GAM menerima s erkaitan dengan teknis kemiliteran.<sup>24</sup> karena opsi otonomi adalah *status quo*. *Status quo*, m*

Secara resmi, AMM mulai menjalankan tugasnya satu bulan berarti menerima operasi militer dan segala keadaan setelah kesepakatan damai Indonesia-GAM ditandatangani, yakni pa-sebelumnya.<sup>34</sup> da 15 September 2005 untuk jangka waktu 6 bulan. Misi AMM di Aceh Apa yang dikatakan Nurdin ini berbeda dengan atas undangan pemerintah Indonesia dengan persetujuan kepem-paikan Nur Djuli yang nota bene adalah anggota juru impinan GAM.<sup>25</sup> Pada tanggal 27 Februari 2006, Dewan Uni Eropa juga. Menurut Nur Djuli, pilihan terhadap *self governn memperpanjang misi AMM hingga 3 bulan, sampai 15 Juni 2006,<sup>26</sup> dan buah "kebetulan". "Sampai suatu ketika, selesai kemudian diperpanjang hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah Ahtisaari diinterview di TV lokal dan kemudian munc (pilkada), naum tidak melebihi 15 September 2006, seperti yang bar, dia mengatakan bahwa *solution for Aceh conflict* ditetapkan dalam pertemuan Komisi Uni Eropa di Brussels, Kamis, 11 ment. Kami tangkap ide ini. Besoknya kami minta per Mei 2006.<sup>27</sup> Namun terkait dengan tertundanya pelaksanaan pilkada, Ahtisaari untuk konfirmasi hal ini. Kami katakan, jika AMM tugas AMM akhirnya diperpanjang hingga 15 Desember 2006.<sup>28</sup> istilah merdeka dan referendum tabu, bagi kami otor*

AMM memiliki perbedaan dengan lembaga monitoring yang "*Autonomy for Acehnese is security word, because Aut* dibentuk HDC. Untuk memantau implementasi damai, HDC memben-*quo. What the meaning of status quo? Exploitation, m* tuk *Joint Security Committee (JSC)* yang memiliki tugas: Memformu-*sion, anthracitic. That is autonomy for Acehnese. So, f* lasikan proses implementasi kesepakatan; Memonitor situasi kea-*issue must be out as independence and referendum for* manan di Aceh; Melakukan investigasi secara penuh terhadap keke-ra-*kami mau menerima self government."<sup>35</sup>*

Berdasarkan informasi Nur Djuli, *self governme* buah tuntutan yang direncanakan atau plan yang telah erti yang dikatakan Nurdin. "Kami tidak tahu apapun *government*. Kami hanya tidak mau otonomi. Setelah mempelajari *self government* seperti di Sabah Serawa

---

<sup>22</sup> Giovanni Grevi, "The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Management", *Occasional Paper*, No.61, Desember 2005, hlm.22

<sup>23</sup> Lihat Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM, artikel 5.8

<sup>24</sup> [http://www.aceh-mm.org/indo/amm\\_menu/about.htm](http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm). Lihat juga [http://www.kompas.com./kirim\\_berita/print.cfm?num=76364](http://www.kompas.com./kirim_berita/print.cfm?num=76364)

<sup>25</sup> Wawancara dengan Faye Belnis, spkspesman AMM di Banda Aceh, tanggal 7 April

yang tidak kami terima, maka semua point akan tidak dapat disetujui. Kita mulai dengan hal-hal yang mudah; masalah ekonomi, dan sebagainya. RI mencoba merayu GAM bahwa jika kami menerima otonomi, maka Aceh akan dibangun seperti Putra Jaya di Malaysia, Aceh akan dibangun 10 airport yang bisa dikelola sendiri, dan omong kosong lainnya. Yang menyampaikan ini adalah Sofjan Djalil. Saya tanyakan ke dia, dari mana RI bisa dapatkan uang karena setahu saya RI sekarang berhutang lebih dari US \$ 800 Milyard. *This is wind from heaven. It's very nice, but that is still the wind. Just the wind. Empty!*<sup>32</sup>

Perundingan babak kedua dilaksanakan tanggal 21-23 Februari. Berbeda dengan perundingan sebelumnya, perundingan babak kedua jauh lebih kondusif dan tidak lagi didominasi oleh protes dan keluhan. Kedua pihak tampak lebih memahami posisi dan pendirian masing-masing. Sama-sama menyadari bahwa konflik berdarah selama 30 tahun itu perlu diakhiri.

Perundingan babak ketiga dilakukan pada bulan April selama enam hari secara maraton mulai hari Selasa sampai Minggu, 12 - 17 April 2005. Perundingan telah ini memiliki tema spesifik sehingga diharapkan pada hari minggu pembahasan telah usai dan para delegasi dapat pulang dengan membawa hasil yang lebih maju dan signifikan. Masing-masing pihak mengajukan berbagai draf persoalan secara tertulis. Pertemuan dilaksanakan secara marathon karena materi menyangkut hal-hal yang substantif yakni masalah otonomi khusus, untuk Aceh, kompensasi ekonomi bagi Aceh, amnesti bagi para anggota GAM, masalah keamanan, hukum, penghentian aktifitas atau gerakan GAM secara permanen, penyerahan senjata GAM dan penarikan pasukan TNI, penghentian tindak kekerasan dan juga isu yang sangat sensitif, yaitu *self government*.

Pada sesi pertama dari pertemuan ketiga ini, GAM mengajukan beberapa masalah yang dianggap urgen. Pertama, kewenangan GAM dalam mengelola kekayaan sumber daya alam di Aceh seperti minyak, hasil bumi, gas, tambang dan juga pengelolaan air bersih. Kedua, kewenangan Propinsi NAD dalam hal perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri. Ketiga, manajemen pariwisata, keempat kewenangan GAM dalam persoalan pengelolaan pelabuhan laut dan udara. Permasalahan kelima adalah pendidikan. GAM mempertanyakan apakah mereka memiliki kewenangan mengelola pendidikan di Aceh, termasuk pengiriman para anggota GAM ke luar negeri untuk tujuan belajar.

san keamanan; Memperbaiki situasi keamanan dan  
Mendesain dan mengimplementasikan proses demilitasi  
sisi JSC adalah pejabat-pejabat senior yang ditunjuk  
Pemerintah dan GAM dan seorang pihak ketiga (HDC)  
kedua belah pihak. Kemudian untuk memutuskan pe  
muncul di lapangan, dibentuk *Joint Council* (JC) ya  
wakil-wakil senior Pemerintah dan GAM dan juga  
(HDC).<sup>29</sup>

Dalam situasi dimana permasalahan utama (st  
lum terpecahkan, tidak ada kondisi luar yang memak  
*resolution* bagi terjadinya perdamaian diantara kedua  
serta belum tumbuhnya rasa saling percaya, mengakib  
pun JC tidak optimal dalam melaksanakan tugas-tugas  
dilaksanakan HDC dalam menjembatani perbe  
Pemerintah dan GAM sangat terbatas mengingat tidak  
mal yang dapat diberikan lembaga tersebut apabila  
garan terhadap kesepakatan.

### C. Struktur

AMM diketuai oleh seorang warga Negara B  
Feith. Anggota AMM terdiri dari 220 orang, 120 orang  
sisanya dari Negara-negara ASEAN (Brunei, Malaysia,  
gapura, dan Thailand). Jumlah total staf AMM adalah  
ua AMM dibantu oleh tiga deputi, masing-masing dari  
landia dan Italia. Kepala staf AMM berasal dari Eropa,  
putinya dari Philipina. Secara umum, struktur AMM, s  
men atau unit dikepalai oleh anggota dari negara  
dengan deputi dari negara ASEAN. Penunjukan anggo  
Eropa sebagai kepala unit atau departemen dimaks  
upaya untuk menghadirkan rasa kepercayaan, teruta  
GAM, terhadap lembaga AMM. Pembagian kerja in  
adanya komitmen dan kerjasama yang baik anta  
ASEAN.<sup>30</sup>

**Tabel 1.**  
**Personel Internasional di AMM**

ASEAN	Brunei	20
	Malaysia	20
	Philipina	17
	Singapura	15
	Thailand	21
	<b>Total</b>	<b>93</b>
Eropa	Austria	3
	Denmark	8
	Finlandia	15
	Perancis	5
	Jerman	11
	Irlandia	1
	Italia	1
	Lithuania	2
	Belanda	9
	Spanyol	10
	Swedia	25
	Inggris	9
	Uni Eropa	2
Norwegia	4	
Swiss	2	
	<b>Total</b>	<b>107</b>

Ketua AMM didampingi empat penasehat, meliputi penasehat politik, hukum, penasehat khusus dan seorang yang memiliki tanggung jawab sebagai *liaison* dengan Presiden Uni Eropa. Departemen yang paling luas adalah departemen operasional yang bertugas menyusun segala laporan dan analisis kejadian di lapangan. Departemen lainnya adalah departemen *decommissioning*, informasi dan media, keamanan, kesehatan, juga pelayanan kesekretariatan yang mencakup financial, akunting dan logistic.

Jumlah pemantau AMM sekitar 80 orang pemantau internasional tidak bersenjata, dimana hampir 2/3 diantaranya berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa, Switserland dan Norwegia. Selain itu sekitar 1/3 anggota pemantau berasal dari lima negara ASEAN. AMM sendiri, dalam situsnya menegaskan bahwa mereka berstatus imparisial dan tidak memihak ataupun mewakili pihak manapun.<sup>31</sup>

AMM bermarkas di Banda Aceh dan membentuk kapabilitas pemantauan secara geografis melalui 11 kantor wilayah di beberapa

hasil, negosiasi atau perundingan itu akan berakhir dengan *"One can not negotiate forever"*, ujarnya.<sup>28</sup>

Adanya tekanan untuk menerima otonomi mendukung kuat dari GAM yang kemudian menduga perundingan akhirnya akan bernasib sama dengan perundingan sebelumnya.<sup>29</sup> Dalam perundingan babak pertama tersebut, mendiang Ahtisaari mengatakan kepada GAM; "Jangan anda terburu-buru bongkar jabatan anda, sekarang jawab saja apakah anda menginginkan otonomi atau tidak? kalau tidak anda boleh kembali ke Aceh". Mendapat pertanyaan seperti itu, Nur Djuli kemudian menjawab *"I am not ready to pack of our bag now and go somewhere else"*. Ahtisaari minta maaf.<sup>30</sup>

Titik positif pertemuan itu kedua belah pihak bertemu dan mendiskusikan masalah Aceh secara langsung serta sikap GAM yang akhirnya tidak lagi menuntut kemerdekaan. Salah satu delegasi Indonesia, Widodo, mengatakan bahwa dalam pertemuan pertama tersebut memiliki dua aspek positif. Pertama, pertemuan antara dua pihak terjadi secara langsung. Sebelumnya pertemuan dilakukan melalui mediator. Kedua, delegasi Indonesia menyatakan pemikirannya bahwa Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif namun tetap dalam kerangka konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD.<sup>31</sup> Delegasi Indonesia kembali ke Jakarta malam, namun menyisakan Farid Husain untuk tetap tinggal di Banda Aceh. Nur Djuli sendiri ingin pergi ke Jakarta. Nur Djuli ingin pergi ke Jakarta untuk melampirkan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya.

GAM sendiri menganggap pertemuan ronde pertama gagal. Nur Djuli megatakan pada penulis:

"Akhirnya ronde pertama memang gagal. Saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa. Saya kecewa karena saya panik lah CMI, karena dia mempertaruhkan reputasi saya. Mereka membujuk kami untuk tetap berunding, mereka menawarkan agenda baru. Mereka mengirimkan surat kepada kami, dan meminta agar kami menjawab dalam waktu 2 minggu. Sebulan kemudian kami bertemu dengan mereka putaran kedua. Kuncinya: *"nothing is agreed until everything is agreed"*. OK, kami mau bicarakan semua hal, tetapi syaratnya adalah otonomi karena kami pikir, toh nanti jika ada

kan GAM memiliki konsistensi dan jauh lebih mudah untuk menjajagi provinsi Aceh, yaitu: Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Barat Daya. Hal ini menunjukkan bahwa GAM memahami posisi dan pertimbangan lawan dialognya berdasarkan pen-Tapak Tuan, Blang Pidie, Meulaboh, Lamno, Banda Aceh, dan Aceh Tenggara. Pengalaman yang dimiliki. Sebaliknya, perubahan delegasi Indonesia dan Takengon.

Perundingan babak pertama RI-GAM berjalan sangat ketat dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Banyak kritikan dan hujatan terhadap pemerintah. Pertemuan tahap pertama masih sulit karena masing-masing pihak mendasarkan pada argumen dan tuntutan fundamental. <sup>32</sup>

Perundingan babak pertama RI-GAM berjalan sangat ketat dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Banyak kritikan dan hujatan terhadap pemerintah. Pertemuan tahap pertama masih sulit karena masing-masing pihak mendasarkan pada argumen dan tuntutan fundamental. <sup>32</sup>

Perundingan babak pertama RI-GAM berjalan sangat ketat dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Banyak kritikan dan hujatan terhadap pemerintah. Pertemuan tahap pertama masih sulit karena masing-masing pihak mendasarkan pada argumen dan tuntutan fundamental. <sup>32</sup>

Perundingan babak pertama RI-GAM berjalan sangat ketat dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Banyak kritikan dan hujatan terhadap pemerintah. Pertemuan tahap pertama masih sulit karena masing-masing pihak mendasarkan pada argumen dan tuntutan fundamental. <sup>32</sup>

### 1. Demobilisasi GAM dan Decommissioning Senjata

<sup>32</sup> [http://www.aceh-mm.org/indo/amm\\_menu/about.htm](http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm)  
<sup>33</sup> Giovanni Grevi, "The Aceh Monitoring Mission; Toward Internationalization of the Peace Process"

Berdasarkan kesepakatan Helsinki, GAM harus melakukan de-mengetahui bahwa pintu damai tetap terbuka dalam mobilisasi 3000 pasukannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 kendenai upaya sebelumnya, CoHA, gagal dalam tahap in Desember 2005 dimana GAM secara resmi membubarkan sayap mili- Akan tetapi, persiapan pertemuan informal den- ternya (Teuntara Nanggroe Aceh/TNA). Berdasarkan MoU juga, GAM ra pemimpin GAM tidaklah mudah seiring dengan gelo- diharuskan untuk menyerahkan 840 pucuk senjata yang pelaksa-tikan nasional yang kian memanas menjelang pemilih- naannya dilakukan mulai satu bulan setelah MoU ditandatangani (15 Kalla, yang semula memprakarsai perundingan dengan September 2005) sampai dengan 31 Desember 2005.<sup>36</sup> Inilah kali per- durkan diri dari jabatan Menko Kesra dan mencalonk- tama dalam sejarah konflik Aceh GAM bersedia menyerahkan senjata. calon wakil presiden berpasangan dengan Soesilo Bam Bagi GAM, penyerahan senjata sebagai bagian dari isi kesepakatan sebagai calon presidennya. Hiruk pikuk perpolitikan merupakan sebuah pengorbanan besar. Karena tanpa senjata, mereka memperebutkan kekuasaan menjadikan masalah Aceh tidak bisa melakukan penyerangan ataupun mempertahankan diri rabaikan. Setelah Yudhoyono dan Kalla terpilih sebagai dari serangan TNI. Ini sekaligus menandakan terjadinya sebuah pe-wakil presiden, prakarsa perundingan dengan GAM k- rubahan strategi perjuangan dari perjuangan senjata menjadi per- karena itu, perundingan dengan GAM yang menghas- juangan politik, seperti apa yang dikatakan oleh Abrar Muda, Mantan sinki sesungguhnya merupakan sesuatu yang tertunda. Panglima GAM Wilayah Lhok Tapak Tuan yang kini menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Tapak Tuan "Kami tidak butuh lagi sen- **D. Perjalanan Dialog** jata, seandainya hak-hak demokrasi dan politik kami tersalurkan Setelah melalui berbagai lobi tingkat tinggi, ter- dengan baik".<sup>37</sup> akukan oleh Ahtisaari dan CMI-nya, perundingan

Juru Bicara Militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sofyan akhirnya bisa dilaksanakan. Perundingan tersebut ber- Dawood juga mengatakan "Kalau tidak ada senjata lagi, maka TNA ma babak dan sesuai kesepakatan, materi perunding- akan dibubarkan, sementara organisasi GAM tetap, karena TNA dan dipublikasikan kepada pihak lain sebelum penandat- GAM tidak sama"<sup>38</sup> katan dilakukan. Perundingan dilakukan di tempat per-

Proses ini sempat menimbulkan ketegangan di antara kedua pihak Pemerintah Finlandia, Vantaa, 25 kilometer dari p- pihak, karena dalam MoU tidak disebutkan dengan jelas proses dan sinki. mekanisme penyerahan senjata GAM. Hal ini kemudian memunculkan Perundingan RI - GAM berlangsung dalam lima penafsiran dari masing-masing pihak. Pihak TNI meminta agar proses pertama dilaksanakan selama dua hari, tanggal 28-29 penyerahan senjata dilakukan secara terbuka, tidak hanya melibatkan Dalam pertemuan pertama tersebut, pihak RI dipimpi AMM dan GAM saja. Sebaliknya GAM meminta tertutup, hanya meli- Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, didampingi Menteri batkan GAM dan AMM saja, dan TNI akan menerima laporan. Per- munikasi dan Informasi, Sofyan A. Djalil, Deputi Menteri mintaaan TNI didasarkan pada MoU dimana Pemerintah Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat Farid Husain, dan Menteri melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alat Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS, selaku sup- peledak yang dimiliki setiap kelompok dan pihak-pihak illegal mana-perundingan-perundingan selanjutnya pemerintah pun.<sup>39</sup> TNI menuntut agar tetap harus ada wakil TNI untuk memasti- tambahan delegasi yaitu Deputi Menko Polhukam, Ust- kan proses berjalan sesuai prosedur. Perbedaan ini diselesaikan di Direktur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya Deplu tingkat COSA Meeting di AMM, disepakati bahwa penyerahan senjata Wesaka Puja.

hanya dilakukan secara tertutup antara GAM dan AMM dengan alasan Delegai GAM terdiri dari Malik Mahmud selaku M- ri GAM, dr. Zaini Abdullah selaku Menteri Luar Nege-

Kesehatan GAM, Bakhtiar Abdullah sebagai Menteri Pe- serta dua anggota delegasi lainnya, Nur Djuli dan yang menjadi delegasi Aceh ini dari setiap babak p-

---

<sup>36</sup> Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM, artikel 4.2-4.3



itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dikatakan tersebut telah versi. Namun disepakati bahwa sebelum dihancurkan, mendapat restu dari Presiden Megawati Soekarnoputri. tersebut terlebih dahulu harus diverifikasi oleh TNI.

Landasan pemerintah untuk melakukan dialog atau pe-AMM mendorong dan memfasilitasi kedua pihak untuk rundingan dengan GAM adalah Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1999 perbedaan pendapat diantara pihak yang berseteru. tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengamanahkan agar ada suatu pemahaman yang sama diantara kedua pihak konflik di Aceh diselesaikan secara bermartabat dan berkeadilan cari jalan keluar terhadap permasalahan yang tidak di dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagita Kesepahaman.<sup>40</sup> Penyerahan senjata GAM ditangani pelanggaran hak asasi manusia baik selama pemberlakuan Daerahsus AMM yang bertugas mengambil senjata di titil Operasi Militer (DOM) atau setelahnya. Pemerintah memaknai kata mengumpulkannya untuk kemudian didokumentasi, dan bermartabat sebagai penyelesaian melalui perundingan. wakil Pemerintah RI dan dimusnahkan.

Farid memiliki seorang kawan, Juha Christensen, yang Tahap pertama penyerahan senjata dibagi dalam mengaku kenal baik dengan para pemimpin GAM Swedia. Juha Chris-tanggal 15-17 September 2005 di tiga tempat berbeda, tensen adalah seorang ahli linguistik dan juga seorang pengusaha di sar, Bireuen dan Pidie. Penahanan penyerahan senjata bidang farmasi asal Finlandia. Dia menetap di Sulawesi pada 1980-aning dengan penarikan pasukan TNI non-organik dari A dan meneliti bahasa Rampi di Universitas Hasanuddin Makasar Sula-awal, GAM diharapkan menyerahkan 210 pucuk senjata wesi Selatan. 25% dari total 840 pucuk senjata yang disepakati da

Christensen berjanji memepertemukan Farid dengan pemimpin dasarkan laporan AMM, hingga hari ketiga penyeraha GAM di Stockholm, Swedia. Farid kemudian pergi ke Swedia setelah pertama, GAM telah menyerahkan senjata sebanyak 2 mendapat perintah dari Menko Kesra, Yusuf Kalla dan restu serta so-jata. Dari sejumlah itu, setelah diverifikasi, yang mem kongan Megawati. Tetapi pertemuan tersebut gagal terjadi karena pa-standar sebanyak 226 pucuk senjata. Jumlah tersebut l ra pemimpin GAM, diantaranya Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, pucuk dari jumlah senjata yang ditargetkan semula yaitu menolak berbicara atau bertemu dengan pejabat Indonesia tanpa Senjata-senjata tersebut kemudian diserahkan seijin pemimpin tertinggi mereka, Hasan Tiro kendati mereka telah Misi Pemantau Aceh (AMM). Sebelum dimusnahkan, berada dalam satu hotel. Kejadian tersebut membuat sang deputi ma-tersebut terlebih dahulu diperiksa kondisinya oleh AM rah karena merasa dibohongi Christensen yang dinilainya hanya kasi keabsahannya oleh TNI. Berdasarkan penilaian omong kosong. Farid merasa perjalanan jauh separuh dunia yang di-senjata dianggap tidak lolos verifikasi karena dia lalunya tersebut tidak berakhir seperti yang diharapkannya, tanparakitan atau karena tidak berfungsi. Mengenai senjata hasil pembicaraan bahkan sekedar tegur sapa sekalipun. Untuk men-menolak keberatan TNI karena tidak ada klausul da gobati kekecewaan Farid, Christensen kemudian menawarkannya un-melarang senjata rakitan.

tuk bertemu dengan mantan Presiden Finlandia, sekaligus Ketua Dewan Direktur CMI, Martti Ahtisaari. Untuk menghubungi Ahtisaari, Juha meminta bantuan kenalannya, Tapani Roukanen, seorang pemimpin redaksi majalah mingguan berita terkenal di Finlandia, *Soumen Kuvalehti*, yang menjadi kawan akrab Martti Ahtisaari.

Melalui telepon, Roukanen meminta Ahtisaari untuk bertemu dengan Juha Christensen dan Farid Husain. Mereka kemudian mengobrol mengenai kondisi dan konflik Aceh sambil minum kopi. Kendati pada awalnya Ahtisaari terlihat tidak tertarik karena ia telah memiliki agenda kemanusiaan di Eropa Timur dan Afrika, pada akhirnya ia antusias dan bersedia terlibat sebagai pihak ketiga untuk memfasi-

**Tabel 2.**  
**Statistik Perluckutan senjata GAM (diperbaharui 20 Desember 2005)**

Tahap	Dis-erahkan oleh GAM	disqualifi-kasi	Diteri ma	Di-per-masalahkan oleh Pemerintah Indonesia

I (September '05)	279	36	243	17	226
II (Oktober '05)	291	58	233	35	198
III (November '05)	286	64	222	15	207
IV (Desember '05)	162	20	142	4	138
<b>Total</b>	<b>1018</b>	<b>178</b>	<b>840</b>	<b>71</b>	<b>769</b>

Sumber: [http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter\\_menu/decom.htm](http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/decom.htm)

Walau demikian, jumlah senjata yang harus diserahkan GAM ini memiliki persoalan. Berdasarkan data intelejen dari Badan Intelejen Nasional (BIN), persenjataan yang dimiliki GAM jauh lebih besar dari yang diisyaratkan MoU, mencapai dua kali lipat atau sekitar 1600 pucuk senjata. Dalam Rapat dengar pendapat antara BIN dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 14 Desember 2005, beredar informasi bahwa AMM sendiri menghitung GAM memiliki senjata sekitar 1400 pucuk.<sup>42</sup> Polisi juga menduga GAM masih memiliki banyak senjata yang disimpan di berbagai tempat terutama ditanam di bawah tanah. Dugaan itu muncul berkenaan dengan ditemukannya 12 pucuk senjata laras panjang dari dalam tanah di Ulee Lheu, Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh yang dibungkus dalam sebuah kantong terpal kepad air dan disimpan dalam lubang berlapis semen.<sup>43</sup>

Peran AMM dalam mengumpulkan dan memusnahkan senjata di lapangan relatif berjalan dengan baik. Walaupun sebelumnya terjadi perdebatan baik dalam tataran penafsiran nota kesepahaman mengenai keterlibatan TNI secara langsung maupun tidak serta perbedaan penilaian mengenai layak dan tidaknya senjata yang dimusnahkan masuk dalam hitungan, secara keseluruhan prosesnya lancar.

Yang paling mungkin mengganggu kelancaran proses ini yaitu menteri pertahanan GAM, Zakaria Saman alias Karim Bangkok, seorang pemimpin yang memiliki pengaruh sangat kuat di kalangan militer GAM. Ia bersikeras bahwa perjanjian 15 Agustus menyebutkan bahwa GAM hanya akan menyerahkan sebanyak 840 pucuk senjata.

patan bagi mereka untuk terus melakukan upaya perdamaian dengan GAM dengan alasan sebagai respon terhadap pelanggaran. SBY, dalam sebuah pertemuan dengan enam delegasi yang ada di Indonesia, bahkan meminta GAM untuk menandatangani dan bergabung dengan pemerintah dan masyarakat dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi.<sup>21</sup>

Tanpa tsunami, dialog telah berjalan. Tetapi bukan mustahil dialog juga akan menemui kebuntuan seperti sebelumnya. Karena itu, tsunami lebih tepat faktor yang membuat perjalanan dialog yang telah berjalan cepat dibanding sebagai alasan utama dimulainya dialog. AMM sendiri oleh juru bicara AMM, Faye Belnis: "Ada pertemuan sebelum tsunami. Dimana kalau tidak salah pertemuan kelima. Tsunami mempercepat kedua pihak untuk berdialog. Tepat tsunami membantu proses perdamaian".<sup>22</sup> Dalam pertemuan pinall, tsunami adalah sebuah alasan atau moment yang mendorong kedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk terdorong pembicaraan damai tanpa kehilangan muka<sup>23</sup>

### C. Proses Menuju Dialog

Awalnya Ahtisaari, *Chairman* CMI, tidak begitu tertarik dengan konflik Aceh. perhatiannya lebih ditujukan pada masalah perdamaian di Afrika dan Eropa. Dua benua tersebut menjadi perhatian karena dahulunya ia adalah seorang pejabat negara yang ditugaskan di Afrika sedangkan Eropa merupakan region yang subur, Finlandia, berada. Selain itu, di Eropa, terutama di Eropa banyak memiliki masalah yang terkait dengan kemanusiaan, konflik yang menarik perhatiannya, seperti Bosnia Hercegovina. Perhatiannya terhadap konflik Aceh timbul setelah ia bertemu dengan Farid Husain dan Juha Christensen atas jasa baik Tapani.

Farid Husain adalah salah seorang kepercayaan Jusuf Kalla dalam upaya merintis dialog dengan GAM. Farid Husain Kalla menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan sains menjabat sebagai salah seorang deputinya dan bertindak sebagai mediator konflik Poso dan Ambon. Setelah Poso dan Ambon selesai pada bulan 2003 Farid diajak Jusuf Kalla untuk menyelesaikan konflik secara permanen, damai dan bermartabat. Menurut

<sup>21</sup> Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising

ta CMI telah berhasil mempertemukan kedua belah pihak ke meja perundingan jauh-jauh hari sebelum tsunami terjadi.<sup>14</sup> Bahkan Nurdin, menurut Zakaria berarti GAM telah memenuhi janjin yang juga juru runding GAM mengatakan bahwa tsunami adalah fak-dengan maupun tanpa persetujuan AMM atau TNI, cator sekunder terjadinya perdamaian.<sup>15</sup> Dibanding, tsunami, Sidney menyerahkan lebih banyak senjata lagi.<sup>44</sup> Jones justru melihat faktor Jusuf Kalla lebih dominan dalam mendorong terjadinya kesepakatan. "Beberapa kontak dengan GAM telah penafsiran antara TNI dan GAM tentang mekanisme dilakukan oleh Jusuf Kalla dan Tim nya jauh sebelum bencana tsuna-pengumpulan senjata serta penilaian kelayakan pe-mi melanda Aceh.<sup>16</sup> Juha Christensen, Penasehat AMM dan tokoh yang sendiri. Ketentuan bahwa senjata yang diserahkan banyak berjasa dalam proses terjadinya perundingan mengatakan *"ofmasih layak digunakan dan merupakan buatan pabrik course tsunami had attack, had an influence, but I would not say that itsendiri, adalah hasil diskusi dari Komisi Pengaturan K was major factor. I doubted that the parties could have started to ne-* Dalam proses ini, AMM dapat dikatakan berhasil melab *gotiate if there was no preparation before the tsunami and in the nego-tan kepada pihak GAM dan TNI.* *tiation tsunami itself had very little that we didn't talk it very much."*<sup>17</sup>

Kendati demikian, tragedi tsunami tersebut juga tidak bisa dielakkan sebagai faktor yang membuat kedua belah pihak semakin kuat untuk tetap melanjutkan pembicaraan. Tsunami telah memper-satukan seluruh rakyat Aceh.<sup>18</sup> Dapat dikatakan bahwa tsunami me-rusakan menarik semua elemen tentara dan polisi no-rupakan faktor yang semakin mendorong dan memperkuat kedua be-Aceh yang akan dilaksanakan satu bulan setelah pe-lah pihak untuk tetap mau meneruskan dialog. Baik GAM maupun TNI

## 2. **Redeployment TNI dan POLRI**

Dengan adanya perhatian dan bantuan internasional yang begitu besar di Aceh akibat tsunami beberapa pihak kemudian men-coba memanfaatkan situasi tersebut.<sup>19</sup> Beberapa hari setelah tsunami, dalam tahap pelaksanaan penarikan pasukan ini. Penar Maluk Malik Mahmud mengeluarkan statemen yang isinya tidak hanya jauh sebelum jatuhnya tanggal pelaksanaan. Pada tahap menyampaikan ucapan terimakasih kepada para donatur (Amerika, da tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah memulangka Jepang, Uni Eropa, China, Australia, dan negara lainnya, termasuk polisi. Menyusul berikutnya 1.300 personel Brigade M PBB dan NGO) tetapi juga menyatakan bahwa GAM terbuka terhadap gal 23 dan 25 Agustus 2005.<sup>46</sup> demikian juga TNI mem adanya inisiatif masyarakat internasional untuk melakukan perjan-es penarikan pasukan non-organik dari Aceh. Penarka- jian gencatan senjata dengan aparat keamanan Indonesia.<sup>20</sup> Di pihaktahap pertama dimulai hari minggu, 18 September 200

Sejalan dengan penyerahan senjata GAM, Peme ruskan menarik semua elemen tentara dan polisi no-rupakan faktor yang semakin mendorong dan memperkuat kedua be-Aceh yang akan dilaksanakan satu bulan setelah pe-lah pihak untuk tetap mau meneruskan dialog. Baik GAM maupun TNI

Nota Kesepahaman, yaitu 15 september 2005. Penar TNI/POLRI non-organik dilakukan dalam empat tahap pandangan internasional yang menekan agar resolusi konflik segera organik itu, jumlah personel aparat keamanan baik TN RI yang berada di Aceh adalah sejumlah 14.700 per- 9.100 orang personel POLRI.<sup>45</sup> Sebagai wujud komitmen, pemerintah menunjuk-jauh sebelum jatuhnya tanggal pelaksanaan. Pada tahap 15 Agustus 2005, pemerintah memulangka 1.300 personel Brigade M 23 dan 25 Agustus 2005.<sup>46</sup> demikian juga TNI mem- kesem-Krueng Geukueh, Lhokseumawe. Sekitar 800 persone- mando Daerah Militer (KODAM) Bukit Barisan- Kemudian sekitar 6.000 anggota TNI yang terdiri da- atau 25% dari kekuatan TNI di Aceh direncanakan ke- paling lambat tanggal 25 September 2005, dua ming- dari agenda yang telah dijadwalkan semula yaitu 7

<sup>14</sup> Lihat tulisannya Edward Aspinall "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?", *Policy Studies 20*, East-West Center, Washington

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nurdin

<sup>16</sup> wawancara dengan Sidney Jones

<sup>17</sup> wawancara dengan juha Christensen

<sup>18</sup> Wawancara dengan Faye Balnis

Pelepasan tersebut dipimpin oleh panglima KODAM Iskandar Muda, dendam karena orang tua mereka dibunuh oleh mayor jenderal Supiadin AS, dan dihadiri ketua AMM Pieter Feith ser-penderitaan yang berkepanjangan, akibat adanya intin ta pelaksana harian Senior representative pemerintah RI Mayor Jen-lahirkan rasa benci terhadap TNI, atau akibat lingkun deral Bambang Dharmono dan Senior Representative GAM Irwandi yang pengaruh teman. Semakin mereka dihabisi oleh Yusuf.<sup>48</sup> Jumlah keseluruhan TNI non-organik yang direlokasi dalam banyak orang dendam dan akibatnya, semakin besar empat tahap adalah 25.890 personel, dan jumlah polisi non-organik hadap GAM atau dikenal istilah “gugur satu tumbuh ser sebanyak 5.791 personel.

**Tabel 3.**  
**Statistik Penarikan Pasukan Non-organik TNI/POLRI**  
**(diperbaharui 13 Januari 2006)**

Stage	TNI	POLRI	Total
I (September '05)	6.671	1.300	7.971
II (Oktober '05)	6.097	1.050	7.147
III (November '05)	5.596	1.350	6.964
IV (Desember '05)	7.628	2.150	9.778
<b>T o t a l</b>	<b>25.890</b>	<b>5.791</b>	<b>31.681</b>

Sumber: [http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter\\_menu/decom.htm](http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/decom.htm)

### 3. Amnesti

Paling lambat 15 hari setelah MoU ditandatangani, pemerintah diwajibkan memberikan amnesty kepada anggota GAM. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presidenal Nomor 22 Tahun 2005 tentang Amnesti dan Abolisi untuk Gerakan Aceh Merdeka pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2005.

Menurut Pemerintah, sekitar 1877 GAM yang menjadi tahanan atau narapidana akan diberikan amnesty. Dari sejumlah orang tersebut, 1.405 terdiri dari 1.219 narapidana dan 186 tahanan yang berada di Aceh. Sisanya adalah narapidana yang ditahan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP) di luar Aceh, seperti di Bengkulu (3 orang), LP Sukamiskin Jawa Barat (74 orang), Jawa Barat (224 orang) dan Jawa Timur (171 orang).<sup>49</sup> Mayoritas diantara mereka divonis sampai 16 tahun. Pemerintah juga secara otomatis memberikan amnesty kepada semua anggota GAM lain yang berada di berbagai lokasi di luar tahanan.

Berapa tepatnya jumlah tahanan GAM tidak pasti. Jika memegang klaim TNI, setahun setelah diberlakukannya darurat militer

Ketidakmampuan TNI dalam memenangkan seluruh ran dengan GAM, menyiratkan perlunya *comprehensive* termasuk dilakukannya kembali perundingan.<sup>9</sup>

### 3. Tsunami?

Banyak pengamat menyatakan bahwa tsunami 2004 yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas utama mengapa GAM dan RI bersedia berunding kembali gagal sebelumnya. Beberapa orang GAM sendiri men tersebut.<sup>10</sup> Pihak yang dekat dengan GAM mengakui yang dialami akibat bencana tsunami, selain perang ya selama bertahun-tahun, merupakan faktor penentu ya GAM untuk mengakhiri konflik tersebut.<sup>11</sup> Bahkan tsunami digunakan sebagai alasan utama mengapa GAM be berunding dengan RI.

Tragedi tsunami menjadikan Aceh sebagai fokus kembali membuka kemungkinan penyelesaian konflik damai.<sup>12</sup> Nur Djuli dalam wawancaranya dengan penulis “Tiba-tiba tsunami melanda Aceh. Kami langsung mer kesampingkan semua pemikiran lain. Perang mesti di bantuanun dapat datang ke Aceh tanpa terganggu. Kami pikir lain selain keselamatan rakyat”.<sup>13</sup>

Alasan tersebut tidak dapat dipertahankan. Kita men bahwa tsunami menjadi faktor penentu kembali lihat dari fakta bahwa proses tersebut telah digagas da

<sup>9</sup> Edward Aspinall, “The Helsinki Agreement: A More Promising Aceh?”, *Policy Studies* 20, East-West Center, Washington, hlm.12

<sup>10</sup> salah satunya adalah Abror Muda, Mantan Panglima GAM W

Tuan Ketua KPA Tapak Tuan. Wawancara dengannya dilakukan di Banda Aceh Tanggal 13 Maret 2006

<sup>11</sup> Daniel Burdock, “Prospek Perdamaian” lihat [eye.org/data\\_files/bahasa\\_format/analysis\\_bhs/analysis\\_insideind](http://eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind)

flik dilanjutkan, mereka akan sukar memperoleh kemenangan. Kondisi di Aceh yang telah menawan 2000 anggota GAM,<sup>50</sup> maka si *hurting stalemate* muncul manakala kelompok-kelompok yang ber-lah tahanan GAM jauh melebihi 1877 orang sepe-  
tikai menemukan jalan buntu dan menghadapi ancaman yang lebih pemerintah melalui Hamid Awaludin. Tidak menutuy  
besar di masa yang akan datang.<sup>4</sup> apa yang dinyatakan TNI tersebut hanyalah klaim s

Secara halus, kondisi ini diakui sendiri oleh Bachtiar Abdullah, untuk melumpuhkan semangat juang GAM. Hal ini  
Juru bicara GAM. Ia menggunakan kalimat bersayap untuk menjelas-dengan tidak adanya data yang mendukung di lapang  
kan bagaimana keadaan GAM di lapangan dengan menyatakan bahwa pejuang tersebut semuanya berada di dalam tahanan.  
GAM kini lebih luwes dan melihat realita di lapangan. “Dalam pe- Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman di  
rundingan yang *fair* selalu ada yang namanya *take and give*. Konflik tanggal 15 agustus, 1.789 tahanan telah dibebaskan.  
30 tahun menyebabkan kehidupan rakyat Aceh makin sulit. Kesulitan telah dilepaskan pada tanggal 31 Agustus 2005 sebag  
itu makin menjadi-jadi setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsu-langsung dari pasal Nota Kesepahaman tentang amne  
nami, 26 Desember 2004. “Apa masa depan anak- anak Aceh kalaugal 17 Agustus 2005, selang 2 hari setelah penandat  
konflik ini terus berjalan. Apakah kita mesti terperangkap dalam kesepakatan Helsinki, 298 anggota GAM yang berada  
dendam dan kegeraman yang tiada habis-habisnya?” ujar Bachtiar pemerintah dibebaskan dalam hubungannya dengan  
Abdullah.<sup>5</sup> nesty tahunan dalam rangka Hari Kemerdekaan Indon  
suk para anggota GAM yang ditahan di dalam daerah  
dipindahkan ke rumah-rumah tahanan di Pulau Jawa

## 2. TNI dan kegagalan “memenangkan hati dan pikiran”

Kondisi *hurting stalemate* atau *battle fatigue* yang dialami yang cukup “menarik” pada saat pembebasan hendak  
GAM, tidak tercermin dalam diri TNI. Aspinall yakin bahwa *hurting* jadi keributan di sebuah rumah tahanan Jantho antara  
*stalemate* hanya ada dipihak gam saja.<sup>6</sup> TNI selalu siap untuksian dengan anggota GAM. Saat itu aparat kepolisian m  
melanjutkan peperangan dengan GAM di Aceh. Tetap kemenangan paksa anggota GAM untuk menurunkan atribut GAM b  
TNI secara militer tidak berarti ia mampu meraih kemenangan se- namun ditolak. Aparatpun kemudian mengeluarkan se  
luruhnya: hati dan pikiran. Operasi militer memang berhasil menekan den ini kemudian menimbulkan kekhawatiran diantar  
GAM, tetapi tidak berhasil dalam meraih simpati rakyat.<sup>7</sup> Loyalitas mengenai keselamatan mereka ketika keluar penjara.  
rakyat hanya terlihat dari luar saja, sementara hati mereka men-lagi, insiden ini justru terjadi ketika MoU baru dua  
dukung GAM, atau siang mendukung Indonesia, malam mendukung tangani.<sup>52</sup>  
GAM.<sup>8</sup>

Perdebatan yang muncul dalam persoalan ini a  
Pendekatan keamanan dan militeristik TNI dalam menghadapi inisian anggota GAM mana saja yang mendapat amnesti  
gejolak dan pemberontakan di Aceh telah melahirkan banyak pender-  
tua anggota GAM mendapat amnesti? Bagaimana bata  
itaan dan korban jiwa. Diantara anggota GAM memang terdapat tahanan ini secara teratur didiskusikan pada pertem  
orang-orang yang secara ideologis bergabung melakukan pemberon- antara kedua belah pihak pada COSA Meeting yang did  
takan. Tetapi jumlah mereka tidaklah banyak. Saat ini, mayoritas silitasi oleh AMM. Persoalan kunci pada kasus-kasus t  
anggota GAM adalah orang-orang yang bergabung akibat adanya rasa ketidaktentuan apakah mereka dituduh berhubungan  
GAM atau tidak. Hal ini terkait dengan laporan GAM y  
kan bahwa masih ada 91 anggotanya yang belum o  
penjara dan diberi amnesti. Menurut pemerintah, m

---

<sup>4</sup> Dean G. Pruitt. “The Tactics of Third-Party Intervention”, *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000), hlm.246

<sup>5</sup> www.kompas.com, Di Balik Proses Perdamaian Aceh, Updated: Selasa, 16 Agustus 2005, 07:55 WIB

<sup>6</sup> Edward Aspinall, “The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?”, *Policy Studies* 20, East-West Center, Washington, hlm.7

<sup>50</sup> Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of

lepas karena vonis pidana. saian konflik Aceh secara damai dan permanen

Menurut pemerintah, amnesty hanya akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam aktivitas politik saja. Amnesti tidak diberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau dipenjara karena kasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang anggota GAM itu dengan sikap pesimisme, penuh keraguan dan skeptis melakukan tindak pidana/criminal atau aktivitas politik sangat ka-bangsa Aceh terhadap perundingan tidaklah mengbur, dimana tindakan pidana bisa terjadi karena dorongan politik. mengherankan justru masyarakat Aceh masih dapat. Sebagai contoh, seorang anggota GAM melakukan pemerasan, pemerintah pusat. Sejak kemerdekaan, pemerintah rampokan atau penculikan mungkin didasari oleh motif politik agar berkali-kali mengkhianati janji yang hendak diberikan mereka mendapatkan uang atau keuntungan politik lain yang akan masyarakat Aceh, menyakiti jiwa dan raga, merendahkan dan digunakan untuk berjuang melawan pemerintah.

Salah sebuah contoh dari kasus yang dipermasalahkan yaitu diberikan kepercayaan mereka kepada pemerintah pusat kasus Teungku Ismuhadi bin Jafar, seorang mantan komandan GAM ketika mereka kembali kecewa seiring kegagalan H untuk daerah Jabotabek, yang saat ini sedang menjalani hukuman HA-nya yang kemudian diiringi status darurat militer seumur hidup di LP Cipinang, Jakarta atas tuduhan mendalangi lahirkan kesengsaraan. Iklim curiga atau rasa saling tidak pengeboman gedung Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 September 2000 menghinggapi pihak-pihak yang melakukan di 2000. Ismuhadi dan seorang pelaku pengeboman yang lain semula ti-prakarsai CMI akibat gagalnya proses pembicaraan tidak masuk dalam daftar yang menerima amnesti. Argumentasi sebelumnya yang diprakarsai HDC. Tetapi mengapa di pemerintah bahwa kasus tersebut adalah kasus kriminal ditinjau pesimisme yang menggunakan tersebut dialog berhasil oleh fakta bahwa selama proses persidangan, Ismuhadi terus meny-bahkan mampu melahirkan sebuah kesepakatan yang angka bahwa ia adalah anggota GAM. Para pemimpin GAM jugamaju, lebih komprehensif dan lebih menjanjikan diabaikan menyangkal tuduhan bahwa mereka terlibat, dan menyatakan bahwa lumnya?

mereka tidak pernah memperluas jangkauan perjuangan bersenjata mereka diluar Aceh. Namun setelah perjanjian damai ditandatangani, mereka berargumentasi bahwa pengadilan tidak berlaku adil dan informasi telah diambil paksa lewat penyiksaan.<sup>53</sup>

Banyak anggota GAM yang dilaporkan kecewa dengan ber-dorong mereka mau kembali terlibat dialog adalah bat lanjutnya penahanan rekan-rekan mereka. Seorang anggota GAM dikelelahan dari pihak GAM untuk tetap melanjutkan Bireun mengatakan rasa kecewa tersebut dapat mendorong mereka dengan TNI.<sup>2</sup> Sebenarnya, sejak masa DOM berlaku, melakukan tindak kriminal seperti yang terjadi di Dumai, propinsi sudah sangat kecil. Tetapi mereka mampu melakukan Riau pada tanggal 22 Oktober 2005, ketika lima orang bersenjata me-koordinasi ketika Soeharto jatuh dan isu referendum menyerang ke dalam penjara dan membebaskan dua orang anggota GAM, mun ketika darurat militer kembali di perlakukan di Aceh yaitu Taufik Ismail dan Samirun Fuadi. Dalam aksi pengejaran, Fuadi ter GAM kembali tersudutkan. Dalam banyak peperangan mencoba melemparkan granat ke arah polisi, tetapi ia kemudiankalah oleh TNI. Beberapa kekalahan tersebut tertembak dan tewas. Polisi berhasil menangkap salah seorang dari keruntuhan semangat dan moral perjuangan GAM.<sup>3</sup> lima penyerang, tetapi yang lain, termasuk Taufik, berhasil melarikan GAM mengalami situasi *hurting stalemate*, kejenuhan diri. Kapolresta Dumai mengatakan bahwa para penyerang bersenjata dalam melakukan peperangan. Dalam situasi seperti ini tersebut berasal dari Aceh, tetapi tidak jelas apakah mereka anggota GAM atau bukan. Salah seorang dari dua tahanan yang dibebaskan ti-

# Peran CMI dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh

## A. Pendahuluan

**K**egagalan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostility Agreement* (CoHA) yang diprakarsai *Henry Dunant Centre* (HDC), yang dilakukan semasa Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian dilanjutkan masa Megawati melahirkan pesimisme di berbagai kalangan mengenai penyelesaian konflik di Aceh secara damai. Setahun kemudian, TNI mengkalim telah membunuh 2000 anggota GAM, menahan 2100 orang dan sekita 1300 orang menyerahkan diri dan ada ratusan warga sipil tewas, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa menungsi.<sup>1</sup>

Kendati demikian, upaya penyelesaian konflik Aceh melalui dialog tidak pernah surut dilakukan. Pada akhirnya, pihak yang terlibat konflik di Aceh bersedia maju kembali ke perundingan untuk membicarakan dan menyelesaikan Aceh secara damai dengan melalui perantara atau jasa pihak ketiga, yaitu *Crisis Management Initiative* (CMI). Berbagai kegagalan yang pernah terjadi periode HDC merupakan pelajaran berharga yang bisa diantisipasi oleh aktor resolusi konflik berikutnya. Pengalaman dan sejarah itulah yang kemudian dipelajari secara mendalam oleh (CMI) ketika memfasilitasi kembali

tidak termasuk dalam daftar anggota GAM yang ditahan, disiapkan oleh pemerintah maupun yang disiapkan oleh juru runding GAM, M Nur Djuli, menyebut kejadian tersebut insiden kriminal murni, dan tidak ada hubungannya dengan rena menurutnya, sudah tidak ada lagi anggota GAM yang ditahan.

Untuk menyelesaikan beberapa kasus, AMM proses pembahasan terkait perbedaan persepsi antara pemerintah dan GAM tentang status tahanan dengan mendatangkan pakar hukum internasional seperti Profesor Dr. Kim Swedia yang berpengalaman secara internasional dalam menangani persoalan-persoalan amnesty.<sup>55</sup>

## 4. Reintegrasi GAM

Setelah mendapat amnesty dan bebas dari penjara, mantan anggota GAM kemudian diberi dana jatah hidup dan dipulangkan ke Aceh bagi sebagian mantan tahanan yang ditahan di luar Aceh. Tidak semua mantan tahanan atau narapidanan GAM yang mendapat amnesty kembali ke Aceh. Sebagian ada juga yang ingin pindah ke daerah lain, seperti di kota-kota Pulau Jawa.<sup>56</sup>

Setelah pulang ke Aceh, mereka diharapkan dapat berintegrasi serta menjalani hidup layaknya warga masyarakat. Untuk memperlancar proses tersebut, pemerintah diharapkan memberikan bantuan berupa jatah hidup, lahan pertanian, dan pelatihan bagi para mantan anggota GAM, serta memfasilitasi dalam pencarian pekerjaan seperti yang tertuang dalam butir/artikel 3.2.3 – 3.2.5. Pemerintah kemudian memfasilitasi reintegrasi, untuk jatah hidup, setiap mantan anggota GAM Rp.5000,- per hari selama tiga sampai enam bulan. Dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan dari donator. Dana sejumlah itu sama besarnya dengan yang diberikan kepada masyarakat korban bencana tsunami. Untuk bantuan lahan pertanian, tiap mantan anggota GAM akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar. Untuk yang tidak setidaknyanya dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektar.

Menurut Jusuf Kalla, pemberian kompensasi lahan 40.000 hektar untuk GAM masih dalam batas kewajaran. Pemerintah adalah orang yang baru turun gunung, tidak menyalahkan dan pekerjaan. Sementara untuk warga, pemerintah

memberikannya dalam program transmigrasi yang jumlahnya akan dilaksanakan tugasnya. Terlalu sombong untuk mencapai puluhan ribu hektar dan biaya trilyunan rupiah.<sup>57</sup> hasil secara total. Tetapi juga terlalu merendahkan

Fasilitasi ekonomi dalam MoU adalah untuk mantan prajurit, takan AMM telah gagal melaksanakan tugasnya hanya tahanan yang mendapat pengampunan dan masyarakat sipil yang terpa kegagalan yang ada. Terlepas dari beberapa kekurangan dampak. Dana reintegrasi akan diatur dalam kewenangan administrasi AMM merupakan salah satu kunci penting bagi bernistrasi Aceh. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memmentasi damai di Aceh.

berikan fasilitasi ekonomi untuk mantan anggota GAM, sementara GAM akan menghentikan pergerakan 3000 anggotanya. Pendistribusian tahap pertama sebesar Rp. 1 juta /orang untuk 3000 mantan anggota GAM telah selesai pada tanggal 12 Oktober 2005, sedangkan tahap kedua selesai pada tanggal 18 November 2005. Lembaga *International Organization for Migration (IOM)* telah memberikan dan mendistribusikan paket awal reintegrasi untuk mantan tahanan, terdiri dari uang Rp. 2 juta dan sejumlah paket barang pribadi. Bantuan ini diberikan kepada tahanan GAM pada saat keluar dari penjara. Dalam ketentuan reintegrasi, paket tambahan senilai Rp.1,5 juta akan diberikan setelah 90 hari dan 135 hari.<sup>58</sup>



Selain itu, kompensasi yang diberikan pemerintah kepada GAM dinilai tidak adil. Ada tuntutan agar kompensasi tidak hanya diberikan kepada GAM, tetapi juga pada warga lain yang justeru kerap menjadi korban konflik. Riswanda Imawan dari UGM menilai kompensasi untuk GAM terlalu besar, sementara untuk TNI/POLRI sangat minim.<sup>59</sup>

Proses reintegrasi ini bukan perkara mudah bagi anggota GAM ataupun bagi warga yang menerimanya. Masyarakat mempertanyakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi anggota GAM yang turun gunung dan masyarakat yang menerimanya. Proses integrasi GAM dalam masyarakat majemuk seperti di Aceh memang rumit. Tidak semua warga dan daerah di Aceh dengan begitu mudah mau menerima dan berintegrasi kembali dengan para mantan GAM, terutama di beberapa daerah yang memiliki sejarah atau basis perlawanan yang kuat terhadap GAM seperti di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yaitu Front Pembela Merah Putih (FPMP), yang dipimpin oleh Misriadi, seorang petani kopi. Diperkirakan anggota GAM yang memiliki sejarah konfrontasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah akan sulit kembali bergabung dengan masyarakat yang sering menjadi korban konflik. Salah seorang tokoh FPMP, Safrisayah alias Buyung, mengatakan bahwa FPMP memiliki sekitar enam anggotanya di setiap desa, dan mereka dalam keadaan siaga apabila proses



AMM tidak dapat berbuat apa-apa. Ini karena AMM tidak bisa menang perdamaian dengan para anggota GAM, yang secara substansial melanggar MoU. "Meskipun persoalan ini diterima dengan baik kembalinya delapan belas anggota dibawa ke *despute settlement* yang ada di MoU, bahkan sampai pada ke tengah masyarakat mereka, pada waktu perjanjian *Chairman of CMI* sekalipun, mereka tidak akan bisa mengintervensi datangnya.<sup>60</sup> system hukum Indonesia" kata Mayjen Bambang Dharmono.<sup>134</sup> Ini karena Pembahasan undang-undang secara politis merupakan tanggungan Perlawanan Separatis GAM justru mengaku sulit untuk menjawab pemerintah Indonesia. AMM sendiri tidak mampu menekan pihak-pihak dengan GAM. Mereka akan cepat berbalik jika berpihak pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan pembahasan mantan anggota GAM. Bahkan Sofyan Ali, pemimpin UUPA sesuai waktunya. Keterlambatan tersebut mengakibatkan menolak undangan untuk membuka puasa di markas penyelenggaraan pilkada di Aceh terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan dengan Darwis Jeunib, komandan GAM. "Saatnya bertemu dengan pemimpin gerilya", katanya.<sup>61</sup>

## F. Kesimpulan

AMM memainkan peran yang sangat penting bagi proses implementasi damai di Aceh. Keberhasilan AMM ditunjang oleh kuatnya *back up* negara dan organisasi regional, dalam hal ini Uni Eropa dan anggota GAM di kecamatan Nisam, tetapi berhasil ASEAN. Tanpa Uni Eropa di belakangnya, sangat sukar bagi AMM untuk dapat secara maksimal memainkan perannya tersebut. Ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh HDC yang hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik sebagai lembaga monitoring dalam *Joint Security Committee* (JSC). Faktor ASEAN dan Eropa merupakan kunci utama dibalik keberhasilan peran AMM, karena dari negara-negara Eropa-lah (baik secara individu maupun melalui organisasi) dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dan konflik mengalir. Pengabaian terhadapnya akan berpengaruh pada kelancaran aliran dana tersebut.

Tetapi beberapa keberhasilan tersebut bukan tanpa permasalahan. Dalam beberapa kasus, AMM nampak pasif dan secara politis terkesan berat sebelah atau menekan, seperti dalam kasus persahabatan. Namun para mantan anggota GAM menaruh kecurigaan terhadap pihak GAM terhadap UUPA. AMM menyerahkan kasus tersebut kepada Mahkamah Konstitusi jika terdapat komplain. Tentu saja hal ini melahirkan pertanyaan karena Mahkamah Konstitusi sendiri adalah bagian dari pemerintahan Indonesia.

Dari beberapa kasus yang dijelaskan dalam penelitian ini, nampak bahwa peran AMM tidak mampu seratus persen bertindak fair dan mampu memutuskan persoalan dengan cepat, baik dan memuaskan. Tetapi sangat tidak bijak jika menjadikan sedikit kegagalan itu untuk menilai bahwa secara keseluruhan AMM telah gagal

Yusuf, Perwakilan senior GAM di AMM, sejak penandatanganan MoU, pa- Penyaluran dana reintegrasi merupakan perso- jak nanggroe telah dihapuskan dan siapapun yang masih memungut sensitif. Selain banyak keterlambatan, penyaluran da- pajak tak resmi, berarti ia telah melakukan tindak kriminal dan harus tersebut banyak mengalami penyimpangan. Dana yang dilaporkan kepada AMM, katanya.<sup>65</sup> terima penuh oleh para mantan anggota GAM, terny-

Konflik antara mantan GAM dan kelompok pro integrasi me-ri-ma 25-30% saja. Persoalan ini dapat menimbulkan mang dapat menjadi sebuah kendala. Tetapi dalam konteks ini, itu kekecewaan dan pembelotan para anggota GAM bukalah sebuah permasalahan besar. Masalah terbesar yang sejauh mengangkat senjata. Disisi lain, para mantan anggota ini timbul dalam proses reintegrasi lebih kepada masalah teknis se- saja sangat berharap terhadap dana reintegrasi ini ka- perti: bagaimana cara yang paling baik untuk menyalurkan bantuandiantara mereka belum memiliki pekerjaan. Pengangg- dana kepada mantan gerilyawan agar mereka dapat memulai skill kemiliteran yang dimiliki sebelumnya serta mas- kehidupan sipil mereka.<sup>66</sup> Kendati teknis, sangat sarat dengan muatan senjata yang beredar menjadikan ancaman bagi me- politis. Jika diserahkan pada pemerintah, GAM khawatir list nama pe- minalitas. Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen menerima dana reintegrasi akan dimanfaatkan oleh TNI untuk melaku- Kasman, mengatakan, aksi kriminalitas pasca-penanda- kan intimidasi atau tindak kekerasan lainnya. Tetapi jika diserahkan Kesepakatan damai meningkat drastis hingga 372% pada GAM, pemerintah khawatir dana tersebut akan digunakan diluar apakah data ini valid, atau sekedar alasan polisi ag- tujuan atau disalah gunakan GAM untuk tujuan tertentu.<sup>67</sup> menambah jumlah aparat keamanan di Aceh

MoU memang mensyaratkan adanya dana reintegrasi tersebut. peningkatan angka kriminal. Pangdam Supiadin send- Tetapi ia tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana ban- masih banyaknya senjata yang beredar di tangan ka- tuan reintegrasi diberikan. Jalan keluar yang diambil kemudian ada- Tidak jelas siapa yang disebut kaum kriminal terseb- lah pemerintah, donor dan organisasi internasional menyusun sebuah diran Kapolda dan Pangdam tersebut nampaknya dit- mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, yaitu GAM. Berbeda dengan angka kriminalitas, angka a- keamanan bagi GAM, transparansi bagi TNI dan pertanggungjawaba- ban bagi para donor oleh yang dibahas dalam pertemuan Komisiteror, penembakan, dan kontak tembak menurun s- Pengaturan Keamanan (COSA) pada tanggal 1 Oktober 2005, yaitu konflik GAM-TNI menurun<sup>133</sup> sehingga anka k- dengan cara membayarkan sejumlah dana kepada komandan GAM dipelanggaran HAM sendiri otomatis turun. Untuk per- setiap wilayah, berdasarkan penghitungan jumlah anggota GAM yang langgaran hak asasi manusia, peran AMM sangat do- akan didemobilisasi di wilayahnya. Kemudian para komandan yang masih terjadi beberapa insiden, perbandingan angka- bertanggung jawab untuk menyalurkan dana bantuan kepada masing- sudah MoU Helsinki yang dibuat Kontras (lihat tabel 5- masing anggotanya.<sup>68</sup> situasi yang lebih baik dibanding sebelumnya, ya-

Dana integrasi tahap pertama senilai 1 juta per orang telah di- darurat militer yang menurut Huber menewaskan rik- bagikan kepada 3000 orang eks TNA sebanyak tiga klai dengan total memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi. nilai 9 miliar.<sup>69</sup> Dalam proses reintegrasi ini, pemerintah lebih ba- Dalam proses penyusunan Undang-undang Pem- nyak memainkan perannya dibanding AMM. AMM hanya terlibat pada AMM hanya berupaya aktif mendorong dan memfasilit- pembebasan para tahanan GAM. AMM juga mendorong pemerintah pihak dan masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dala- untuk menyiapkan infrastruktur untuk proses reintegrasi, salah musan draft yang akan disampaikan kepada Pemerinta- satunya adalah dengan membentuk Badan Reintegrasi Damai Aceh dian diajukan menjadi Rancangan Undang-undang di I (BRDA) pada tanggal..... melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh ran itu cenderung pasif. AMM hanya dapat menerima l- tan dan menyampaikannya kepada pihak Indonesia.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> ICG "Aceh So far So Good", No.44, 13 Desember 2005, hlm.5

tujuannya Aceh merdeka.<sup>126</sup> Demikian juga dalam tugasnya memoni-Musadalaam, yang bertugas untuk membantu pemerintah *redeployment* aparat TNI dan Polri. Keberhasilan AMM karena TNI ses reintegrasi para mantan anggota GAM. sendiri secara tegas mendukung perdamaian tersebut<sup>127</sup> setelah se- Peran aktif pemerintah dalam proses ini, selain- kian lama ternyata tidak mampu menumpas pemberontakan dan untuk menunjukkan komitmennya kepada perjanjian- perlawanan yang terjadi kendati mampu mengalahkan GAM. Keti-untuk meraih kredit poin dari masyarakat Aceh khu- dakmampuan TNI tersebut menyiratkan perlunya *comprehensive* pelaksanaannya, terjadi banyak kesulitan. Peran A- *measures*, termasuk dilakukannya kembali perundingan.<sup>128</sup> terlihat sangat efektif dalam proses reintegrasi ini den-

Tetapi dalam kasus perlucutan senjata, keberhasilan AMM wawancara terhadap lebih dari 500 responden man- patut dipertanyakan mengingat pernyataan Zakaria Saman alias Ka-GAM. Dari hasil wawancara tersebut kemudian AMM- rim Bangkok mengindikasikan bahwa GAM masih memiliki senjata spektif dan pemahaman yang lebih baik mengenai- yang belum diserahkan pada AMM untuk dimusnahkan. Ia bersikeras dana dalam memilih dan menentukan mana yang- GAM hanya akan menyerahkan 840 senjata seperti kesepakatan disupport dan mana yang tidak.<sup>70</sup> Dalam prakteknya, penyaluran dana bantuan re- dalam MoU dan tidak perlu menyerahkan senjata lebih banyak lagi- Dari apa yang telah dilakukan GAM.<sup>129</sup> Dugaan ini bukan tanpa alasan. berjalan lancar. Banyak kekecewaan yang disampaikan- Terkait dengan kekecewaan beberapa mantan anggota GAM terhadap AMM. Husaini, Panglima Wilayah/Ketua KPA Batee 1- ketidakadilan dalam penyaluran dana integrasi, salam seorang ang- sudah dijanjikan oleh Pemerintah RI belum pernah- gota GAM menyatakan: "Kami masih punya banyak senjata yang bisa Kekecewaan lain disampaikan oleh Tengku Yahya- kami pakai tanpa perlu ijin dari komandan kami", kata salah seorang mantan TNA. Ia mengaku tidak mendapatkan sepeser- anggota GAM.<sup>130</sup> juta yang telah dijanjikan. Padahal Yahya harus bekerj-

Untuk amnesti, besarnya peran AMM terlihat menyelesaikan membuka jalan di hutan untuk mendapatkan dana rein- perdebatan perdebatan mengenai status tahanan GAM yang ditahan rinya dan para anak buahnya. Rencananya dana itu a- atas tuduhan tindakan pidana dengan mendatangkan seorang ma- oleh Yahya dan anak buahnya untuk mengelola hutan s- natan hakim dari Swedia yang memiliki pengalaman internasional. tare. Faktanya janji itu omong kosong. "Mimpilah," kat- Tetapi pelaksanaan amnesti ini sangat terlambat. Dalam MoU butir Tim Pengawas Pelaksana Nota Kesepahaman I- 3.1.1. disebutkan bahwa Pemerintah RI harus sesegera mungkin adanya indikasi pihak penerima dana reintegrasi t- memberikan amnesti kepada semua GAM tidak lewat dari 15 hari dana secara utuh. Dana yang seharusnya diterima 1- sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Dalam kenyataannya, hanya diterima 200.000 per orang.<sup>73</sup> Pihak penyal- tenggat waktu tersebut tidak bisa dicapai oleh AMM. Hampir satu ta- sebagian dana yang "hilang" tersebut disalurkan un- hun MoU, sekitar 43 tahanan GAM di Sumatera Utara baru dibebas- Padahal dalam ketentuan sebelumnya telah dise- kan, sementara 14 orang lagi masih tertahan.<sup>131</sup> kelompok sipil yang terkena dampak konflik juga mer-

---

<sup>126</sup> lihat tulisannya Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?", *Policy Studies 20*, East-West Center, Washington, hlm.7, Daniel Burdock, "Prospek Perdamaian" lihat [http://www.acheh-eye.org/data\\_files/bahasa\\_format/analysis\\_bhs/analysis\\_insideind/analysis\\_insideind\\_2006/analysis\\_insideind\\_2006\\_04\\_06\\_01.html](http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_01.html)

<sup>127</sup> Pernyataan Panglima TNI Endriartono, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), "TNI Dukung Perundingan di Helsinki", Updated: Rabu, 13 April 2005, 02:43 WIB

<sup>128</sup> Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?", *Policy Studies 20*, East-West Center, Washington, hlm.12

---

<sup>70</sup> Giovanni Grevi, "The Aceh Monitoring Mission; Toward Integ-

<sup>71</sup> Wawancara dengan Husaini, Panglima Wilayah/Ketua KPA B

GAM di daerah itu merasa tidak menerima sekitar Rp 300,000 dari jumlah mampu mendorong pihak yang berkonflik untuk men- Rp 1,000,000 yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Di Bireun dana pemecahan masalah yang dihadapinya.<sup>121</sup> Apabila seta bantuan dialokasikan untuk 333 GAM. Geulanggang memperkirakan konflik justru meningkat, AMM dapat dikatakan gagal bahwa mungkin sebenarnya ada lebih dari 3,000 anggota pasukan Menurut Aspinal, selalu ada walau kecil. Tetapi kemur dan pendukung GAM.<sup>74</sup> Sementara itu, berdasarkan laporan yang dite- jian akan berhasil mutlak juga sangat kecil. Aspiri rima *crisis group* dari sebuah sumber yang dekat dengan GAM, alasan contoh perjanjian damai di Irlandia Utara dan Sri berkurangnya dana reintegrasi tersebut merupakan sebuah strategi setelah tercapai suatu pemecahan yang dramatis agar GAM dapat mempertahankan rantai komando mereka.<sup>75</sup> mandegan, kemerosotan dan faksionalisme, walaupun

Pilihan GAM ini bukan tanpa resiko. Kekecewaan akibat tidak luruhan proses tersebut tidak runtuh. “Kadang-kala pe sampainya dana reintegrasi secara penuh adalah ketidakpuasan dan juga menghilang apabila ada pemecahan dan penggo kekecewaan para anggota GAM terhadap pimpinannya sendiri. Kon- di kedua belah pihak. Kadang-kadang mantan pembe disi tersebut dapat memperlemah loyalitas mereka. Seorang mantan tujuan perjuangan tidak terwujud dan ingin kembali b pasukan GAM di Aceh Utara mengeluh bahwa dana reintegrasi hanya senjata. Di antara angkatan bersenjata dan sekutunya, menjangkau anggota GAM yang berasal dari kalangan dekat koman- sebagian yang ingin melanjutkan peperangan yang kot dan. Ia mengatakan bahwa para anggota senior GAM sekarang meny- Untuk itu, AMM perlu mendorong kedua pihak etir mobil dan memiliki handphone mahal. Pada saat anggota pasukan melakukan dialog dan mendiskusikan setiap per GAM tidak memiliki pekerjaan, dan bantuan keuangan dari organisasi mengeliminasi potensi konflik diantara mereka. AMM telah berkurang, jika ada pembagian uang yang tidak adil dapat me- sebuah program sistematis yang kelak pelaksanaan nyebabkan perselisihan dan pada akhirnya dapat memicu kriminali- seperti oleh Badan Rekonstruksi Damai Aceh (BRDA). tas paska konflik. “Kami masih punya banyak senjata yang bisa kami sudah bisa mendiskusikan hal-hal sensitive diantara pakai tanpa perlu ijin dari komandan kami”, kata salah seorang ang- peran pihak ketiga secara berangsur tidak diperlukan l gota GAM.<sup>76</sup> Kendati dianggap berhasil, AMM secara politik

Akibat adanya indikasi tidak sampai secara utuh tersebut, melakukan beberapa aksi yang tidak baik, seperti me pemerintah menyetopnya sampai pertanggungjawaban administratif sebagainya. “Kami juga merasakan beberapa tekanan d dapat diselesaikan.<sup>77</sup> Setelah masalah tersebut dapat diatasi, melakukan beberapa hal terhadap anggota kami di lap pemerintah kembali menyalurkan dana sebesar Rp 593,8 miliar pada dak tahu apakah mereka juga menekan Indonesia at akhir Juli 2006. Sejumlah Rp 540,4 miliar diantaranya, disalurkan Nur Djuli, salah seorang perunding GAM.<sup>125</sup> untuk “Bantuan Pemberdayaan Ekonomi, Bantuan & Santunan Sosial.” Dalam kasus *demobilisasi* dan *decommissioning* Sisanya digunakan untuk kegiatan monitoring evaluasi, pembahasan AMM dapat berjalan mulus. Mudahnya proses tersele petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.<sup>78</sup> bukan mutlak karena upaya AMM, melainkan karena

Humas BRA, Fakrizal menyebutkan, total anggaran reintegrasi sendiri yang terlihat sudah merasa lelah dan jenuh untuk Aceh tahun 2006 adalah Rp 593.836.037.000. Dari jumlah itu, terus menerus atau menemui jalan buntu dalam pro sejumlah Rp 540.493.450.000 digunakan untuk Bantuan Pember- dayaan Ekonomi dan Bantuan & Santunan Sosial. Untuk bantuan pemberdayaan ekonomi, penerima terbagi dalam tiga kelompok

<sup>74</sup> ICG “Aceh So far So Good”, No.44, 13 Desember 2005, hlm.6

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Op.Cit.*, hlm.7

<sup>77</sup> Dana

Reintegrasi

tak

Diterima

Penuh,

dalam rinya, tanggal 7 April 2006

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ahmad Humam Hamid, Ketua badan Pe- Forum tanggal 6 April 2006

<sup>122</sup> Edward Aspinall, “Pada Akhirnya Perdamaian [http://www.acheh-eye.org/data\\_files/bahasa\\_format/analysis\\_bhs/analysis\\_insideind/\\_2005/analysis\\_insideind\\_2005\\_08\\_00\\_01.html](http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/_2005/analysis_insideind_2005_08_00_01.html)

<sup>123</sup> Wawancara dengan staf AMM yang lain yang juga minta d

mengenai standar penghormatan internasional terhadap hak asasi manusia, mantan TNA sebanyak 2.000 orang, yang manusia. Disamping itu, kehadiran AMM sebagai tim monitoring in-Rp 25 juta/orang. Mantan tahanan politik (Tapol) s ternasional, sedikit banyak mendorong kedua belah pihak untuk orang, masing-masing mendapat Rp 10 juta. Serta mas saling menahan diri dari kegiatan yang bisa dianggap melanggar konflik yang akan mendapat Rp 10 juta per orang. kaidah HAM, yang selama masa konflik kerap mereka lakukan.

### E. Evaluasi Kinerja AMM

Harus diakui bahwa peran AMM dalam memonitor jalannya nyerah sebelum MoU dan siap untuk dibina 1.000 kesepakatan damai sangat besar. Atas keberhasilan itu, Pemerintah PETA (Pembela Tanah Air) 3.000 orang, dan masyarakat Indonesia memberikan penghargaan kepada Ketua dan beberapa ang- flik lainnya sebanyak 21.500 orang. Sementara untu gota AMM yang dinilai berjasa besar, yaitu ketua AMM Pieter Feith Santunan Sosial” akan disalurkan kepada tiga kelomp yang dianugerahi Medali Bintang Jasa Utama, Mantan wakil Ketua penerima manfaat yaitu, diyat sebanyak 19.597 AMM, Letjen Nipat Thongklek dari Thailand dan Penasehat AMM Juha mendapat Rp 3 juta/orang, cacat korban konflik 2.00 Christensen dari Finlandia yang mendapat penghargaan Bintang Jasa juta/orang, rumah yang dibakar/dirusak sebanyak 1.7 Pratama. Penghargaan diberikan sebagai ucapan terima kasih atas nilai Rp 35 juta/unit rumah (tipe 36), serta untuk ban upaya mereka yang telah mendukung terciptanya perdamaian di (1 paket), sebesar Rp 5 miliar.<sup>79</sup> Aceh. Penghargaan diberikan oleh Presiden SBY pada hari Jumat Masalah utama reintegrasi GAM, adalah pekerja tanggal 18 Agustus 2006 di Istana Merdeka.<sup>120</sup> antara mereka yang tidak memilikinya. Keterlambatan

Hasil kerja AMM yang pada umumnya cukup baik, telah mem- sangat berdampak dalam kehidupan sosial mereka. Ji buat banyak warga Aceh menginginkan agar masa tugas AMM di per- tidak segera diselesaikan, bahaya dalam jangka pa panjang dari masa tugas enam bulan yang sebelumnya sampai selesai para mantan pasukan yang bosan atau menganggur pilkada yaitu desember 2006. Kunci keberhasilan AMM sendiri adalah berpaling ke tindak kriminal atau mencoba untuk b komposisi anggota-anggotanya yang merupakan representasi dari bali.<sup>80</sup> Kekhawatiran tersebut bukan isapan jempol dua organisasi regional yang sangat kredibel dan berpengaruh, baik bagi GAM maupun bagi pemerintah RI, yaitu Uni Eropa dan ASEAN. saat ini, kriminalitas di Aceh meningkat. Sejumlah o Pembangkangan terhadap segala kesepakatan akan mengakibatkan tergabung dalam Komite Kerja Aceh Damai Tanpa Kek setiap pihak yang melakukannya mendapat sanksi internasional yang bas Korupsi seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH tegas baik secara ekonomi maupun politik. Jika Pemerintah Indonesia KMPD, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Keker melanggar, maka ia akan kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari Aceh, dan Gerakan Anti Korupsi (GeRak) Aceh menyena negara-negara donor dalam melakukan rehabilitasi Aceh pasca Reintegrasi Aceh pasca perdamaian, telah gagal bencana, dan secara politis akan mendelegitimasi peran-peran Indo- nyebabkan angka kriminalitas seperti perampokan nesia dalam percaturan politik Internasional. Sedangkan bagi GAM meningkat.<sup>81</sup> pelanggaran berarti hilangnya dukungan Eropa yang selama ini ban- yak menopangnya, seperti pemberian suaka kepada para anggota 5. Undang-undang Pemerintahan Aceh Wewenang yang diberikan kepada AMM dalam memantau proses perubahan perundang-undangan,

Yang menjadi kekhawatiran adalah, mampukah situasi ini di- pertahankan setelah AMM meninggalkan Aceh? Menurut Ahmad Hu- mam Hamid, Ketua badan Pekerja Aceh Recovery Forum, Keefektifan <http://serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&rubrik=1&top> peran suatu pihak ketiga ditunjukkan dengan sejauhmana mereka <sup>973</sup>

bahan perundang-undangan yang memungkinkan kedua belah pihakional, AMM menulainya sebagai peristiwa kriminal untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan damai yang telah merespon keputusan AMM, GAM tidak begitu mem ditandatangani. Pemerintah Indonesia menyiapkan suatu Undang-Representatif GAM di AMM, Irwandi Yusuf, hanya m sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan di Aceh pascayang langsung menembak pengemudi, bukan rodanya penandatanganan nota kesepahaman. Banyak aktivis Aceh serta pihak nurutnya, kendaraan itu tidak dicuri melainkan dipinjam lain yang terlibat dalam proses perancangan undang-undang baru te- Insiden Peudawa, Aceh Timur, terjadi pada tanglah beberapa kali berkunjung ke Jakarta dalam rangka meminta 2005, setelah tiga orang anggota GAM yang mengedukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil serta melobi para sepeda motor melanggar peraturan lalu lintas ketika s pembuat undang-undang di DPR agar sesuai dengan harapan rakyat sebuah pos TNI. Menurut peraturan lalu lintas, sepeda Aceh dan tidak melanggar isi MoU. berboncengan lebih dari dua orang, dan TNI mengh

UUPA ini dimaksudkan untuk mengganti UU Otonomi Khusus untuk kemudian diinterogasi. Ketika beberapa anggota tahun 2001, yang mewakili posisi konsensus masyarakat Aceh. Pada mendengar bahwa mereka mendapat masalah, tanggal 5 Desember 2005, sebuah delegasi dari DPRD Aceh menyeta- tangi pos TNI tersebut, dan sebuah bentrokan terjadi rahkan salinan dari draf yang dihasilkan dari konsultasi yang luas anggota Kompi B Yonif 111 kemudian melakukan p dengan masyarakat Aceh yang berada di Aceh maupun yang berada diarah anggota GAM, melukai empat orang, dan seorang daerah lain di Indonesia, kepada Ketua DPR dan Ketua DPD. Proses kasus ini ketua AMM, Peter Feith, memutuskan bahw konsultasi atas draf ini bermula pada pertengahan bulan September, Keputusan bersalah ini didasarkan pada kesepakatan ketika Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Azwar Abubakar nya melakukan pertahanan defensif di pos-posnya mengundang tiga universitas di Banda Aceh untuk menyusun UU campur dalam soal ketertiban hukum yang menjadi t Otonomi versi mereka dengan mempertimbangkan ketentuan-perti halnya GAM, TNI pun tidak begitu memprotes ketentuan dalam perjanjian Helsinki. Ketiga Universitas ini adalah kecuali sekedar kritik dari Komandan Satgas Info Koo Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh dan IAIN Ar Raniry. kol Erie Soetiko, yang melihat keputusan AMM prem Setelah draf-draf ini digabungkan dan diolah menjadi sebuah doku-akurat. Sedangkan perwakilan TNI di AMM sendiri, M men, pjs Gubernur kemudian menyerahkan proses selanjutnya kepa- Darmono menerima keputusan tersebut.<sup>118</sup>

da DPRD, yang dibulan Oktober membentuk sebuah pansus yang Dalam kasus insiden penyerangan kantor SH beranggotakan delapan belas orang, untuk menyatukan dan memper- pada 17 Pebruari 2006 dan penculikan seorang bend baiki isi dokumen tersebut. Dibantu oleh beberapa ahli teknis dandi Desa Alue Leuhob, Cot Girek, Aceh Utara 24 Pebru dengan bantuan dana dari program Partnership for Governance Re-Indonesia menyatakan tidak terlibat dalam insiden itu form dari UNDP (United Nations Development Programme), panitia bukan oleh aparat keamanan. Dalam kasus ini, khusus tersebut terlibat dalam proses konsultasi hingga selama satu meminta Pemerintah untuk membubarkan kelompok il bulan, bersama dengan GAM, para tokoh agama, LSM, para dosen, dan paling lambat sebelum 15 Juni 2006.<sup>119</sup> Berdasarkan para anggota pemerintahan daerah. Draft akhir, yang berisi hingga AMM ini dapat dilihat bahwa pemerintah (TNI) mas 209 pasal, merupakan gabungan dari banyak dokumen yang disusun milisi sipil.

oleh GAM, masyarakat madani, dan kantor gubernur. Tengku Kama- Untuk semakin mengeliminasi berbagai pelang ruzzaman, ketua tim draf dari GAM, mengatakan GAM "tidak me-pihak AMM melakukan dialog dan berkomunikasi nyokong ataupun menolak" hasil terakhir draft, tetapi ini sudah "san- dengan berbagai pihak atau aparat yang berwenat gat (menampung) aspirasi rakyat"<sup>83</sup>. maupun militer, untuk meningkatkan kesadaran ata

Setelah melalui sebuah proses pembahasan dengan pengawasan yang cukup ketat dari wakil masyarakat aceh dari berbagai pihak (GAM, DPRD dan unsur LSM). UUPA akhirnya dapat

...dang hak asasi manusia. Pemerintahan Aceh (UUPA) dengan Nomor 11 tahun 2005.

Beberapa kasus atau insiden yang terjadi pasca penandatanganan kesepakatan damai dikaji oleh AMM dengan mempertimbangkan alasan kedua belah pihak dan hasil investigasi di lapangan. Kasus tersebut kemudian dibawa dalam pertemuan Komisi Pengaturan Kea-terhadap usulan Undang-undang yang diajukan oleh manan (COSA), baik pada level pusat maupun di level distrik. COSA mengusung spanduk yang antara lain tertulis 'Pemerici cukup efektif sebagai forum yang mengangkat persoalan bersamagan Mengkhianati Aspirasi Rakyat Aceh'.<sup>84</sup> sementara untuk diselesaikan secara bersama oleh pimpinan kedua belah pihak meminta pemerintah merivisi sejumlah pasal dalam Kantor-kantor distrik secara rutin melakukan investigasi terhadap dinilai tidak sesuai MoU. insiden-insiden seperti penggunaan kekuasaan yang berlebihan, Beberapa 4 pasal yang dipermasalahkan. Yang pemerasan, dan intimidasi. adalah adanya perbedaan antara MoU poin 1.1.2 b

Bentrok antara GAM dan TNI setelah perjanjian damai di-tandatangani tanggal 15 Agustus memang tidak dapat dihindari sera- islatif Indonesia dituntut untuk mendapat "persetuju tus persen. Selalu terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pi- latif dan Pemerintah Aceh dalam beberapa perkara. Se hak. Apabila terjadi insiden, sesuai MoU, kewajiban AMM adalah UUPA pasal 8, berubah menjadi menjadi "konsultasi". mengusut setiap insiden dan memutuskan siapa yang bersalah. Pasal 194 ayat 2 dalam UUPA, dijelaskan Walaupun sejauh ini kedua belah pihak belum ada yang merasa puas melaksanakan prinsip transparansi, Pemerintah dengan keputusan menggunakan auditor independen, diharuskan meng

Selama sekitar setahun pasca kesepakatan damai, *Crisis groupy* yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). mencatat setidaknya terjadi sembilan kali insiden tembak menembaklam MoU poin 1.3.8 disebutkan bahwa, auditor yang antara TNI dan GAM yang mengakibatkan dua orang tewas. Tetapi, lah auditor luar, dan tidak mengharuskan melalui BPK. tak satupun dari insiden tersebut begitu serius sehingga dapat Kemudian, dalam UUPA Pasal 228 ayat 1 disebut mengancam perdamaian. AMM, tetapi keduanya sepakat untuk mema- lan Hak Azasi Manusia (HAM) di Aceh hanya untuk me tuhi keputusan AMM.<sup>114</sup> Beberapa peristiwa yang cukup menonjolgaran HAM yang dilakukan setelah UUPA disahkan. Se adalah; Insiden Jeuram, insiden Peudawa, penculikan di Alue Leuhoblam MoU pasal 1.4.5 tidak disebutkan adanya pembata (Aceh Utara), dan penyerangan kantor Sentral Informasi Referendumerti tersebut dalam UUPA. Aceh (SIRA) di Blang Pidie.<sup>115</sup>

Insiden Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, terjadi 12 Oktober vensi langsung dari Pemerintah Pusat terhadap 2006. Seorang anggota GAM tewas tertembak ketika polisi mengambil Pemerintah Aceh. Bahkan, GAM menganggap Pasal 11 tindakan atas sebuah laporan bahwa sebuah kendaraan milik seorang trasi pasal-pasal 124.3, 142.1, 147, 154.6, 165.8, 213.3 karyawan PT Sucofindo, yaitu sebuah perusahaan Indonesia yang dan pasal 249. Sedangkan dalam MoU poin 1.1.2. but cukup besar, dicuri. Polisi berusaha untuk menghentikan sebuah mo- menyebutkan pemisahan wewenang antara pe bil yang berisi empat orang penumpang, tetapi mereka menolak pemerintah Aceh.

untuk memperlambat laju kendaraan dan baru berhenti ketika polisi Selain itu, pihak GAM juga mempertanyakan se melepaskan tembakan ke arah kendaraan tersebut. Sebuah peluruyang tidak ditemukan lagi dalam UU-PA. Seperti, p menewaskan Syafruddin, anggota GAM. Dalam kasus ini, meskipun menyatakan bahwa Aceh akan menikmati akses lang sangat menyasarkan tindakan aparat yang dianggap tidak propors- hambatan ke negara-negara lain melalui laut dan ud juga poin MoU yang menyatakan bahwa batas maksimu

di Aceh adalah 14.700 personil, dengan fungsinya di bidang perwarga sipil tewas, 100.000 mungsungsi.<sup>112</sup> Dibandingkan dengan Indonesia, Aceh memiliki jumlah personil yang lebih banyak. Di dalam UUPA ini tidak disebutkan lagi jumlahnya berapa. Fungsinya pun sudah bertambah dengan fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi TNI membangun infrastruktur”.<sup>85</sup>

Perjanjian Helsinki tumbuh rasa keyakinan dan harapan di Aceh. Kepercayaan dan komitmen terhadap proses perdamaian mana mana. Warga Aceh yang melarikan diri akibat konflik sekarang merasa aman untuk kembali dari daerah lain seperti Malaysia, Eropa dan AS. Masyarakat berani melakukan perjalanan sebelumnya dianggap berbahaya, seperti membuat api di malam hari dan mendaki bukit di daerah pegunungan.

Tabel 5  
Rekapitulasi Tabel Kekerasan Satu Tahun Perjanjian Damai  
15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2006

No	Kasus	Event	TNI	Polri	OTK	MILISI	Mantan GAM	LK	PR
1.	Pembunuhan	8	2	2	4	0	0	9	1
2.	Penghilangan Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penyiksaan	26	13	6	4	1	2	54	0
4.	Penangkapan	1	0	1	0	0	0	0	0
5.	Pembakaran Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pengrebekan	1	1	0	0	0	0	0	1
7.	Pengrusakan	1	0	0	0	0	1	1	0
8.	Pemerasan	9	1	4	1	0	3	10	1
9.	In-timidasi/Terror	2	1	0	1	0	0	2	0
	Jumlah	48	18	13	10	1	6	76	3

Sumber: [http://www.kontras.org/lampiran/data\\_kekerasan](http://www.kontras.org/lampiran/data_kekerasan)

Dalam nota kesepahaman, AMM diberikan mandat untuk monitor situasi hak asasi manusia dan memberikan laporan ke bidang ini, termasuk kepada para mantan anggota GAM yang diintegrasikan ke dalam masyarakat. AMM menangani perselisihan melalui kasus-kasus individu maupun dalam bentuk diskusi dengan pihak-pihak terkait. Ini juga bertujuan

<sup>112</sup> Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of Implementation”, *Policy Studies* 9, Washington: East-West Center,



adalah trick politik yang dilakukan oleh pemerintah agar suara pemilihan yang pro GAM pecah. Apabila terpilih Humam/Hasbi, Jakarta khawatir karena keduanya adalah calon yang tidak begitu dekat dengan Pemerintah. Apalagi Humam memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika dan Uni Eropa. Anggapan saya, Jakarta kurang nyaman dengan pasangan ini".<sup>109</sup>

Menurut Nurdin, belum saatnya GAM terjun ke pemerintahan, dan akan lebih jika memosisikan diri sebagai oposisi. GAM masih perlu waktu untuk mempelajari system pemerintahan di Indonesia. "Peluang untuk GAM menjadi Kepala Pemerintahan saya nilai bisa jadi hanya merupakan jebakan, atau kalaupun kita jadi Kepala Pemerintahan tidak akan mampu memanage Pemerintahan di Aceh yang sudah terlanjur rusak. Pihak Indonesia akan menunggu kita berbuat salah untuk mendeligitimasi GAM dalam masyarakat. Kemudian GAM tidak akan bisa menjalankan pemerintahan karena aparaturnya yang ada di bawah adalah kesemuanya berasal dari aparaturnya Indonesia".<sup>110</sup>

### 7. Kekerasan dan Hak Asasi Manusia

Hadirnya AMM sebagai lembaga yang memonitor perdamaian di Aceh sangat berpengaruh terhadap peningkatan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang semakin menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik atau positif, dimana kekerasan jarang terjadi lagi. Dalam laporannya, Crisis Group menemukan bahwa tanggapan masyarakat terhadap proses perdamaian cukup positif, bahkan di wilayah-wilayah dimana GAM memiliki banyak pendukung dimana konflik paling parah terjadi, seperti di Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tengah. Ada upaya keras dari pimpinan GAM dan TNI untuk mendandani pasukannya agar tidak terlibat konflik.<sup>111</sup>

Kendati demikian, bukan berarti pelanggaran HAM sama sekali tidak terjadi, hanya saja relative berkurang sangat jauh. Kontras banyak mencatat berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh dalam kurun waktu satu tahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (lihat table 5).

Bandingkan misalnya dengan data kekerasan Huber dan *The Jakarta Post* setahun pasca pelaksanaan darurat militer di Aceh dimana TNI mengkalim telah membunuh 2000 anggota GAM, menahan 2100 orang dan sekita 1300 orang menyerahkan diri dan ratusan

MoU	UUPA
Artikel 1.1.2, butir b,c,d) Pemerintah dan Legislatif Indonesia dituntut untuk mendapat "persetujuan" dari Legislatif dan Pemerintah Aceh dalam beberapa perkara	Pasal 8 Pemerintah dan Legislatif untuk melakukan "konsultasi" dengan Legislatif dan Pemerintah Aceh dalam perkara (pasal 8)
Artikel 1.1.2. butir a Disebutkan dengan jelas tentang pemisahan wewenang antara pemerintah dan pemerintah Aceh.	Pasal 11 adalah yang menunjukkan intervensi langsung dan terhadap kewenangan. Bahkan, GAM mengancam menginfiltirasi pasal-pasal 147, 154.6, 165.8, 211 dan pasal 249.
Artikel 1.3.8 Disebutkan bahwa, auditor yang digunakan adalah auditor luar, dan tidak mengharuskan melalui BPK.	Pasal 194 ayat 2 Dalam melaksanakan pemerintahan Pemerintah Aceh dalam lembaga yang independen menggunakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Artikel 1.4.5 Tidak disebutkan adanya pembatasan waktu seperti tersebut dalam UUPA	Pasal 228 ayat 1 Pengadilan Hak Asasi Manusia Aceh hanya untuk memeriksa HAM yang dilakukan dan disahkan..
Artikel 1.3.7, Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara lain melalui laut dan udara.. "Di dalam UUPA ini tidak disebutkan lagi jumlahnya berapa. Fungsinya pun sudah bertambah dengan fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi TNI membangun infrastruktur". <sup>86</sup>	Tidak disebut
Artikel 4.7 Batas maksimum TNI organik di Aceh adalah 14.700 personil, dengan fungsinya di bidang pertahanan luar	Tidak disebut

Diolah dari berbagai sumber

Atas dasar penolakan tersebut, pemerintah bersikeras menyatakan bahwa UUPA sama sekali tidak bertentangan dengan MoU. Penambahan atau penyebutan sesuatu serta tidak disebutkannya beberapa ketentuan dalam MoU bukan berarti pelanggaran karena UUPA dan MoU bukan dua hal yang saling menegasikan. GAM sendiri mengakui UUPA secara umum sudah memuaskan.<sup>87</sup> Menanggapi beberapa pasal yang dipermasalahkan GAM, Ketua AMM menyampaikan kepada GAM: "Jika anda tidak puas, jalannya adalah Mahkamah Konstitusi. Jika anda melakukan upaya lain, itu tidak *on the right track*."<sup>88</sup>

Menurut Sidney Jones, UUPA memang tidak dapat memuaskan semua pihak. Tetapi itu tidak cukup kuat untuk menggagalkan proses damai. "UUPA, meski dianggap oleh sebagian kalangan belum menampung seluruh aspirasi masyarakat Aceh, tetapi UU ini jauh lebih baik dibandingkan berbagai produk UU sebelumnya serta telah memberikan peluang pembentukan partai politik local dan penguatan pemerintah daerah yang lebih demokratis."<sup>89</sup>

## 6. Transformasi GAM

Seperti disebutkan diatas bahwa dengan penyerahan senjata oleh GAM, ini menandakan adanya perubahan strategi dari perjuangan senjata menuju perjuangan politik. GAM telah mentransformasikan diri dari perjuangan fisik bersenjata yang mengusung kemerdekaan Aceh, menuju sebuah gerakan politik yang demokratis di dalam wilayah Pemerintah Indonesia. "TNA bubar, kita alihkan menjadi KPA (Komando Peralihan Aceh) untuk bisa mengontrol para mantan prajurit kita dan membantu mereka kembali ke masyarakat. Ketua KPA pusat adalah Muzakkir Manaf, dan Komandan Wilayah langsung dialihkan menjadi Ketua KPA untuk wilayah masing-masing, demikian juga untuk komando di bawahnya" kata Husaini, Panglima Wilayah/Ketua KPA Batee Iliak.<sup>90</sup>

Peralihan atau transformasi GAM menjadi gerakan sipil ini menjadi sebuah tantangan besar bagi GAM. Dalam menghadapi situasi perubahan ini, terlihat GAM tidak siap dengan strategi politiknya. Seorang pemimpin GAM di Bireuen mengeluh bahwa ia belum pernah menerima instruksi apapun mengenai persiapan untuk perjuangan politik.<sup>91</sup>

<sup>87</sup> Wawancara dengan Nurdin Abdurrahman, salah seorang anggota Tim Perundingan GAM pada perundingan di Helsinki. Wawancara di Sidney pada tanggal...

team H2O, Kautsar, Adi Laweung dan team bayangan untuk mendramatisir keadaan seolah olah team Irwan panik. Padahal yang panik adalah H2O karena mereka di lapangan. Tuduhan itu segera dibantah oleh Adi Laweung:

"Salam Penjelasan,

Untuk diketahui oleh semua elemen bahwa, yang ditujukan kepada saya (Adi Laweung) dan yang membuat surat dukungan terhadap H2O pada mendatang atas nama Perdana Menteri GAM Malik adalah bohong. Juga yang membuat surat itu dukungan Irwandi-Nazar yang diklaim palsu.

Saya dan Kautsar tidak pernah melakukan tersebut, maka pihak yang pro ke kubu Irwandi-Mu Nazar jangan asal menuduh. Tuduhan kepada saya harus faktual.

Tuduhan yang dilemparkan oleh Munawar itu benar dan dia sendiri tidak bisa menuduh begi Munawar jangan menamakan diri sebagai Deputy Ju GAM Swedia, kapan Anda dilantik? Mana bukti pengangkatan Anda? Anda jangan banyak melakukan pembohongan di Aceh.

Saya pikir pertanyaan Anda segera dicabut. Anda menuduh saya dan Kautsar tanpa bukti yang komprehensif.

Terima kasih,  
Adi Laweung

Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di tubuh GAM. Dalam persoalan pilkada, beberapa anggota GAM (melalui email) justru melihat GAM telah terjebak oleh strategi Nurdin Abdurrahman, selaku mantan perunding GAM yang tidak mengertinya mengapa Pimpinan GAM menentang Abdullah sebagai Wagub berpasangan dengan Humam PPP, dan alasan Irwandi/Muhammad Nazar mencalonkan menurutnya, kans mereka untuk menang sangat kecil. Irwandi/Nazar tidak sadar mereka sudah diagitasi oleh Jaksa. Jika GAM terpecah, sehingga Golkar yang akan meraup suara, katakan demikian? Pada bulan April 2006, Jakarta masih tidak ada peluang untuk calon independent maju dalam pilkada. Tidak akan mengakomodir hal ini. Namun setelah UUPA dinyatakan Calan independent dapat ikut dalam pilkada. Saya

tercantum nomor fax serta tulisan dan huruf yang berbeda. Sedangkan surat dukungan untuk Humam-Hasbi dalam surat jelas tercantumtertutup di Hotel Rajawali, Banda Aceh, yang dihadiri oleh beberapa tokoh senior GAM di Aceh, pada minggu ketiga nomor fax dan pengirim dari kantor GAM di Swedia.<sup>105</sup>

Akibat dari kemelut ini, Irwandi Yusuf diberhentikan dari Se-2005 untuk membentuk sebuah Majelis Nasional baruanior Refresmentatif GAM di AMM dan digantikan oleh Tgk Zakaria Saman Lampoh Awe, seseorang yang sangat disegani kaman. Begitu juga jurubicara KPA, diganti dari Sofyan Dawood kepada kedekatan dengan Hasan Tiro, dipilih sebagai ketua M. Suwardi Laweung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Adi La-yang baru. Panglima GAM, Muzakkir Manaf, sebagai Laweung. Kedua tokoh GAM pengganti ini merupakan tokoh senior GAM keamanan, Zakaria Saman alias Karim Bangkok sebagai yang selama ini dikenal mendukung Humam-Hasbi. Keputusan pe-dang politik, Ilyas Abed dipilih untuk mengepalai urutmeccatan ini, menurut salah seorang petinggi GAM, Ilyas Abed, dikelu- sementara sebuah departemen tambahan yang mengarakan oleh Mentri Malik Mahmud di Swedia.<sup>106</sup> (SAYA MASIH MEMPE- kebudayaan dan adat, akan diketuai oleh seorang ulama LAJARI TENTANG INI, KARENA ADA INFORMASI YANG LAIN saat ini belum ada yang ditunjuk untuk posisi tersebut MENYEBUTKAN BAHWA SOFYAN MASIH TETAP JURUBICARA KPA, Nasional ini nantinya akan menjadi lembaga yang paling SEMENTARA ADI LAWEUNG DIANGKAT SEBAGAI JURU BICARA MAJE- memutuskan setiap tindakan politik, termasuk langkah LIS) harus diambil untuk mempersiapkan pelaksanaan Pe-

Sementara itu secara terpisah, Selasa siang 10 Oktober 2006, Daerah (Pilkada).<sup>92</sup> Dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan giliran Irwandi-Nazar yang membuat konferensi pers yang membantah bahwa pihaknya telah membuat surat dukungan palsu dari Malik penandatanganan kesepakatan damai dengan Pemerintah Mahmud. "Kami tak pernah meminta dukungan maupun membuat su-petinggi GAM, baik yang berada di Aceh maupun di luar rat dukungan dari Malik Mahmud. Surat tersebut memang palsu dan gadakan pertemuan tertutup di Banda Aceh, Minggu 2 sengaja disebarkan orang untuk kampanye negatif atau membunuh untuk mengatur kebijakan dan strategi politik. Mereka y karakter kami."<sup>107</sup> Sedangkan alasan pemberhentiannya dari AMM lah Perdana Menteri Malik Mahmud Al Haytar, Menteri bukan karena surat tersebut, melainkan perintah langsung dari Malik Zaini Abdullah, Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah. K Mahmud dengan alasan karena Irwandi aktif dalam politik, yaitu ter- merupakan petinggi GAM yang selama ini bermukim kait dengan pencalonan dirinya sebagai gubernur. Dalam kesempatan Swedia. Para petinggi GAM di luar negeri, seperti di A itu, Irwandi menyiratkan optimismenya mampu meraih massa akar gia, Malaysia, Denmark, Kanada, Australia, dan Swe rumput di kalangan GAM, walau tanpa dukungan dari para petinggi selain tokoh GAM yang selama ini bermukim di Medan GAM di Swedia. Selain didampingi Nazar, Irwandi didampingi mantan wa. Pertemuan juga diikuti puluhan petinggi GAM di jururunding GAM Amni bin Ahmad, yang mencalonkan diri sebagai tokoh masyarakat Aceh. Pertemuan itu untuk mengatu Bupati Aceh Utara serta Irwansyah alias Mukhsalmina, yang men- tik, termasuk membahas mengenai pembentukan par calonkan diri sebagai Bupati Aceh Besar. kandidat pilkada.<sup>93</sup>

Perpecahan GAM juga terlihat melalui "perang" informasi me- Guna menghadapi pilkada dan menuju proses melalui surat elektronik (email). Dalam sebuah email yang dikirim oleh membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Menurut Munawar dikatakan bahwa surat dukungan untuk IRNA sebenarnya komando setelah pergantian TNA menjadi KPA tetapi tidak ada dan merupakan hasil rekayasa tim H2O sebagai bentuk ke-berubah: "Kami masih menggunakan pola komando ya ketakutan karena dukungan kepada Irwandi dan Nazar telah meng- dengan nama yang berbeda. Kami tetap tunduk kepada kristal di lapangan. Menurut Munawar, surat itu sengaja dibuat oleh Manaf sebagai ketua KPA Pusat, sementara kami yang Panglima Wilayah berganti nama menjadi Ketua KPA masing-masing. Pengangkatan mantan Komandan W

<sup>105</sup>acehKita.com, Selasa, 10 Oktober 2006, 01:00 WIB

ketua KPA untuk mempermudah pengawasan anggota dan beberapa tokoh GAM tidak setuju dengan koalisi memudahkan koordinasi. Kami masih dalam satu garis komando".<sup>94</sup> PPP, membantah koalisi ini. Sofyan Dawood beberapa

Dalam Menghadapi perubahan GAM menjadi organisasi politik, tahnya "Isu itu tidak benar. Sebenarnya menyangkut yang didalamnya termasuk menyongsong pilkada, GAM telah organisasi GAM, kita tidak berlingdung kepada partai membentuk sebuah organisasi Komite Peralihan Aceh (KPA) yang berdiri sendiri. Kita jelaskan kepada masyarakat Aceh diketuai oleh Teungku Muzakkir Manaf. Sebelumnya, seperti yang akan membentuk satu partai dan juga calon independ disampaikan juru bicara GAM, Bakhtiar Abdullah, GAM akanda nanti."<sup>100</sup> Dalam kesempatan lain ia juga menam menyiapkan kadernya untuk ikut ambil bagian bertarung dalam mungkin mencalonkan diri sebagai gubernur, tapi bukan pemilihan kepala daerah secara langsung baik untuk posisi gubernur atau organisasi GAM. Mungkin dia berkampanye atas ataupun walikota/bupati dengan menggunakan jalur independen.<sup>95</sup> Pernyataan Sofyan tersebut tentu saja bertentangan Tetapi KPA kemudian secara resmi mengambil keputusan GAM secara resmi KPA sebelumnya yang menyatakan GAM tidak i organisasi tidak akan ikut campur dalam pilkada namun tidak dalam pilkada.

melarang anggotanya atas nama pribadi untuk naik sebagai gubernur Dijalur independen, muncul koalisi Irwandi Yusuf atau wakil pada pilkada.<sup>96</sup> Nazar (IRNA) yang mendapat dukungan kelompok muda

Dalam perjalanan selanjutnya, nampak adanya perpecahan dua calon independen tersebut kabarnya membuat dalam tubuh GAM dalam menghadapi pilkada ini. Kelompok tua, tubuh GAM sangat kuat. Akibat pencalonan diri tersebut yang diwakili Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Lampoh Awe, Ilyas gaku pernah mendapat ancaman. "Karena yang meng Abed, Zakaria Saman dan Muzakkir Manaf, terlihat lebih mendukung KPA, maka saya telah melaporkan hal itu pada Muzakkir Manaf koalisi Ahmad Humam Hamid dari Partai Persatuan Pembangunannya.<sup>103</sup>

(PPP) dengan Hasbi Abdullah (calon independen dari GAM) yang Indikasi perpecahan itu semakin kuat terlihat dikenali dengan sebutan paket H2O (Human Hasbi Oke). Hasbi sendiri, masyarakat beredar dua versi surat dari Perdana Menteri menurut pengakuannya, kendati mengatasnamakan pribadi, tetapi Mahmud. Satu surat mendukung H2O, surat yang lain telah meminta restu pada GAM.<sup>97</sup> Dukungan ini diperlihatkan dari NA. Masing-masing pihak mengklaim suratnya adalah yang pernyataan Muzakkir Manaf yang membacakan keputusan tertulis yang lain adalah palsu. tentang dukungan terhadap pasangan Humam-Hasbi, meski buru-buru ia menambahkan bahwa dukungan tersebut bukan berarti GAM resmi pers Senin 9 Oktober 2006, petinggi GAM yang secara institusi ikut mendukung.<sup>98</sup> Swedia telah mengirim fax ke KPA yang secara teg

Kebijakan itu segera merebakkan isu koalisi PPP-GAM. Koalisi bahwa surat dukungan kepada Irwandi Yusuf- Muhamad ini sedikit banyak menimbulkan gejolak di tubuh GAM karena PPP da-maju dalam Pilkada mendatang adalah palsu. "Surat itu lam sejarahnya dianggap mendukung DOM di masa lalu. "Kita kesulitan GAM tidak pernah mengeluarkan surat dukungan tan menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan kita berkoalisi dan Nazar," ia bahkan menegaskan bahwa Pimpinan GAM dengan PPP dalam pilkada karena PPP dianggap mendukung pember-lalui surat yang ditanda-tangani Perdana Menteri G lakukan Daerah operasi Militer (DOM) dimasa lalu", kata salah satu pe-mud menyatakan bahwa, GAM mendukung Ahmad Humam Hamid petinggi GAM di Aceh.<sup>99</sup> Sebelum paket Humam-Hasbi dideklarasikan, Hasbi Abdullah dalam Pilkada mendatang. "Saat ini GAM pasangan Humam-Hasbi".<sup>104</sup> Bukti bahwa surat duk Nazar itu palsu menurut Muzakkir dapat dibuktikan

<sup>94</sup> wawancara dengan Abrar Muda

<sup>95</sup> www.acehkita.com, Kamis, 11 Mei 2006, 23:05 WIB, "GAM Siapkan Kader Ikut Pilkada"

<sup>96</sup> www.acehkita.com, Minggu, 4 Juni 2006, 14:45 WIB, "PPP Deklarasikan Paket Perdamaian Humam-Hasbi"

<sup>100</sup> www.acehkita.com, "Petinggi GAM Bahas Strategi Politik", Minggu

<sup>101</sup> www.acehkita.com, "GAM Belum Tentukan Calon Gubernur"